

EKONOMI PEMBANGUNAN

EKONOMI PEMBANGUNAN

Endang Mulyani



Endang Mulyani

Ilmu ekonomi pembangunan menitikberatkan pada masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang serta dalam rangka mendapatkan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut agar negara-negara berkembang tersebut dapat memacu pembangunan ekonominya secara lebih optimal.

Buku ini mengulas pembahasan secara terperinci dalam setiap bagian. Pada setiap babnya membahas satu topik yang membangun pengetahuan tentang pembangunan ekonomi dimulai dari ulasan tentang konsep dasar dalam pembangunan ekonomi, wawasan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan sosial dan ekonomi di negara berkembang sampai dengan dampak globalisasi terhadap pembangunan ekonomi.



Diterbitkan dan dicetak oleh:
UNY Press

Jl. Gejayan, Gg. Alamanda, Komplek Fakultas Teknik UNY
Kampus UNY Karangmalang Yogyakarta 55281
Telp: 0274 - 589346
E-Mail: unypress.yogyakarta@gmail.com

Anggota Ikatan Penerbit Indonesia
Anggota Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Negeri (APPTI)

978-602-6338-88-4



9 786026 633884

EKONOMI PEMBANGUNAN

Endang Mulyani



EKONOMI PEMBANGUNAN

Oleh: Dr. Endang Mulyani M.Si.

ISBN: 978-602-6338-88-4

Edisi Pertama, September 2017

Diterbitkan dan dicetak oleh:

UNY Press

Jl. Gejayan, Gg. Alamanda, Komplek Fakultas Teknik UNY

Kampus UNY Karangmalang Yogyakarta 55281

Telp: 0274 589346

EEmail: unypress.yogyakarta@gmail.com

© 2017 Dr. Endang Mulyani M.Si..

Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)

Anggota Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)

Penyunting Bahasa: Shendy Amalia

Desain Isi & Cover: Masruri

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Dr. Endang Mulyani M.Si.

EKONOMI PEMBANGUNAN

--Ed.1, Cet.1.-Yogyakarta: UNY Press 2017

viii + 176 hlm; 14,8x21 cm

ISBN: 978-602-6338-88-4

1. EKONOMI PEMBANGUNAN

1. Judul

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidanakan dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil Pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

PENGANTAR

Buku ini digunakan sebagai pelengkap di dunia pendidikan, khususnya dalam bidang ekonomi pembangunan. Ilmu ekonomi pembangunan menitikberatkan pada masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang serta dalam rangka mendapatkan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut agar negara-negara berkembang tersebut dapat memacu pembangunan ekonominya secara lebih optimal. Penulisan buku ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman pembaca mengenai konsep dasar dalam pembangunan ekonomi. Pembaca akan mendapatkan pemaparan tentang bagaimana pembangunan ekonomi dalam meningkatkan pendapatan perkapita yang nantinya disertai dengan perubahan yang terjadi di masyarakat.

Buku ini mengulas pembahasan secara terperinci dalam setiap bagian. Pada setiap babnya membahas satu topik yang membangun pengetahuan tentang pembangunan ekonomi dimulai dari ulasan tentang konsep dasar dalam pembangunan ekonomi, wawasan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan sosial dan ekonomi di negara berkembang sampai dengan dampak globalisasi terhadap pembangunan ekonomi.

Dengan selesainya penulisan buku ini maka saya hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar kami atas dukungan yang luar biasa sehingga membantu saya untuk terus berkarya pada bidang yang telah saya tekuni.

Berikutnya saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terkira kepada pihak Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas kepenulisan buku beserta dukungan baik material maupun moral untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas karya dosen. Saya juga menyampaikan terima kasih untuk rekan-rekan dosen di Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta yang telah mendukung dalam produktivitas menulis. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada para pembaca. Saya berharap masukan atau kritikan untuk buku ini

sehingga saya dapat mengembangkan menjadi buku yang lebih baik dan bermanfaat untuk menunjang pengetahuan mengenai pembangunan ekonomi.

Yogyakarta, 8 Februari 2017

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Konsep Dasar dalam Ekonomi Pembangunan	1
A. Definisi Ekonomi Pembangunan	1
B. Pengertian Ekonomi Pembangunan.....	4
C. Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi.....	5
D. Pembangunan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi.....	6
E. Tujuan Pembangunan Ekonomi.....	7
F. Manfaat Pembangunan Ekonomi.....	8
G. Kerugian Pembangunan Ekonomi	8
BAB II Ciri-ciri Negara Sedang Berkembang.....	13
A. Konsep Negara sedang Berkembang	13
B. Ciri-ciri Negara sedang Berkembang.....	16
C. Membedakan Negara sedang Berkembang Dengan Negara Maju .	22
BAB III Indikator Pembangunan Ekonomi	25
A. Pendapatan Perkapita sebagai Indikator Pembangunan Ekonomi.	25
B. Konsep Pendapatan Nasional dan Pendapatan Per Kapita	26
C. Kelemahan Pendapatan Per Kapita.....	33
D. Indikator Pembangunan Ekonomi dalam Paradigma Baru	35
BAB IV Faktor-faktor /Unsur-Unsur Pembangunan Ekonomi	45
A. Peranan Penduduk dalam Pembangunan Ekonomi.....	45
B. Sumber Daya Alam dan Pembangunan Ekonomi.....	51
C. Kapital dan Pembangunan Ekonomi.....	53
D. Peran Teknologi dan Fungsi Wirausaha	61

BAB V Teori Pembangunan Ekonomi.....	67
A. Teori Pertumbuhan Menurut Aliran Klasik	67
B. Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut Aliran Neo-Klasik	76
C. Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut Schumpeter.....	78
D. Teori Pertumbuhan Ekonomi Aliran Post-Keynesian	79
BAB VI Tahap-tahap Pembangunan Ekonomi	81
A. Fredrich List.....	81
B. Bruno Hilderbrand.....	82
C. Karl Bucher	82
D. W.W. Rostow.....	83
BAB VII Tipe-tipe Pembangunan Ekonomi.....	91
A. Pembangunan Ekonomi Spontan (<i>Spontaneous Development</i>)	91
B. Pembangunan Ekonomi yang Didorong	92
C. Pembangunan Ekonomi yang Dipaksakan.....	93
D. Pembangunan Ekonomi di Negara sedang Berkembang.....	94
BAB VIII Syarat, Masalah, dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi 97	
A. Syarat-Syarat Umum Pembangunan Ekonomi.....	97
B. Masalah-Masalah dalam Pembangunan Ekonomi	100
C. Kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi.....	103
BAB IX Kemiskinan dan Strategi Mengatasi Kemiskinan	111
A. Pengertian Kemiskinan.....	111
B. Macam- macam Kemiskinan	111
C. Batasan Kemiskinan.....	112
D. Indikator Kemiskinan.....	113
E. Penyebab Kemiskinan	114
F. Cara Menghitung Penduduk Miskin dan Desa Miskin.....	115

G. Strategi Menanggulangi Kemiskinan	116
BAB X Migrasi: Teori dan Kebijakan.....	120
A. Konsep dan Definisi Migrasi.....	120
B. Migrasi dan Pembangunan.....	120
C. Migrasi di Negara berkembang	121
D. Kebijakan Migrasi.....	122
E. Teori-teori Migrasi	123
BAB XI Peranan Sektor Pertanian Terhadap	
Pembangunan Ekonomi.....	131
A. Peranan Sektor Pertanian dalam Perekonomian	132
B. Syarat-Syarat Pembangunan Pertanian.....	133
C. Kebijakan Pertanian di Indonesia	136
BAB XII Peranan Sektor Industri Terhadap Pembangunan	
Ekonomi	141
A. Konsep Industri.....	141
B. Kebijakan Sektor Industri	145
C. Peranan Sektor Ekonomi terhadap Pembangunan Ekonomi	145
D. Peranan Sektor Industri di Negara sedang Berkembang.....	146
E. Perdagangan	146
BAB XIII Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	149
A. Konsep Pembangunan Berkelanjutan	149
B. Pertumbuhan Ekonomi dan Pelestarian Lingkungan.....	153
C. Industrialisasi dan Eksternalitas Pembangunan Berkelanjutan	157
D. Kebijaksanaan dalam Pengolahan Sumber Daya Alam, Pengembangan, Pemanfaatannya dan Pelestariannya.....	160

BAB XIV Globalisasi dan Pembangunan Ekonomi.....	165
A. Konsep Globalisasi	165
B. Teori Globalisasi.....	166
C. Karakteristik Globalisasi.....	167
D. Dampak Globalisasi.....	170
Glosarium.....	172
Daftar Pustaka	174
Tentang Penulis.....	176

BAB I

Konsep Dasar dalam Pembangunan Ekonomi

Perhatian terhadap pembangunan ekonomi mulai menjadi perhatian di negara sedang berkembang setelah Perang Dunia II. Sebelumnya, sedikit sekali perhatian yang diberikan oleh para ahli maupun pemerintah tentang analisis dan pelaksanaan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi menjadi suatu kebutuhan yang mendesak bagi negara sedang berkembang. Hal ini didorong semangat untuk mengejar ketertinggalannya dengan negara maju. Inilah yang mendorong munculnya pembangunan ekonomi.

A. PEMBANGUNAN EKONOMI

Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Siagian, 1994). Sedangkan menurut Ginanjar Kartasasmita (1994), pembangunan diartikan sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Paradigma tradisional memandang pembangunan ekonomi sebagai peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara secara terus menerus. Pada lingkup daerah, pembangunan ekonomi difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu provinsi, kabupaten, atau kota (Kuncoro, 2010). Seiring perkembangannya, muncul definisi pembangunan ekonomi yang menekankan pada peningkatan pendapatan per kapita. Definisi

ini menekankan pada kemampuan suatu negara untuk meningkatkan output yang dapat melebihi pertumbuhan penduduk di negara tersebut. Paradigma modern mulai mengedepankan *dethronement of GNP* (penurunan tahta pertumbuhan ekonomi), distribusi pendapatan yang semakin timpang, pengentasan kemiskinan, dan penurunan tingkat pengangguran. Pandangan tersebut telah membawa perubahan dalam paradigma pembangunan bahwa pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses yang multidimensional (Kuncoro, 2010).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan, bahwa pembangunan ekonomi memiliki empat sifat penting. Keempat sifat tersebut adalah:

1. Suatu Proses

Artinya pembangunan ekonomi itu berlangsung secara terus menerus, bukan merupakan sesuatu yang bersifat insidental. Dalam analisis ekonomi pembangunan, antara satu faktor dengan faktor yang lain saling berkaitan, berhubungan dan saling memengaruhi pembangunan ekonomi. Dengan demikian, deretan peristiwa yang timbul akan mewujudkan peningkatan dalam kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari suatu tahap pembangunan ke tahap berikutnya.

2. Usaha untuk Meningkatkan Pendapatan Perkapita

Pembangunan ekonomi merupakan upaya menaikkan pendapatan perkapita. Kenaikkan pendapatan per kapita merupakan suatu pencerminan dari timbulnya perbaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Biasanya laju pembangunan ekonomi suatu negara, ditunjukkan dengan tingkat pertambahan pendapatan nasional baik dalam bentuk *Gross National Product* (GNP) atau *Gross Domestic Product* (GDP). *Gross National Product* (GNP) adalah pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara, baik yang tinggal di negaranya dan juga warga negara yang sedang berada di luar negeri, misalnya untuk bekerja atau belajar. *Gross Domestic Product* (GDP) adalah pendapatan suatu negara yang dihasilkan oleh masyarakat yang berada di wilayah suatu negara, baik warga negara asli ataupun warga negara asing.

Terdapat beberapa kelemahan dari cara di atas, karena hanya menunjukkan indikator pembangunan ekonomi dalam arti materiil. Sesuai dengan definisi, dikatakan terjadi pembangunan ekonomi jika terdapat kenaikan pendapatan juga dibarengi adanya berbagai perubahan baik dalam kelembagaan, pola pikir

maupun teknologi. Misalnya pada tahun X pendapatan nasional dihitung, terjadi pertambahan pendapatan nasional, namun di sisi lain juga terjadi pertumbuhan penduduk. Jika tingkat pertambahan pendapatan nasional (GDP/GNP) sama dengan atau lebih rendah dari tingkat pertumbuhan penduduk, maka pendapatan per kapita akan tetap sama atau bahkan menurun. Hal ini berarti bahwa pertambahan GNP/GDP tidak memperbaiki tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat.

3. Kenaikan Pendapatan per Kapita Berlangsung dalam Jangka Panjang

Jangka panjang dalam hal ini bukan berarti pendapatan per kapita harus mengalami kenaikan secara terus menerus setiap tahun, tetapi pada suatu waktu tertentu dapat turun sebab masalah yang bersifat sementara, misalnya pada saat terjadi pergolakan politik, kemunduran sektor ekspor yang menyebabkan kondisi ekonomi turun. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa pendapatan per kapita secara rata-rata meningkat dalam jangka panjang.

4. Kenaikan Pendapatan per Kapita Bersama dengan Terjadinya Perubahan Teknologi dan atau Kelembagaan.

Pembangunan ekonomi terjadi ketika terdapat peningkatan pendapatan per kapita yang dibarengi dengan terjadinya modernisasi. Artinya, dikatakan terjadi pembangunan ekonomi jika terjadi peningkatan pendapatan nasional yang dibarengi dengan perubahan teknologi, perubahan kelembagaan, perubahan sistem politik maupun perubahan pola pikir masyarakat. Menurut Rostow, pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan antara lain:

- a. Perubahan orientasi organisasi ekonomi, politik, maupun sosial yang pada mulanya mengarah ke dalam suatu daerah menjadi berorientasi ke luar.
- b. Perubahan dalam kegiatan penanaman modal masyarakat, dari melakukan penanaman modal yang tidak produktif misalnya penanaman modal berupa emas, tanah maupun rumah menjadi digunakan untuk wiraswasta.
- c. Perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga, yaitu dari menginginkan banyak anak menjadi membatasi jumlah keluarga.

- d. Perubahan cara masyarakat dalam menentukan kedudukan seseorang dalam masyarakat, dari semula ditentukan oleh kedudukan keluarga atau suku bangsa menjadi ditentukan oleh kesanggupan melaksanakan pekerjaan.
- e. Perubahan dalam pandangan masyarakat yang mulanya berkeyakinan bahwa kehidupan manusia ditentukan oleh keadaan alam sekitarnya, dan selanjutnya berpandangan bahwa manusia harus memanipulasi alam sekitarnya untuk menciptakan kemajuan.

Sejak Adam Smith mengeluarkan bukunya “*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation*”, para ahli ekonomi mulai mempelajari tentang perkembangan ekonomi suatu negara. Analisis tentang perkembangan ekonomi suatu negara dipelajari oleh suatu ilmu yang diberi nama Ekonomi Pembangunan (*Development Economics*). Apa pengertian ekonomi pembangunan? Selanjutnya bacalah uraian berikut.

B. PENGERTIAN EKONOMI PEMBANGUNAN

Ekonomi Pembangunan merupakan suatu cabang dari ilmu ekonomi yang bertujuan menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang serta cara-cara untuk mengatasi masalah tersebut, supaya negara-negara tersebut dapat membangun ekonominya dengan lebih cepat (Sadono Sukirno, 1985). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa tujuan dari analisis ekonomi pembangunan adalah untuk:

- a. Menelaah masalah-masalah perekonomian yang terjadi khususnya di negara sedang berkembang.
- b. Menelaah faktor-faktor penyebab keterlambatan pembangunan khususnya di negara sedang berkembang.
- c. Mengemukakan cara atau pendekatan yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, sehingga dapat mempercepat jalannya pembangunan ekonomi khususnya di negara-negara tersebut.

Ekonomi pembangunan berbeda dengan ilmu ekonomi yang lain seperti ilmu ekonomi mikro maupun ilmu ekonomi makro. Perbedaannya adalah ekonomi pembangunan belum memiliki pola analisis yang mapan yang dapat diterima oleh kebanyakan ahli-ahli ekonomi. Hal ini disebabkan oleh beberapa

faktor yaitu:

- a. Sangat kompleksnya masalah pembangunan.
- b. Banyaknya faktor yang memengaruhi pembangunan dan banyaknya faktor yang terpengaruh oleh pembangunan. Hal ini menyebabkan topik yang dianalisis dalam ekonomi pembangunan meliputi bidang yang sangat luas. Beberapa contoh bidang yang dianalisis dalam ekonomi pembangunan adalah: masalah pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, distribusi pendapatan dan pembangunan, pengangguran, pembentukan modal, perdagangan luar negeri, pengalihan tabungan, bantuan luar negeri, migrasi, permasalahan dalam bidang pertanian, industri, dan lain sebagainya.
- c. Ketiadaan teori-teori pembangunan yang dapat menciptakan suatu kerangka dasar dalam memberikan gambaran mengenai proses pembangunan ekonomi.

Sampai saat ini para ekonom belum mencapai kesepakatan mengenai faktor-faktor apa yang memegang peranan paling penting dalam pembangunan ekonomi, dan bagaimana mekanisme proses pembangunan ekonomi tersebut terjadi. Dalam pembicaraan tentang masalah ekonomi, istilah ekonomi pembangunan sering dianggap sama dengan pembangunan ekonomi. Padahal kedua istilah tersebut mempunyai makna yang berbeda. Di samping kedua istilah tersebut masih ada istilah lain yang sering dipertukarkan yaitu antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi atau perkembangan ekonomi. Agar dapat memahami perbedaan antara beberapa istilah tersebut bacalah uraian berikut.

C. EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Berdasarkan pembahasan mengenai ekonomi pembangunan dan pembangunan ekonomi dalam uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara ekonomi pembangunan dengan pembangunan ekonomi. Ekonomi pembangunan merupakan ilmu yang mempelajari tentang pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan ekonomi atau sering pula disebut perkembangan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang disertai

dengan perubahan ciri-ciri penting dalam suatu masyarakat. Setelah memahami perbedaan antara pembangunan ekonomi dengan ekonomi pembangunan, penting pula untuk memahami perbedaan antara pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi.

D. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Istilah pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi sering digunakan secara bergantian dan dianggap sama. Misalnya ada suatu pernyataan yang mengatakan bahwa laju pembangunan ekonomi Indonesia kurang lebih sebesar 7% per tahun. Padahal pernyataan yang dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi. Secara konsep, istilah pembangunan ekonomi/perkembangan ekonomi (*economic development*) berbeda dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Dalam uraian mengenai konsep pembangunan ekonomi telah diuraikan terjadinya perkembangan tentang arti pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan dalam pendapatan nasional, tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat penambahan penduduk atau apakah terjadi perubahan dalam struktur ekonomi atau tidak. Sedangkan pembangunan ekonomi diartikan sebagai perkembangan pendapatan per kapita dalam suatu masyarakat bersamaan dengan perombakan dan modernisasi dalam struktur ekonomi dari tradisional ke modern. Suatu negara dapat dikatakan ada pertumbuhan ekonomi apabila terdapat lebih banyak output, dan dikatakan terjadi pembangunan/perkembangan ekonomi apabila tidak hanya terdapat lebih banyak output, tetapi juga terjadi perubahan-perubahan dalam kelembagaan dan pengetahuan teknik (terjadi modernisasi) dalam menghasilkan output yang lebih banyak tersebut. Disamping itu, dikatakan terjadi pembangunan ekonomi apabila penambahan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu melebihi dari tingkat penambahan penduduk. Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa pembangunan ekonomi selalu dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah:

- a. Akumulasi kapital
- b. Pertumbuhan penduduk
- c. Kemajuan teknologi

Setelah Anda memahami beberapa istilah tersebut di atas, selanjutnya Anda perlu memahami tentang tujuan, manfaat dan kerugian dari pembangunan ekonomi. Untuk dapat memahami secara lebih mudah Anda baca uraian berikut.

E. TUJUAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu aspek kehidupan yang terus-menerus dikembangkan di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi menyangkut kesejahteraan masyarakat luas. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai kemakmuran seluruh rakyat dalam suatu negara secara merata. Untuk mencapai tujuan tersebut negara akan mengeluarkan dana yang besar guna membangun sarana dan prasarana ekonomi yang menunjang.

Indonesia terus mengupayakan pembangunan ekonomi sejak masa kemerdekaan sampai sekarang. Setiap kali berganti masa pemerintahan, kebijakan di bidang pembangunan ekonomi selalu mengalami perubahan. Kebijakan pembangunan masa Presiden Soeharto berbeda dengan masa Presiden Joko Widodo, meskipun pada dasarnya sama yaitu untuk mencapai tujuan nasional negara kita yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Guna merealisasikan tujuan nasional tersebut, pembangunan nasional diselenggarakan secara berencana, terarah, menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Adapun tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka,

bersahabat, tertib, dan damai.

Selain itu, tujuan pembangunan nasional juga dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Tujuan jangka pendek

Tujuan pembangunan nasional jangka pendek adalah meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan masyarakat yang adil, merata serta meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.

b. Tujuan jangka panjang

Tujuan pembangunan nasional dalam jangka panjang adalah mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah NKRI yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

F. MANFAAT PEMBANGUNAN EKONOMI

Pembangunan ekonomi pada suatu negara memberikan beberapa manfaat yang baik bagi masyarakat maupun negara. Beberapa manfaat terjadinya pembangunan ekonomi antara lain sebagai berikut:

- a. Kekayaan dari output suatu masyarakat atau perekonomian akan bertambah.
- b. Memberikan kesempatan kepada manusia yang lebih besar untuk mengoptimalkan manfaat dari sumber daya yang ada.
- c. Pembangunan ekonomi dapat menambah kesempatan untuk mengadakan pilihan yang lebih luas.
- d. Terjadinya pembangunan ekonomi, akan tersedia lebih banyak jasa yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia.
- e. Pembangunan ekonomi akan mengurangi jurang perbedaan antara negara-negara yang sedang berkembang dengan negara-negara yang sudah maju.

G. KERUGIAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Pembangunan ekonomi selain memberikan manfaat atau dampak positif

tentu memiliki konsekuensi berupa dampak negatif atau kerugian. Pembangunan yang berhasil adalah yang menghasilkan dampak positif yang besar dan dampak negatif yang minimal. Adapun dampak positif pembangunan ekonomi seperti adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu dampak positif yang lain sebagai berikut:

- a. Perbaikan lingkungan hidup melalui pembangunan pemukiman.
- b. Adanya jaminan sosial yang lebih baik.
- c. Penerangan listrik tersedia sehingga masyarakat mampu meningkatkan aktivitas perekonomian.
- d. Kemajuan teknologi yang mempermudah kehidupan sosial masyarakat.
- e. Pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi.
- f. Adanya daerah pemukiman baru yang lebih sehat dan tersedianya sarana dan prasarana.
- g. Terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, Dengan demikian, akan mengurangi pengangguran.
- h. Terciptanya lapangan pekerjaan akibat adanya pembangunan ekonomi secara langsung bisa memperbaiki tingkat pendapatan nasional.
- i. Adanya perubahan struktur perekonomian dari struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi industri, sehingga kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh negara akan semakin beragam dan dinamis.
- j. Peningkatan kualitas SDM sehingga memungkinkan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang dengan pesat. Sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain mendatangkan dampak positif, pembangunan ekonomi juga menimbulkan kerugian-kerugian. Permasalahan dalam pembangunan ekonomi sangatlah kompleks dan multidimensional, karena pembangunan ekonomi selalu berkaitan dengan aspek lain. Setiap negara dalam menjalankan pembangunan ekonomi pasti akan mengalami berbagai hambatan dimana antara negara satu dengan negara lain bisa sangat berbeda. Kerugian-kerugian yang harus ditanggung negara dan masyarakat akibat pembangunan tidaklah sedikit. Kerugian ini dapat secara materi atau nonmateri. Secara materi kerugian akibat pembangunan ekonomi dapat diperhitungkan sebagai biaya, namun

kerugian nonmateri ini sangat sulit untuk diperhitungkan sebagai biaya. Namun demikian, kedua kerugian tersebut dapat digolongkan sebagai biaya sosial atau social cost yang harus ditanggung oleh pemerintah maupun masyarakat. Ada beberapa kerugian yang ditimbulkan akibat pembangunan ekonomi antara lain :

1) Meningkatnya pengangguran

Jumlah penduduk yang terus meningkat dapat menyebabkan jumlah pengangguran yang meningkat terus. Hal ini dikarenakan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, sehingga menimbulkan masalah pengangguran. Negara sedang berkembang, secara umum menjalankan model pembangunan yang lebih diarahkan pada tenaga kerja yang mempunyai skill, yaitu pada sektor industri. Padahal masyarakat di negara berkembang pada umumnya merupakan masyarakat agraris. Ironisnya sektor pertanian seringkali diabaikan dan dijauhkan dalam jangkauan pembangunan.

2) Munculnya ketimpangan di berbagai bidang

Model pembangunan yang baik adalah model pembangunan yang diikuti dengan pemerataan hasil-hasil pembangunan di segala bidang dan antar daerah. Namun, pada kenyataannya masih terdapat masalah ketimpangan seiring dengan meningkatnya pembangunan ekonomi. Munculnya berbagai ketimpangan ini, tidak terlepas dari keterbatasan dana dan manajemen yang dimiliki. Penentuan skala prioritas dalam pembangunan harus benar-benar dilakukan secara adil dan merata. Seringkali yang terjadi adalah pemilihan prioritas berdasarkan pada adanya kepentingan politik maupun pribadi. Sehingga tidak mengherankan apabila di negara sedang berkembang tumbuh dengan suburnya masalah kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan pembangunan antar daerah atau wilayah, seperti nampak pada gambar berikut.

3) Pencemaran Lingkungan

Pembangunan ekonomi di negara berkembang pada umumnya identik dengan pembangunan sektor industri. Bagi negara berkembang untuk dapat menjadi negara maju, maka sektor industri harus dikembangkan. Persepsi ini

dilatarbelakangi oleh keadaan negara Eropa yang merupakan negara maju, dengan sektor industri yang berkembang sangat pesat. Pembangunan industri berkaitan langsung dengan lingkungan. Negara berkembang yang pada umumnya kaya akan sumber daya alam, benar-benar memanfaatkan kondisi ini dengan menarik investor dari luar. Bagi negara berkembang yang penting industri tersebut dapat memberi masukan bagi negara, maka sepanjang hal tersebut dapat dicapai hal lainnya tidak dipikirkan dengan serius, seperti kerugian akibat pencemaran limbah industri, hilangnya hutan dan sebagainya.

4) Rusaknya tatanan nilai-nilai sosial budaya

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu keterbukaan, keleluasaan dalam menyerap berbagai nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Dengan semakin terbukanya hubungan dengan dunia internasional, maka semakin banyak nilai-nilai sosial budaya yang berinteraksi dengan nilai-nilai budaya setempat. Pergeseran ini sering terjadi dan menimbulkan permasalahan sendiri dalam masyarakat sebab, nilai-nilai sosial budaya yang berasal dari luar negeri belum tentu sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat. Maka dalam kondisi seperti inilah terjadi benturan-benturan. Sebagai contoh sikap hidup materialistis, individualistis merupakan gaya hidup bagi masyarakat kapitalis. Bagi mereka gaya hidup seperti itu adalah hal biasa dan wajar-wajar saja, tetapi bagi masyarakat negara sedang berkembang tentu akan menjadi hal yang dianggap tidak wajar dan dianggap tidak sesuai dengan budayanya.

5) Meningkatnya kaum urban

Model pembangunan yang timpang, dapat menimbulkan berbagai gejala sosial dalam masyarakat. Model pembangunan yang banyak berfokus di kota jelas akan menimbulkan rasa iri bagi penduduk di pedesaan. Kehidupan yang dianggapnya jauh lebih baik dilihat dari sisi pendapatan akan mendorong penduduk desa untuk beramai-ramai pindah ke kota dan mencari pekerjaan di kota. Oleh karena itu, biasanya daerah-daerah dengan tingkat konsentrasi industri yang tinggi, kemungkinan ditinggali lebih banyak masyarakat pendatang.

6) Terjadinya pergeseran mata pencaharian

Orientasi pembangunan yang menekankan pada sektor industri akan menggeser peran sektor pertanian ke sektor industri. Pergeseran ini otomatis juga menggeser mata pencaharian penduduk. Sebagai contoh pekerjaan semula petani kemudian beralih menjadi buruh industri atau sebagai buruh pada proyek-proyek pembangunan di kota dengan alasan upah yang lebih menarik. Pergeseran ini dapat terjadi secara paksa atau sukarela. Pergeseran yang terjadi secara paksa, misalnya pelebaran jalan yang mengenai sawah-sawah atau pembangunan real estate. Sedang pergeseran yang terjadi secara sukarela lebih dikarenakan keinginan untuk memperbaiki tingkat pendapatan.

7) Kerugian masyarakat secara psikologis dan sosial

Secara psikologis pembangunan ekonomi mendorong seseorang untuk berpikir dan bertindak lebih mementingkan diri sendiri serta mendorong seseorang lebih bersifat materialistis. Secara sosial, hal ini mengakibatkan sifat hidup gotong royong semakin berkurang dan sifat kekeluargaan serta hubungan keluarga semakin berkurang.

BAB II

Ciri-ciri Negara Sedang Berkembang

Negara yang sedang berkembang juga disebut sebagai negara-negara Dunia Ketiga. Indikator secara kasar belum berkembangnya suatu negara dapat dilihat dari kondisi pada umumnya, seperti keadaan miskin, tingkat hidup penduduk masih rendah, rumah-rumah penduduk masih sederhana, dan sebagian besar penduduk pendidikannya masih rendah. Dengan kata lain, negara-negara sedang berkembang pada umumnya merupakan negara yang masih miskin.

A. KONSEP NEGARA SEDANG BERKEMBANG

Istilah negara sedang berkembang digunakan untuk menjelaskan dan mengategorikan negara-negara di dunia yang memiliki standar hidup relatif rendah, sektor industri yang kurang berkembang, kualitas SDM yang diindikatori dengan skor Indeks Pembangunan Manusia berada pada tingkat menengah ke bawah, serta rendahnya pendapatan per kapita. Istilah negara sedang berkembang juga digunakan sebagai sebutan bagi negara-negara yang belum maju atau negara yang masih terbelakang. Berkembang dalam hal ini berarti negara ini sedang berusaha keras untuk mengembangkan diri dengan melakukan pembangunan ekonomi guna meningkatkan kemakmurannya. Negara yang sedang berkembang ini sebagian besar berada di benua Asia dan Afrika. Dikatakan negara yang masih terbelakang (*under developed countries*) karena negara-negara ini umumnya belum merupakan negara industri dan masih

merupakan negara agraris. Karena itu, pengertian “masih terbelakang” jika dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju (negara sudah berkembang), yakni negara-negara yang berada di benua Eropa atau negara-negara Barat yang umumnya merupakan negara industri. Namun demikian, sebutan negara yang sedang berkembang lebih sering digunakan daripada sebutan negara yang masih terbelakang ini.

Terdapat beberapa pendapat mengenai penggolongan Negara maju dan Negara berkembang yaitu:

1. Pengelompokan berdasarkan Sektor Perekonomiannya

Bank Dunia mengelompokkan negara maju dan negara berkembang berdasarkan sektor perekonomian yang dijadikan tumpuan. Menurut Bank Dunia negara-negara di dunia ini terbagi ke dalam empat kelompok, yaitu :

- a. Negara maju yang berpendapatan tinggi dan mengandalkan perekonomiannya dari sektor industri.
- b. Negara berkembang yang berpendapatan menengah dan sektor industri dalam bidang perekonomiannya sedang dalam tahap perkembangan.
- c. Negara dunia ketiga yang berpendapatan rendah dan tidak memiliki sektor industri yang dapat diandalkan dalam perekonomiannya.
- d. Negara-negara pengekspor minyak yang dikelompokkan secara khusus, tidak dimasukkan dalam tiga kelompok di atas. Ini disebabkan negara-negara pengekspor minyak memiliki pertumbuhan ekonomi yang cepat karena mengandalkan sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam yang harganya terus meningkat sejak periode 1970-an.

2. Pengelompokan Negara Maju dan Negara Berkembang oleh UNDP

UNDP (*United Nations Development Program*), yakni lembaga internasional untuk pembangunan yang berada di bawah PBB, mengelompokkan negara maju dan negara berkembang berdasarkan keberhasilan negara-negara tersebut dalam membangun kualitas kehidupan manusia dari negara yang bersangkutan. Kriteria yang dipakai UNDP dalam mengelompokkan negara-negara maju dan berkembang menggunakan berbagai faktor nonekonomi seperti tingkat harapan hidup, tingkat kematian bayi, dan tingkat pendidikan.

3. Pengelompokan Negara Maju dan Berkembang berdasarkan Pendapatan Perkapita

Bank Dunia juga mengelompokkan negara-negara di dunia ini berdasarkan pendapatan perkapita yang dicapai masing-masing negara. Berdasarkan pendapatan perkapitanya, ada 4 macam negara, yaitu sebagai berikut.

- a) Negara berpendapatan rendah, yakni negara yang memiliki pendapatan per kapita kurang dari US\$ 675.
- b) Negara berpendapatan menengah bawah, yakni negara yang memiliki pendapatan perkapita antara US\$ 675 – 2.695.
- c) Negara berpendapatan menengah ke atas, yakni negara yang memiliki pendapatan perkapita antara US\$ 2.696 – 8.335.
- d) Negara berpendapatan tinggi, yakni negara yang memiliki pendapatan perkapita lebih dari US\$ 8.336.

Berdasarkan pengelompokan di atas, dapat diketahui bahwa suatu negara dikatakan berkembang atau maju salah satunya dengan melihat keberhasilan pembangunan oleh negara yang bersangkutan. Negara berkembang adalah apabila negara tersebut belum dapat mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan atau belum dapat menyeimbangkan pencapaian pembangunan yang telah dilakukan. Sedangkan negara yang mampu menyeimbangkan pencapaian pembangunan yang telah ditetapkan, sehingga sebagian besar tujuan pembangunan telah dapat terwujud baik yang bersifat fisik ataupun nonfisik maka negara tersebut dapat disebut negara maju. Pengertian lebih lanjut mengenai negara maju dan berkembang adalah sebagai berikut:

1) Pengertian Negara Maju

Negara maju merupakan sebutan untuk negara yang memiliki standar hidup relatif tinggi melalui penguasaan teknologi canggih dan ekonomi yang merata. Kebanyakan negara dengan GDP perkapita tinggi dianggap negara berkembang. Namun beberapa negara telah mencapai GDP tinggi melalui eksploitasi sumber daya alam tanpa mengembangkan industri yang beragam dan ekonomi berdasarkan jasa tidak dianggap memiliki status “maju”. Bila kita amati, negara maju adalah negara-negara industri yang sudah mampu/berhasil dalam berbagai bidang seperti pendidikan, teknologi, kesehatan, ekonomi,

politik termasuk pertahanan dan keamanannya.

Pengamat ekonomi melihat alasan yang berbeda mengapa beberapa negara menikmati perkembangan ekonomi yang tinggi. Banyak alasan menyatakan perkembangan ekonomi membutuhkan kombinasi perwakilan pemerintah (atau demokrasi), sebuah model ekonomi pasar bebas, dan sedikitnya atau ketiadaan korupsi. Beberapa memandang negara kaya menjadi kaya karena eksploitasi dari negara miskin di masa lalu, melalui imperialisme dan kolonialisme, atau di masa sekarang, melalui proses globalisasi.

2) Pengertian Negara Berkembang

Negara berkembang merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan dan mengategorikan negara-negara di dunia yang memiliki standar hidup relatif rendah, sektor industri yang kurang berkembang, skor Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index* (HDI) berada pada tingkat menengah ke bawah, serta rendahnya pendapatan perkapita. Istilah ini juga merupakan sebutan bagi negara-negara yang belum maju atau negara yang masih terbelakang. Dikatakan negara sedang berkembang (*developing countries*) karena negara ini sedang berusaha keras untuk mengembangkan diri dengan melakukan pembangunan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan. Negara-negara yang sedang berkembang ini sebagian besar berada di benua Asia dan Afrika. Dikatakan negara yang masih terbelakang (*under developed countries*) karena negara-negara ini umumnya belum merupakan negara industri dan masih merupakan negara agraris. Karena itu, pengertian “masih terbelakang” jika dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju (negara sudah berkembang), yakni negara-negara yang berada di benua Eropa atau negara-negara Barat yang umumnya merupakan negara industri. Namun demikian, untuk menyebut negara yang masih terbelakang ini, lebih sering menggunakan istilah negara yang sedang berkembang. Negara-negara yang sedang berkembang ini disebut juga sebagai negara-negara Dunia Ketiga.

B. CIRI-CIRI NEGARA SEDANG BERKEMBANG

Ciri-ciri umum negara yang miskin atau negara yang sedang berkembang menurut M. Meier dan R.E. Baldwin, ada enam macam, yakni:

1. Produsen Barang-barang Primer

Produksi dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan yakni produksi primer, sekunder dan tersier. Produksi primer adalah kegiatan ekonomi dalam bidang pertanian, kehutanan, perikanan dan pertambangan yang umumnya masih berupa bahan makanan dan bahan dasar atau bahan-bahan mentah. Kegiatan yang dilakukan dalam sektor produksi primer antara lain bercocok tanam, mengambil hasil hutan, menangkap ikan yang umumnya masih menggunakan teknologi yang sederhana. Negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya sebagai produsen barang-barang primer, yakni menghasilkan bahan makanan dan bahan-bahan mentah. Sebagian besar penduduk di negara sedang berkembang bekerja di sektor pertanian, karena itu tidak mengherankan jika sebagian besar pendapatan nasional berasal dari sektor pertanian. Pada umumnya sebagian besar penduduk di negara-negara sedang berkembang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga pengetahuan dan keterampilannya masih terbatas. Karena itu, barang-barang yang dihasilkan oleh industri di negara ini masih merupakan bahan-bahan mentah atau bahan dasar.

Sedangkan yang dimaksud produksi sekunder adalah kegiatan ekonomi yang meliputi industri-industri pengolahan, industri air dan listrik, dan industri bangunan. Dalam produksi sekunder, kegiatan yang dilakukan tidak hanya mengambil barang-barang hasil alam, melainkan berupa pengolahan sehingga menghasilkan barang-barang yang nilainya lebih tinggi, misalnya menghasilkan barang-barang setengah jadi ataupun barang jadi. Produksi sekunder ini memerlukan teknologi yang sudah maju, pengetahuan dan keterampilan penduduk yang lebih tinggi. Karena itu, penduduk di negara sedang berkembang yang bekerja di sektor produksi sekunder pada umumnya masih relatif sedikit. Pengertian dari sektor produksi tersier adalah kegiatan ekonomi yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa, antara lain meliputi pelistrikan, pengangkutan, perhubungan, perbankan, kesehatan dan perdagangan. Mengingat tingkat pendidikan dan keterampilan sebagian besar penduduk di negara-negara sedang berkembang masih rendah, maka sudah sewajarnya jika sebagian besar penduduknya bekerja di sektor produksi primer dan hanya sebagian kecil penduduk yang bekerja di sektor produksi sekunder maupun tersier.

2. Sumber-sumber Alam Belum Dikembangkan

Sumber-sumber alam yang terdapat di negara-negara sedang berkembang pada umumnya belum dikembangkan secara optimal, belum banyak diusahakan dan juga belum banyak dimanfaatkan. Sumber-sumber alam tersebut antara lain berupa berbagai bahan tambang, flora dan fauna, dan kekayaan alam lainnya baik yang terdapat dalam bumi, air dan udara. Sebagian besar sumber-sumber alam ini masih merupakan sumber yang potensial, dan belum dapat menjadi sumber yang riil. Untuk mengubah sumber alam yang potensial menjadi sumber alam yang riil diperlukan modal yang cukup besar, teknologi yang tinggi serta tenaga ahli. Padahal, negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya menghadapi kekurangan modal, teknologi dan tenaga ahli.

3. Menghadapi Tekanan Penduduk

Negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya menghadapi tekanan di bidang kependudukan berupa tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan beban ketergantungan, sehingga menyebabkan bertambahnya pengangguran dan perlunya penyediaan lapangan kerja.

Jumlah penduduk dunia pada tahun 2015 diperkirakan sebesar 7,324,782,225 jiwa atau bertambah 1.1182% dari tahun sebelumnya yang diperkirakan sebesar 7,243,784,121 jiwa. Data ini berdasarkan hasil laporan dari Divisi Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang prospek penduduk dunia yang memperkirakan jumlah penduduk dunia dengan metode *medium fertility* mengingat adalah tidak mungkin menghitung penduduk dunia secara tepat dalam suatu periode tertentu. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 sebesar 255,708,785.

Dilihat dari tingkat kelahiran, di negara-negara yang sedang berkembang sangat tinggi yakni antara 35-40 setiap 1000 penduduk, sedangkan tingkat kelahiran penduduk di negara maju ternyata kurang dari setengahnya. Demikian juga tingkat kematian yang terjadi. Di negara-negara yang sedang berkembang tingkat kematian penduduk relatif lebih tinggi dibandingkan dengan di negara-negara maju. Namun demikian, karena adanya usaha peningkatan kesehatan dan pengawasan terhadap berbagai penyakit menular, maka perbedaan tingkat

kematian antara negara yang sedang berkembang dengan negara maju lebih kecil dibandingkan dengan perbedaan tingkat kelahiran. Tingkat pertumbuhan penduduk di negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya sekitar 2%, sedangkan di negara-negara maju kurang lebih 0,6%.

Tingginya angka kelahiran penduduk di negara-negara yang sedang berkembang, mengakibatkan jumlah penduduk yang berumur kurang dari 15 tahun semakin bertambah, dimana anak-anak di bawah umur 15 tahun belum dapat bekerja secara produktif, sehingga harus ditanggung atau menjadi beban bagi penduduk usia produktif. Di lain pihak dengan makin baiknya tingkat kesehatan, jumlah kematian menurun karena itu jumlah penduduk yang berusia 65 tahun atau lebih, semakin banyak. Penduduk yang berusia 65 tahun atau lebih merupakan yang sudah tidak produktif lagi, sehingga menjadi beban bagi penduduk usia produktif. Penduduk yang berusia lanjut maupun yang masih anak-anak, keduanya secara ekonomis disebut beban ketergantungan, yakni mereka merupakan anggota masyarakat yang tidak produktif, sehingga menjadi beban tanggungan bagi angkatan kerja atau penduduk yang masih produktif. Dengan demikian, di negara-negara yang sedang berkembang menghadapi tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga beban ketergantungan menjadi lebih berat dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju.

Permasalahan berikutnya adalah, mengingat di negara-negara yang sedang berkembang kegiatan ekonomi belum maju, maka kesempatan kerja yang dapat disediakan relatif terbatas, sedangkan di pihak lain terdapat banyak tenaga kerja yang memerlukan pekerjaan, sehingga terjadi pengangguran yang semakin lama semakin bertambah banyak.

4. Penduduk Masih Terbelakang

Penduduk yang masih terbelakang merupakan kondisi penduduk yang masih tertinggal dibandingkan dengan kondisi penduduk di negara-negara yang sudah maju. Keterbelakangan atau ketertinggalan penduduk di negara-negara sedang berkembang dapat diketahui antara lain dari aspek pendidikan, standar hidup yang masih rendah atau tingkat kemiskinan dan tingkat kesehatan.

Tingkat pendidikan penduduk di negara-negara yang sedang berkembang, pada umumnya masih rendah dan bahkan angka buta huruf masih relatif tinggi. Tingkat pendidikan penduduk di negara-negara yang sedang berkembang

dapat digambarkan seperti bentuk piramida, yakni sebagian besar penduduk berpendidikan rendah, maka pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya terbatas, karena itu kualitas tenaga kerja penduduk di negara yang sedang berkembang dapat dikatakan relatif rendah.

Dengan kualitas tenaga kerja rendah, maka produktivitas yang dihasilkan juga rendah, yang berarti sumbangan terhadap pendapatan nasional akan rendah pula. Rendahnya produktivitas akan berakibat pada rendahnya pendapatan nasional maupun pendapatan perkapita. Oleh sebab itu, tidak mengherankan karena banyaknya penduduk yang kualitasnya rendah, maka penduduk tersebut dipandang sebagai beban bagi negara yang bersangkutan. Hal ini dapat berulang-ulang membentuk suatu pola yang disebut lingkaran setan (*vicious circle*).

Permasalahan lain yang perlu diperhatikan dalam aspek pendidikan adalah masalah pemerataan pendidikan berupa kesempatan memperoleh pendidikan. Mengingat pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka perlu diusahakan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pendidikan. Pada umumnya penduduk yang masih buta huruf di negara-negara yang belum berkembang lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara maju, dan sebaliknya tingkat melek huruf penduduk di negara-negara yang belum berkembang tetap rendah dibandingkan dengan di negara-negara maju. Menurut laporan program pembangunan PBB tahun 2005, menyatakan bahwa tingkat melek huruf tertinggi adalah negara Australia yaitu 100%, sedangkan tingkat melek huruf terendah adalah negara Burkina Faso sebesar 12,8%.

Pendidikan tidak hanya diperuntukkan bagi golongan penduduk menengah ke atas, akan tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya untuk tingkat pendidikan dasar. Maka negara yang sedang berkembang perlu berusaha lebih keras untuk dapat menyediakan fasilitas pendidikan dasar secara merata, agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati pendidikan dasar.

Sebagian besar penduduk di negara-negara yang sedang berkembang, memiliki standar hidup yang masih rendah. Standar hidup yang rendah ini dapat diketahui dari pencapaian pendapatan yang rendah, banyaknya kemiskinan, perumahan yang kurang layak, tingkat kesehatan yang kurang memadai, angka kematian yang tinggi, tingkat pendidikan rendah, banyak

pengangguran dan sebagainya.

5. Kekurangan Kapital atau Modal

Modal merupakan komponen dari pembangunan yang sangat penting. Modal atau kapital dapat berupa mesin-mesin dan peralatan maupun berupa modal uang. Tersedianya modal uang dalam jumlah yang cukup dapat digunakan untuk melakukan investasi, dalam bentuk pengadaan mesin-mesin maupun pembangunan industri dan sejenisnya. Namun, di negara sedang berkembang pada umumnya tingkat investasi masih rendah. Kurangnya investasi disebabkan oleh rendahnya tingkat tabungan masyarakat sebagai akibat rendahnya tingkat pendapatan.

Rendahnya penghasilan disebabkan oleh rendahnya produktivitas tenaga kerja, modal, tanah dan sumber alam lainnya. Rendahnya produktivitas disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan ataupun karena keterbelakangan penduduk. Kemiskinan dan kekurangan kapital di negara-negara sedang berkembang dapat dipandang sebagai “lingkaran yang tidak berujung pangkal” atau “*vicious circle*”. Tidak berujung pangkal karena sulit untuk menemukan apa yang menjadi sebab dari akibat-akibatnya, melainkan keduanya dapat menjadi penyebab sekaligus sebagai akibat. Hal ini nampak dalam gambaran berikut. Adanya kekurangan kapital disebabkan oleh rendahnya pendapatan. Rendahnya pendapatan ini disebabkan oleh produktivitas yang rendah. Rendahnya produktivitas disebabkan oleh rendahnya investasi. Kurangnya investasi ini disebabkan oleh rendahnya tabungan yang terjadi. Kurangnya tabungan ini disebabkan oleh kurangnya modal atau kapital sebagai akibat rendahnya pendapatan yang dihasilkan.

6. Berorientasi Perdagangan Luar Negeri

Suatu negara sekalipun memiliki sumber kekayaan alam yang berlimpah-limpah, tetap saja negara tersebut tidak dapat hidup menyendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan negara lain. Suatu negara tidak mungkin dapat membuat atau menghasilkan barang-barang yang diperlukannya hanya dari produk dalam negeri. Tanpa bantuan negara lain, negara yang bersangkutan tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya.

Salah satu perwujudan kerjasama antar negara di bidang ekonomi adalah

saling mengadakan jual beli barang-barang yang dihasilkan melalui perdagangan luar negeri. Saat ini semua negara saling mengadakan perdagangan luar negeri, atau mengadakan kegiatan ekspor dan impor. Kita memahami semua bahwa suatu negara menghasilkan barang-barang tidak hanya untuk mencukupi konsumsi dalam negeri saja, melainkan sebagian dijual ke luar atau diekspor. Pendapatan yang diterima dari ekspor tersebut digunakan untuk membeli barang-barang atau peralatan, mesin-mesin yang dibutuhkan dalam negeri yang sementara ini belum dapat diproduksi sendiri. Setiap negara memiliki jenis kekayaan atau sumber daya yang berbeda-beda. Ada yang kaya bahan tambang, kaya hasil hutan, tanahnya subur dan sebaliknya. Ada negara yang memiliki laut, tapi ada pula negara yang tidak memiliki lautan. Demikian juga iklim dan cuaca masing-masing negara tidak selalu sama. Akibat semua ini, barang-barang yang dihasilkan masing-masing negara juga tidak sama. Karena itu, mereka perlu mengadakan perdagangan luar negeri, sehingga kekurangan barang yang diperlukan dapat dicukupi dari negara lain.

C. Perbedaan Negara Sedang Berkembang dengan Negara Maju

Berdasarkan uraian tentang indikator negara maju dan berkembang, dapat dibuat perbandingan perbedaan antara negara maju dan negara berkembang. Untuk lebih memperjelas, di bawah ini disajikan secara ringkas perbedaan negara maju dan negara berkembang:

Tabel 2.1 Perbedaan negara maju dan negara berkembang

NEGARA MAJU	NEGARA BERKEMBANG
<p style="text-align: center;">Pendapatan per Kapita yang Tinggi</p> <p>Negara maju merupakan negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi. Pendapatan per kapita yang tinggi menggambarkan standar hidup yang baik pula. Menurut Bank Dunia, kriteria pendapatan per kapita untuk negara maju adalah di atas US\$10,726 per tahun.</p>	<p style="text-align: center;">Pendapatan per Kapita yang Rendah</p> <p>Ciri utama negara berkembang adalah rendahnya pendapatan per kapita penduduknya. Menurut Bank Dunia, negara berkembang yang berpendapatan menengah ke bawah yaitu antara US\$876-3,465. Negara berkembang yang berpendapatan menengah tinggi, yaitu antara US\$3,466-10,275.</p>

<p style="text-align: center;">Rendahnya Tingkat Pengangguran</p> <p>Ciri di bidang ekonomi lainnya adalah rendahnya tingkat pengangguran. Hal ini karena seluruh sumber ekonomi bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Pengangguran yang umum terjadi di negara maju adalah pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang terjadi karena peralihan tenaga kerja dari pekerjaan satu ke pekerjaan lain.</p>	<p style="text-align: center;">Tingginya Tingkat Pengangguran</p> <p>Kondisi perekonomian yang belum berkembang menyebabkan sempitnya lapangan kerja sehingga tingkat pengangguran di negara berkembang cukup tinggi. Jenis pengangguran yang ditemui di negara berkembang adalah setengah pengangguran dan pengangguran terselubung.</p>
<p style="text-align: center;">Kegiatan Ekonomi Utama di Sektor Industri dan Jasa</p> <p>Mata pencaharian utama masyarakat di negara maju adalah bidang industri dan jasa. Contoh bidang industri adalah industri mobil, elektronik, alat-alat berat, pesawat terbang, dan makanan jadi. Contoh bidang jasa yaitu jasa keuangan, pendidikan, hiburan, dan konsultan.</p>	<p style="text-align: center;">Perekonomian Mengandalkan Sektor Primer</p> <p>Perekonomian di negara berkembang masih mengandalkan sektor-sektor primer seperti pertanian, kehutanan, pertambangan, dan perikanan. Sektor ini masih mengandalkan kekayaan alam. Kegiatan di sektor industri pengolahan dan jasa masih sangat kurang. Hal ini karena teknologi produksi yang dikuasai masih rendah dan hanya mengandalkan cara tradisional untuk mengolah sumber daya yang ada.</p>

<p style="text-align: center;">Rendahnya Laju Pertumbuhan Penduduk</p> <p>Ciri kependudukan di negara maju adalah rendahnya laju pertumbuhan penduduk. Hal ini ditandai oleh rendahnya angka kelahiran dan rendahnya angka kematian bayi. Keadaan ini ditunjang oleh tingginya kesadaran tentang perencanaan keluarga, kemajuan fasilitas kesehatan, penundaan usia nikah, dan tingginya partisipasi wanita dalam dunia kerja.</p>	<p style="text-align: center;">Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk</p> <p>Kondisi kependudukan di negara berkembang ditandai dengan tingkat kelahiran dan tingkat kematian bayi yang tinggi. Tingkat kelahiran yang tinggi ini dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran tentang perencanaan keluarga, pernikahan usia dini, terbatasnya peran wanita dalam dunia kerja, dan kepercayaan bahwa banyak anak banyak rezeki.</p>
<p style="text-align: center;">Tingginya Tingkat Pendidikan</p> <p>Tingkat pendidikan masyarakat di negara maju sudah sangat tinggi. Hampir seluruh penduduk bisa membaca dan menulis (melek huruf). Pemerintah mampu memberikan jaminan pendidikan dasar gratis kepada seluruh lapisan masyarakat. Fasilitas pendidikan di negara maju juga tersedia lengkap.</p>	<p style="text-align: center;">Rendahnya Tingkat Pendidikan</p> <p>Tingkat pendidikan di negara berkembang masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari terbatasnya fasilitas pendidikan bagi pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah belum mampu menyediakan fasilitas pendidikan secara merata bagi seluruh masyarakat.</p>

BAB III

Indikator Pembangunan Ekonomi

Dalam menentukan tingkat keberhasilan pembangunan suatu negara diperlukan tolok ukur dengan indikator sesuai dengan definisi dari ekonomi pembangunan itu sendiri. Hal ini supaya pembangunan ekonomi dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Indikatornya adalah tingkat pendapatan harus seimbang dengan pengeluaran dan harus seimbang pula dengan tingkat produksi, indikator tersebut diharapkan mampu mewakili atau merupakan model dari semua aspek atas pembangunan ekonomi.

A. PENDAPATAN PERKAPITA SEBAGAI INDIKATOR PEMBANGUNAN EKONOMI

Indikator merupakan sesuatu yang memberikan kunci untuk pemahaman kompleks atau masalah yang lebih penting, bisa membuat jelas suatu kecenderungan atau fenomena yang tidak segera terdeteksi. Mendefinisikan, mengukur, membandingkan dan menganalisis indikator perkotaan untuk keberlanjutan dan kualitas hidup sangat penting untuk memahami kota perencanaan dan proses manajemen. indikator tersebut adalah alat penting untuk menghadapi tantangan untuk memperbaiki kota-kota kita, terutama dengan mengetahui seberapa baik atau buruk kita hidup.

Penggunaan indikator dan variabel pembangunan akan berbeda-beda untuk setiap negara. Di negara yang masih miskin, ukuran kemajuan dan pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar seperti listrik masuk desa, layanan kesehatan pedesaan, dan harga makanan pokok yang rendah. Sebaliknya, di negara-negara yang telah dapat memenuhi

kebutuhan tersebut, indikator pembangunan akan bergeser kepada faktor-faktor sekunder dan tersier. Sejumlah indikator ekonomi yang biasa digunakan oleh lembaga-lembaga internasional antara lain pendapatan perkapita, *Gross National Product*/GNP atau *Gross Domestic Product*/GDP, Indeks Kualitas Hidup (IKH) serta Indeks Pembangunan Manusia.

B. KONSEP PENDAPATAN NASIONAL DAN PENDAPATAN PER KAPITA

Masyarakat merupakan salah satu pelaku ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat setiap hari sangat bervariasi. Selain pergi ke tempat kerja, banyak masyarakat yang pergi ke pasar, toko, maupun ke dokter untuk membeli barang/jasa yang mereka butuhkan. Kegiatan masyarakat seperti yang dipaparkan di atas dapat dikelompokkan menjadi dua kegiatan utama yaitu kegiatan masyarakat untuk menghasilkan barang atau jasa dan kegiatan masyarakat untuk membeli barang dan jasa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan.

Produk nasional adalah barang dan jasa yang dihasilkan seluruh masyarakat selama periode waktu tertentu. Banyak orang menganggap makna produk nasional sama dengan pendapatan nasional. Padahal kedua istilah tersebut mengandung arti yang berbeda. Dikatakan produk nasional apabila yang dihasilkan masyarakat masih berupa barang dan jasa, dan dikatakan pendapatan nasional apabila barang/jasa yang dihasilkan masyarakat sudah dikalikan atau dinilai dengan harga barang/jasa tersebut. Pendapatan nasional dapat dilihat dari beberapa pendekatan.

Pendapatan perkapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut. Pendapatan per kapita adalah jumlah (nilai) barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk membandingkan kesejahteraan atau standar hidup suatu negara dari tahun ke tahun. Dengan melakukan perbandingan seperti itu, kita dapat mengamati apakah kesejahteraan masyarakat pada suatu negara secara rata-rata telah meningkat. Pendapatan per kapita yang meningkat merupakan salah satu tanda bahwa rata-rata kesejahteraan penduduk telah meningkat. Pendapatan per kapita menunjukkan pula apakah pembangunan

yang telah dilaksanakan oleh pemerintah telah berhasil, berapa besar keberhasilan tersebut, dan akibat apa yang timbul oleh peningkatan tersebut

1. Metode Perhitungan Pendapatan Nasional

Sebelum mempelajari cara perhitungan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita, terlebih dahulu perlu dilihat kembali konsep dari kedua istilah tersebut. Dalam uraian di atas, sudah dibahas bahwa pendapatan nasional merupakan jumlah keseluruhan nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh lapisan masyarakat selama periode tertentu, untuk Indonesia adalah satu tahun kalender. Sedang pendapatan perkapita merupakan keseluruhan pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk.

Ada tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk menghitung pendapatan nasional yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran/belanja.

a. Pendekatan Produksi (*Production Approach*)

Berikut adalah merupakan contoh perhitungan pendapatan nasional menggunakan pendekatan produksi.

Tabel 3.1 PDB Indonesia Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 Menurut Harga Berlaku (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	Jumlah
1. Pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan	1 311 037.30
2. Pertambangan dan penggalian	1 020 773.20
3. Industri pengolahan	2 152 592.90
4. Listrik, gas dan air bersih	70 074.60
5. Konstruksi	907 267.00
6. Perdagangan, hotel dan restoran	1 301 506.30
7. Pengangkutan dan komunikasi	636 888.40
8. Keuangan, real estat & jasa perusahaan	683 009.80
9. Jasa - jasa	1 000 822.70
PDB	9 083 972.20

Sumber: <http://www.bps.go.id/pdb.php>

Dengan pendekatan produksi, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan hasil produksi barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh lapisan masyarakat selama periode tertentu. Dengan pendekatan ini, terdapat dua cara dalam menghitung pendapatan nasional. Pertama dengan cara menjumlahkan nilai seluruh output akhir yang diproduksi suatu negara dan kedua dengan cara menjumlahkan nilai tambah/value added hasil produksi dari tiap tahapan produksi.

Untuk menghitung pendapatan nasional menggunakan metode produksi, kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dibagi menjadi 9 lapangan usaha yaitu:

- 1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
- 2) Pertambangan dan Penggalian
- 3) Industri Pengolahan
- 4) Listrik, Gas, & air bersih
- 5) Bangunan
- 6) Perdagangan, Hotel dan Restoran
- 7) Pengangkutan dan Komunikasi
- 8) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
- 9) Jasa-Jasa

Jumlah nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan dari kesembilan sektor/lapangan usaha tersebut selama satu tahun fiskal disebut *Gross Domestic Product* (GDP) atau *Gross National Product* (GNP) yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PBN). Kedua istilah tersebut oleh banyak orang sering dianggap sama, akan tetapi kedua istilah tersebut memiliki arti yang berbeda. Produk Domestik Bruto atau *Gross Domestic Products* merupakan hasil produksi barang-barang dan jasa-jasa suatu negara ditambah dengan hasil produksi barang-barang dan jasa-jasa dari orang-orang dan perusahaan-perusahaan asing yang ada dalam suatu negara tersebut. Pada GDP digunakan istilah Gross karena didalamnya termasuk penyusutan barang-barang modal. Dinamakan domestik karena batasnya adalah wilayah suatu negara. Dinamakan product karena yang dihitung adalah produksi barang-barang dan jasa-jasa.

Sedangkan pada GNP, dikatakan *Gross* karena yang dihitung masih termasuk penyusutan nasional karena batasnya adalah nasional kewarganegaraan dan product karena yang dijumlahkan adalah produksi barang-barang dan jasa-jasa.

b. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Dengan pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan pendapatan dari seluruh lapisan masyarakat yang berasal dari penggunaan faktor-faktor produksi. Faktor produksi dibedakan menjadi empat yaitu tanah, tenaga kerja, modal dan keahlian. Dari faktor produksi tanah akan diperoleh hasil yang dinamakan sewa, faktor produksi modal akan diperoleh hasil berupa bunga, faktor produksi tenaga kerja akan mendapatkan upah dan faktor produksi keahlian akan mendapatkan keuntungan. Sehingga dengan pendekatan pendapatan, pendapatan nasional merupakan penjumlahan dari sewa, bunga, upah dan keuntungan yang dihasilkan oleh seluruh lapisan masyarakat selama periode satu tahun.

Karena faktor-faktor produksi tersebut dimiliki oleh seorang atau kelompok orang dalam masyarakat, maka balas jasanya kembali kepada masyarakat sebagai pendapatan nasional. Pendapatan nasional yang dihitung menggunakan metode ini dikenal dengan sebutan *Gross National Income* (GNI). GNI dikurangi penyusutan barang-barang modal disebut dengan *Net National Income* (NNI).

Pendapatan nasional yang dihitung dengan pendekatan pendapatan /penerimaan ini, secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan Nasional} = \text{Sewa} + \text{Upah} + \text{Bunga} + \text{Keuntungan}$$

c. Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*)

Dengan metode ini pengeluaran dikelompokkan menjadi:

- 1) Pengeluaran konsumsi perseorangan atau rumah tangga (*personal consumption expenditure*). Pengeluaran ini biasa disingkat dengan C.
- 2) Pengeluaran konsumsi pemerintah (*Government Purchases of Goods and Services*).
- 3) Investasi Domestik Bruto (*Gross Private Domestic Investment*) yang terdiri atas bangunan-bangunan baru, alat-alat produksi tahan lama dan persediaan-persediaan barang oleh perusahaan. Investasi ini

biasa disingkat dengan I.

- 4) Ekspor (x) dikurangi dengan impor (M).
- 5) Dikurangi investasi asing kalau ada.

Berdasarkan pengelompokkan tersebut, dengan pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa akhir oleh rumah tangga konsumen (konsumsi), rumah tangga produsen (investasi), sektor pemerintah (pengeluaran pemerintah), dan sektor luar negeri (nilai ekspor netto = ekspor – impor) dalam periode waktu tertentu.

Bila konsumsi dilambangkan dengan C, investasi dengan I, pengeluaran pemerintah dengan G, ekspor dengan X, dan impor dengan M, maka pendapatan nasional secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = C + I + G + X - M$$

Sedangkan pendapatan perkapita dihitung dengan cara membagi pendapatan nasional dengan jumlah penduduk.

2. Beberapa Kelemahan Pendapatan Per Kapita Sebagai Indikator Tingkat Kesejahteraan

Kelemahan pendapatan perkapita sebagai dasar dalam penentuan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara dan untuk membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat berbagai negara pada hakikatnya dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu:

a. Kelemahan Umum

Anggapan bahwa kenyataan tingkat kesejahteraan masyarakat bukan saja ditentukan oleh tingkat pendapatan mereka, tetapi juga tergantung pada faktor lain (faktor yang bersifat nonekonomi) merupakan salah satu kelemahan dari tingkat pendapatan perkapita sebagai indikator tingkat kesejahteraan. Keberatan lain terhadap penggunaan pendapatan perkapita dalam menentukan tingkat kesejahteraan, didasarkan pada keyakinan bahwa kesejahteraan suatu masyarakat merupakan suatu hal yang subjektif. Artinya setiap orang mempunyai tujuan, pandangan dan cara-cara hidup yang berbeda. Dengan demikian, setiap orang memberikan nilai- nilai yang berbeda terhadap faktor-faktor yang menentukan

tingkat kesejahteraan mereka. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa kekayaan merupakan unsur penting dalam meraih kesejahteraan hidup, karena dengan uang orang dapat memenuhi kebutuhannya. Tetapi sebagian yang lain beranggapan bahwa keagamaan yang merupakan unsur penting untuk mencapai kesejahteraan hidup. Di samping itu ada pula masyarakat yang beranggapan bahwa lebih sejahtera apabila dapat memperoleh waktu senggang (*leisure*) yang lebih banyak, dan enggan bekerja keras untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.

Pendapatan per kapita sebagai indeks untuk membandingkan tingkat kesejahteraan berbagai negara mengandung kelemahan dan mendapat kritikan dari banyak ahli. Karena perbandingan dengan cara tersebut mengabaikan perbedaan-perbedaan dalam beberapa hal diantaranya adalah:

1) Komposisi Penduduk

Dua negara yang mempunyai pendapatan perkapita sama belum tentu bahwa kedua negara tersebut juga mempunyai tingkat kesejahteraan yang sama. Hal ini dikarenakan kedua negara tersebut memiliki komposisi penduduk yang berbeda. Misal negara A, negara yang mempunyai struktur penduduk muda, artinya sebagian besar penduduknya berusia muda. Suatu negara yang mempunyai struktur penduduk muda dampaknya pada tingkat ketergantungannya akan tinggi. Apabila angka tingkat ketergantungan suatu negara tinggi, berarti beban penduduk usia produktif menjadi berat. Sedangkan negara B, mempunyai struktur penduduk yang berlawanan dengan negara A, di mana struktur penduduknya lebih banyak yang berusia produktif. Suatu negara di mana struktur penduduknya banyak yang berusia produktif, ini menunjukkan bahwa beban ketergantungan (rasio ketergantungan di negara B) adalah lebih rendah dari A. Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa negara B lebih sejahtera dari negara A, walaupun tingkat pendapatan perkapitanya sama.

2) Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan merupakan salah satu faktor penting yang untuk mengetahui apakah masyarakat merasakan hasil pembangunan secara merata atau tidak. Dalam proses perjalanan pembangunan di negara maju terbukti bahwa pembangunan ekonomi pada akhirnya akan diikuti oleh distribusi pendapatan yang merata. Tetapi kondisi ini berlawanan dengan kondisi di

negara sedang berkembang. Dari hasil pengamatan pembangunan atas negara sedang berkembang pada tingkat permulaan pembangunan ekonomi keadaan sebaliknya yang akan berlaku. Berarti bahwa pada tingkat permulaan pembangunan ekonomi justru akan tercapai distribusi pendapatan perkapita yang tidak merata. Keadaan ini telah menimbulkan ketidakpuasan terhadap usaha-usaha pembangunan di beberapa negara sedang berkembang, karena dianggap bahwa usaha tersebut hanya menguntungkan sebahagian kecil masyarakat. Pembangunan ekonomi bukanlah bertujuan untuk menciptakan modernisasi suatu masyarakat, tetapi yang lebih penting adalah menciptakan kehidupan yang lebih baik seluruh lapisan masyarakat. Berarti secara idiil selalu diinginkan agar usaha-usaha pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara merata. Tujuan ini tidak akan tercapai apabila pembangunan ekonomi mengakibatkan distribusi pendapatan masyarakat menjadi semakin buruk keadaannya.

3) Corak Pengeluaran Masyarakat

Perbedaan corak pengeluaran masyarakat di berbagai negara menyebabkan dua negara yang sama pendapatannya belum tentu menikmati kesejahteraan yang sama. Misalnya negara yang satu corak pengeluarannya sebagian besar hanya untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok, dengan pakaian yang sangat sederhana, sedangkan negara yang lain masyarakatnya dapat makan dengan enak, pakaian yang baik, pendidikan yang lebih tinggi. Maka kedua negara tersebut tidak bisa dikatakan mencapai tingkat kesejahteraan yang sama tingginya. Perbedaan iklim juga salah satu faktor penyebab perbedaan dalam corak pengeluaran masyarakat di negara maju dan negara-negara berkembang. Negara maju harus mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk memperoleh tingkat kesejahteraan yang sama dengan negara berkembang. Contoh di atas menunjukkan bahwa perbedaan dalam corak dan pola pengeluaran menyebabkan perbandingan tingkat kesejahteraan diantara berbagai masyarakat yang didasarkan kepada tingkat pendapatan perkapita mereka kurang sempurna.

4) Komposisi Produksi Nasional

Konsumsi produksi nasional akan memengaruhi tingkat kesejahteraan suatu negara. Dua negara dengan pendapatan perkapita yang sama, tingkat

kesejahteraannya akan berbeda apabila komposisi produksi nasionalnya berlainan. Suatu masyarakat atau negara akan dikatakan tingkat kesejahtraannya lebih rendah apabila proporsi pendapatan nasional yang berupa pengeluaran untuk pembentukan modal lebih tinggi dari pada negara lain yang sama pendapatan perkapitanya. Komposisi produksi nasional seperti ini tidak memberikan kepada penduduk negara itu kepuasan yang sama besarnya seperti apabila komposisinya lebih banyak berupa produksi barang-barang yang akan dikonsumsi oleh masyarakat untuk memenuhi keperluan-keperluan mereka.

5) Perbedaan Masa Lapang yang dinikmati berbagai masyarakat

Perbedaan masa lapang yang dinikmati masyarakat merupakan salah satu sumber dari ketidaksempurnaan pendapatan perkapita sebagai alat pembanding tingkat kesejahteraan. Dua masyarakat yang pendapatan perkapitanya sama, tidak dapat dianggap mempunyai kesejahteraan yang sama apabila masa bekerja untuk memperoleh pendapatan itu berbeda. Pada umumnya orang berpendapat bahwa penduduk negara-negara berkembang mempunyai lebih banyak masa lapang daripada negara maju. Apabila masa lapang tersebut dipandang sebagai suatu bentuk kesejahteraan, maka perbedaan tingkat kesejahteraan diantara negara-negara maju dan negara-negara berkembang adalah kecil daripada yang digambarkan oleh perbedaan dalam pendapatan perkapita mereka.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa suatu negara dengan tingkat pendapatan perkapita sama, tidak dapat dianggap mempunyai tingkat kesejahteraan yang sama apabila terjadi perbedaan dalam hal-hal komposisi penduduk, distribusi pendapatan, corak pengeluaran masyarakat, komposisi produksi nasional dan masa lapang yang dinikmati oleh masyarakat.

C. KELEMAHAN METODOLOGIS PERHITUNGAN PENDAPATAN PERKAPITA

Ketidaksempurnaan dalam penggunaan tingkat pendapatan perkapita sebagai alat pembanding tingkat kesejahteraan berbagai negara salah satunya disebabkan oleh lemahnya metodologis dalam perhitungan pendapatan baik dalam nilai mata uang sendiri maupun dalam mata uang negara lain. Di negara-negara yang sangat miskin terdapat kemungkinan-kemungkinan taksiran nilai pendapatan perkapita mereka adalah lebih rendah daripada yang

sebenarnya (*underestimated*). Sebagai akibatnya, dengan menggunakan ukuran tingkat pendapatan perkapita, jurang tingkat kesejahteraan di antara mereka dengan negara-negara yang lebih maju adalah lebih besar daripada perbedaan yang sebenarnya. Hal ini dibuktikan oleh berbagai studi dan observasi yang telah dilakukan oleh beberapa ahli ekonomi pada masa yang lalu.

Usaha Penyempurnaan Cara Membandingkan Tingkat Kesejahteraan Backerman, 2015, telah mengadakan suatu survei mengenai usaha-usaha yang telah dilakukan oleh beberapa pihak untuk membandingkan tingkat kesejahteraan di berbagai negara sebagai upaya menyempurnakan indeks tingkat kesejahteraan. Sebagian besar dari hasil penyelidikan yang dilakukan hanyalah menunjukkan perbandingan antara dua negara, seperti Rusia dan Amerika Serikat, Amerika Serikat dengan Jepang, Inggris dengan Thailand. Berdasarkan sifat-sifat dari cara-cara membandingkan tingkat kesejahteraan, Backerman, 2015 membedakan berbagai penyelidikan ke dalam tiga golongan:

1. Golongan Pertama

Golongan pertama adalah usaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat di dunia atau beberapa negara, dengan memperbaiki cara-cara yang dilaksanakan dalam perhitungan pendapatan nasional biasa. Usaha ini dipelopori oleh Colin Clark dan selanjutnya disempurnakan oleh Gilbert dan Karvis.

2. Golongan Kedua

Golongan kedua ini merupakan usaha untuk membantu penyesuaian dalam pendapatan masyarakat, yang dibandingkan adalah perbedaan tingkat harga di setiap negara.

3. Golongan Ketiga

Golongan ketiga merupakan usaha untuk membuat perbandingan tingkat kesejahteraan dari setiap negara, berdasarkan pada data seperti jumlah kendaraan bermotor, konsumsi minyak, jumlah penduduk yang bersekolah, usaha ini dipelopori oleh Bennet.

Menurut Backerman, dari tiga cara di atas, cara yang dilakukan oleh Gilbert dan Karvis merupakan cara yang paling sempurna. Cara ini merupakan usaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan dan pembangunan di beberapa negara, dengan memperbaiki metode perbandingan dengan menggunakan data pendapatan nasional dari masing-masing negara. Guna

memperbaiki berbagai kelemahan tersebut, mereka menghitung kembali pendapatan nasional negara-negara Eropa berdasarkan harga di Amerika Serikat. Dengan pendekatan ini, produksi nasional Amerika Serikat dan negara-negara Eropa dinilai menurut harga-harga yang sama. Hasilnya menunjukkan, bahwa perbedaan pendapatan perkapita penduduk Amerika Serikat dan Eropa tidaklah sebesar seperti yang dihitung dengan menggunakan cara sebelumnya.

Akan tetapi, cara yang baru ini memerlukan data yang lengkap untuk memungkinkan dilakukannya perhitungan kembali pendapatan nasional yang dinilai berdasarkan pada tingkat harga-harga di negara lain. Data yang diperlukan tersebut tidak tersedia di negara sedang berkembang. Oleh karena itu, Backerman mengemukakan cara lain dalam membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat di berbagai negara, yaitu dengan menggunakan data yang bukan bersifat moneter untuk menentukan indeks kesejahteraan masyarakat tiap-tiap negara. Cara lain dinamakan Indikator Non Moneter yang disederhanakan (*Modified non-monetary indicators*). Dengan cara tersebut, indeks tingkat kesejahteraan dari setiap negara ditentukan berdasarkan jenis barang tertentu yang datanya dapat dengan mudah diperoleh di negara sedang berkembang. Data itu antara lain:

- a. Jumlah konsumsi baja dalam satu tahun (kg).
- b. Jumlah konsumsi semen dalam satu tahun dikalikan 10 (ton).
- c. Jumlah surat dalam negeri dalam satu tahun.
- d. Jumlah persediaan pesawat radio dikalikan 10.
- e. Jumlah persediaan telepon di kalikan 10.
- f. Jumlah persediaan berbagai jenis kendaraan.
- g. Jumlah konsumsi daging dalam satu tahun (kg).

D. INDIKATOR PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM PARADIGMA BARU

1. Teori Kualitas Hidup

Kondisi sejahtera menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial yang berkonotasi pada suatu kondisi sosial di mana masalah-masalah sosial diatur, kebutuhan sosial dipenuhi dan terciptanya kesempatan sosial. Bukan sekedar

kegiatan amal ataupun bantuan publik yang diberikan oleh pemerintah. Pakar ilmu sosial mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai tinggi rendahnya tingkat hidup pada suatu masyarakat. Oleh karena itu kemudian diciptakan suatu metode untuk dapat mengetahui indikator kesejahteraan sosial, diantaranya adalah indeks kualitas hidup secara fisik atau PQLI (*Physical Quality of Life Index*), indeks kemajuan sosial (*The Index of Social Progress*) dan yang terbaru adalah indeks pembangunan manusia (*Human Development Index*) yang dikembangkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990. Model terakhir inilah yang menjadi populer di berbagai negara termasuk di Indonesia sebagai suatu alat untuk mengukur pembangunan manusia.

Setiap individu memiliki kualitas hidup yang berbeda tergantung dari bagaimana cara mereka menyikapi permasalahan yang terjadi dalam dirinya. Jika menghadapinya dengan positif maka akan baik pula kualitas hidupnya, tetapi lain halnya jika menghadapinya dengan negatif maka akan buruk pula kualitas hidupnya. Kualitas hidup adalah konsep yang lebih luas daripada produksi ekonomi dan standar hidup. Kualitas hidup mencakup sekumpulan penuh faktor-faktor yang memengaruhi apa yang kita hargai dalam hidup ini, melampaui sisi materialnya.

Kualitas hidup adalah perbedaan antara keinginan yang ada dibandingkan perasaan yang ada sekarang. Pernyataan ini dikenal dengan sebutan "*Calman's Gap*". Calman mengungkapkan pentingnya mengetahui perbedaan antara perasaan yang ada dengan keinginan yang sebenarnya. Contohnya dengan membandingkan suatu keadaan antara "di mana seseorang berada" dengan "di mana seseorang ingin berada". Jika perbedaan antara kedua keadaan ini lebar, ketidakcocokan ini menunjukkan bahwa kualitas hidup seseorang tersebut rendah. Sedangkan kualitas hidup tinggi jika perbedaan yang ada antara keduanya kecil. Beberapa pendekatan fenomenologi dari kualitas hidup menekankan tentang pentingnya persepsi subjektif seseorang dalam memfungsikan kemampuan mereka sendiri dan membandingkannya dengan standar kemampuan internal yang mereka miliki agar dapat mewujudkan sesuatu menjadi lebih ideal dan sesuai dengan apa yang mereka inginkan.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas hidup adalah penilaian individu terhadap posisi mereka di dalam

kehidupan, dalam konteks budaya dan sistem nilai di mana mereka hidup dalam kaitannya dengan tujuan individu, harapan, standar serta apa yang menjadi perhatian individu. Stiglitz, Sen & Fitoussi (2011) mengajukan tiga pendekatan konseptual untuk mengukur kualitas hidup, yaitu :

- a. Pendekatan pertama, yang dikembangkan erat dengan riset psikologis, dipijakkan pada gagasan tentang kesejahteraan subjektif. Pendekatan ini terkait erat dengan tradisi utilitarian, yang menyatakan bahwa upaya manusia untuk 'bahagia' dan 'puas' dengan hidup mereka merupakan tujuan universal eksistensi manusia.
- b. Pendekatan kedua berakar pada gagasan tentang kapabilitas. Pendekatan ini melihat hidup seseorang sebagai kombinasi antara berbagai 'kegiatan dan kedirian' (*functionings*) dan kebebasannya untuk memilih di antara fungsi-fungsi tersebut (*capabilities*). Dasar pendekatan kapabilitas ini memiliki akar kuat pada ide filosofis mengenai keadilan sosial. Hal ini mencerminkan manusia akan fokus pada tujuan dan menghargai kemampuan individu untuk mengejar dan merealisasikan tujuan yang dia yakini, serta memainkan peran prinsip-prinsip etis dalam merancang masyarakat yang 'baik'.
- c. Pendekatan ketiga, yang dikembangkan dalam tradisi ilmu ekonomi, didasarkan pada gagasan tentang alokasi yang adil. Dasar pemikirannya adalah menimbang berbagai dimensi non-moneter kualitas hidup (melampaui barang dan jasa yang diperdagangkan di pasar) dengan suatu cara yang menghargai preferensi seseorang.

Kemudian Stiglitz, Sen & Fitoussi (2011) menyebutkan ada beberapa bidang yang terkait dengan kualitas hidup, diantaranya yaitu : kesehatan, pendidikan, aktivitas personal, hak suara politik dan tata kelola pemerintahan, koneksi sosial, kondisi lingkungan, serta ketidakamanan pribadi. Karena penelitian oleh ketiga ahli tersebut terkait dengan pendidikan, maka penulis hanya akan membahas pendidikan.

Terkait dengan pendidikan, Stiglitz, Sen & Fitoussi mengatakan bahwa pendidikan penting bagi kualitas hidup, terlepas dampaknya pada pendapatan dan produktivitas masyarakat, dimana masyarakat yang lebih terdidik pada umumnya memiliki status kesehatan yang lebih baik, pengangguran yang lebih

sedikit, koneksi sosial yang lebih banyak, dan keterlibatan yang lebih besar dalam kehidupan sipil dan politik. Indikator pendidikan meliputi beragam bidang. Beberapa mengacu pada input (tingkat pendaftaran sekolah, anggaran pendidikan, dan sumber daya sekolah), sementara yang lain mengacu pada output (tingkat kelulusan, lamanya tahun bersekolah, pengukuran berbasis tes standar atas tingkat melek huruf dan melek angka). Dari indikator-indikator ini yang ada, indikator yang mana lebih relevan bergantung pada taraf pembangunan suatu negara dan pada tujuan proses evaluasi itu sendiri. Sebagian indikator yang paling relevan untuk mengkaji dampak pendidikan terhadap kualitas hidup adalah ukuran kompetensi seseorang, yang mengukur pendidikan dan outcome lain yang penting bagi kualitas hidup di tingkat individu.

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

a. Pengertian IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, serta dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari *London School of Economics*. Sejak itu indeks ini dipakai oleh Program pembangunan PBB pada laporan IPM tahunannya. Amartya Sen menggambarkan indeks ini sebagai "pengukuran vulgar" oleh karena batasannya. Indeks ini lebih berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. Indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar. Ketiga bidang tersebut yaitu usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*). Secara umum metode penghitungan IPM yang disajikan dalam modul ini sesuai dengan metode yang digunakan *The United Nations Development Programme* (UNDP) dalam menghitung HDI (*Human Development Index*).

b. Komponen IPM

Laporan Pembangunan Manusia (*Human Development Report*) telah menerbitkan indeks pembangunan manusia (human development index - HDI) yang mengartikan definisi kesejahteraan secara lebih luas dari sekedar pendapatan domestik bruto (PDB). HDI memberikan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia: panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup), terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi) dan memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/ PPP, penghasilan).

Indeks tersebut bukanlah suatu ukuran yang menyeluruh tentang pembangunan manusia. Indeks tersebut tidak menyertakan indikator-indikator penting seperti ketidaksetaraan serta kesulitan dalam pengukuran indikator-indikator seperti penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan politik. Indeks ini memberikan sudut pandang yang lebih luas untuk menilai kemajuan manusia serta meninjau hubungan yang rumit antara penghasilan dan kesejahteraan. Komponen HDI terdiri atas:

1) Lamanya Hidup/Usia Hidup

Lama hidup atau usia hidup diukur dengan angka hidup waktu lahir (*life expectancy at birth*). Indonesia tidak memiliki sistem vital registrasi yang baik sehingga usia hidup dihitung dengan metode tidak langsung. Metode ini menggunakan dua macam data dasar yaitu rata-rata anak yang dilahirkan hidup (*live-births*) dan rata-rata anak yang masih hidup (*still living*) per wanita usia 15-49 tahun menurut kelompok umur lima tahunan. Software yang digunakan untuk perhitungan ini adalah software mortpak life. Angka yang diperoleh dengan metode tidak langsung ini merujuk pada keadaan 3-4 tahun dari tahun survei.

2) Pengetahuan

Pengetahuan diukur dengan dua indikator yaitu angka melek huruf (*literacy rate*) penduduk 10 tahun keatas dan rata-rata lama sekolah (*mean-years of schooling*). UNDP dalam publikasi tahunan HDR sejak 1995 mengganti rata-rata lama sekolah dengan partisipasi sekolah dasar, menengah, dan tinggi karena alasan kesulitan memperoleh datanya sekalipun diakui bahwa indikator yang kedua kurang sesuai dengan

indikator dampak. Angka melek huruf diolah dari data kemampuan membaca dan menulis, sedangkan rata-rata lama sekolah dihitung menggunakan tiga variabel secara simultan yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani, dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

3) Standar Hidup Layak

Tidak seperti perhitungan umum yang menggunakan indikator GDP per kapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per capita*) sebagai indikator standar hidup layak. Perhitungan standar hidup layak disini menggunakan indikator “rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan” (*adjusted real per capita expenditure*). Sumber data yang digunakan adalah Susenas dan survei lain yang mendukung.

c. Perhitungan IPM

Untuk memperoleh angka IPM, pertama-tama perlu dihitung dulu indeks untuk ketiga komponen yang telah dijelaskan di atas. Untuk menghitung indeks usia hidup, pendidikan, dan PDB, maka dipilih nilai minimum dan maksimum untuk masing-masing komponen. Perhatikan tabel 3 berikut.

Tabel 3.2 Bobot nilai per variabel dalam menghitung IPM

Indikator	Nilai Maksimum	Nilai Minimum
Angka harapan hidup saat lahir (thn)	85	25
Angka melek huruf orang dewasa (%)	100	0
Angka partisipasi kasar gabungan (%)	100	0
PDB per kapita (PPP US\$)	40000	100

Performa ketiga peubah tersebut dinyatakan sebagai suatu nilai antara 0 dan 1 berdasarkan rumus berikut :

$$\text{Indeks Dimensi} = \frac{\text{Nilai aktual} - \text{Nilai minimum}}{\text{Nilai maksimum} - \text{Nilai minimum}}$$

IPM dihitung sebagai rata-rata indeks-indeks dimensi ketiga komponen tersebut. Penjelasan langkah-langkah dan perhitungan komponen tersebut adalah :

- 1) Hitung indeks panjang usia, sebagai ukuran prestasi relatif suatu negara dalam hal harapan hidup saat lahir.
- 2) Hitung indeks pendidikan, sebagai ukuran prestasi relatif suatu negara baik dalam hal melek huruf orang dewasa maupun gabungan angka partisipasi sekolah di tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Langkah-langkah untuk menghitung, pertama hitung indeks melek huruf orang dewasa, kemudian indeks gabungan partisipasi sekolah. Indeks pendidikan merupakan rerata berbobot (*weighted average*) indeks melek huruf orang dewasa dan partisipasi kasar sekolah: dua pertiga bobot diberikan kepada melek huruf orang dewasa, satu pertiga bobot diberikan kepada partisipasi kasar gabungan.
- 3) Indeks pendidikan = $\frac{2}{3}$ (indeks melek huruf orang dewasa) + $\frac{1}{3}$ (indeks partisipasi kasar)/
- 4) Hitung indeks PDB dengan cara, indeks PDB dihitung dengan logaritma per kapita PDB (PPP US\$) yang disesuaikan. Penyesuaian dilakukan dengan pertimbangan bahwa guna mencapai tingkat pembangunan manusia yang layak tidak dibutuhkan pendapatan yang tidak terbatas.
- 5) Setelah menghitung indeks-indeks dimensi, selanjutnya hitung IPM sebagai rata-rata biasa ketiga indeks dimensi tersebut, dengan rumus:

$$\text{HDI} = \frac{1}{3} (\text{indeks harapan hidup}) + \frac{1}{3} (\text{indeks pendidikan}) + \frac{1}{3} (\text{indeks PDB})$$

Untuk mengetahui kategori tinggi rendahnya nilai IPM, terdapat empat kriteria sebagai berikut:

- a) Rendah apabila nilai IPM kurang dari 50.
- b) Menengah Bawah apabila nilai IPM berada diantara 50 sampai kurang dari 66.
- c) Menengah Atas apabila nilai IPM berada antara 66 sampai kurang dari 80.
- d) Tinggi apabila nilai IPM lebih atau sama dengan 80.

Apabila suatu daerah memiliki IPM yang kategorinya rendah, maka

pembangunan manusia daerah tersebut memerlukan perhatian khusus untuk mengejar ketinggalannya. Begitu juga apabila suatu daerah memiliki IPM pada kategori menengah hal ini berarti pembangunan manusia masih perlu ditingkatkan. Jika daerah tersebut mempunyai status pembangunan manusia tinggi hal ini berarti kinerja pembangunan manusia daerah tersebut sudah baik/optimal maka perlu dipertahankan supaya kualitas sumber daya manusia tersebut lebih produktif sehingga memiliki produktivitas yang tinggi.

3. *Physical Quality Life Index* (PQLI)

a. Pengertian PQLI

Physical Quality of Life Index (PQLI) digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dibuat untuk menyempurnakan gambaran kesejahteraan masyarakat dengan tidak hanya menggunakan indikator makro ekonomi digunakan dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh terus, tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial. Indeks ini dihitung berdasarkan kepada (1) angka rata-rata harapan hidup pada umur satu tahun, (2) angka kematian bayi, dan (3) angka melek huruf. Dalam indeks ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian bayi akan dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan, dan lingkungan keluarga yang langsung berasosiasi dengan kesejahteraan keluarga. Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf, dapat menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan. Seperti dikemukakan di atas, variabel ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat, karena tingginya status ekonomi keluarga akan memengaruhi status pendidikan para anggotanya. Oleh para pembuatnya, index ini dianggap sebagai yang paling baik untuk mengukur kualitas manusia sebagai hasil dari pembangunan, disamping pendapatan per kapita dan HDI sebagai ukuran kuantitas manusia.

b. Perhitungan PQLI

Indeks mutu hidup atau *Physical Quality Life Index* disingkat PQLI merupakan indeks gabungan dari 3 indikator utama, yaitu:

- 1) Angka harapan hidup pada usia satu tahun
- 2) Angka kematian

3) Tingkat melek huruf

Masing-masing indikator tersebut dinyatakan dalam skala 1 hingga 100, dimana nilai 1 merupakan kinerja terjelek dan nilai 100 merupakan kinerja terbaik. Jika kinerja ekonomi suatu negara dinyatakan dalam skala 1 – 100 untuk masing-masing indikator tersebut, maka indeks kompositnya dapat dihitung dari rata-rata penilaian atas ke 3 indikator dengan memberikan bobot yang sama untuk masing-masing indikator (Morris D. Morris dalam Mudrajat K, 1997).

c. Kelemahan PQLI

Beberapa ahli mengatakan bahwa hubungan antara indikator PQLI dan Indeks gabungan GNP perkapita sangat erat sehingga menunjukkan hal yang tidak berbeda, sehingga merupakan usaha yang sia-sia untuk menghitungnya karena sudah diketahui GNP perkapita. Beberapa kelemahan PQLI sebagai indikator pembangunan ekonomi antara lain:

- 1) Penggunaan PQLI hanya efektif untuk membedakan tingkat pembangunan jika tingkat GNP masih rendah.
- 2) PQLI memberi bobot yang sama atas tiga indeks penyusunnya. Para ahli mempertanyakan dasar ilmiah pemberian bobot yang seimbang.
- 3) Tidak pernah ada dasar ilmiah dalam pembuatan skala indeks dari 0-100.
- 4) Negara berkembang belum memiliki data yang bisa dipercaya untuk menyusun indek PQLI.
- 5) Beberapa negara berpendapatan tinggi sudah mencapai indeks PQLI tinggi, sehingga pertumbuhan PQLI kecil, lalu apa arti pembangunan bagi negara berpendapatan tinggi.

BAB IV

Unsur-unsur Pembangunan Ekonomi

Salah satu komponen penentu keberhasilan pembangunan ekonomi salah satunya adalah penduduk. Penduduk dalam suatu negara dapat menjadi sasaran, pelaku, dan penentu berhasil dan tidaknya pembangunan ekonomi.

A. PERANAN PENDUDUK DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

Tujuan dari pembangunan ekonomi suatu negara adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk negara yang bersangkutan. Tingkat kesejahteraan penduduk dapat diukur dengan kenaikan pendapatan riil per kapita. Pendapatan riil perkapita adalah pendapatan nasional riil atau output keseluruhan yang dihasilkan satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk. Dari pengertian di atas terlihat bahwa tingkat kesejahteraan penduduk akan tercapai jika output total meningkat dengan lebih cepat daripada pertumbuhan jumlah penduduk.

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa ada beberapa faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya output total suatu perekonomian. Faktor pertama yang memengaruhi tinggi rendahnya output total suatu perekonomian adalah penduduk dan tenaga kerja (*human resources*). Dilihat dari peranannya, penduduk memiliki dua peranan penting dalam meningkatkan output total dari suatu perekonomian, yaitu: dari segi permintaan dan dari segi penawaran

Dari segi permintaan penduduk bertindak sebagai konsumen, sedangkan dari segi penawaran penduduk bertindak sebagai produsen. Berdasarkan dua peranan tersebut, dapat dikatakan bahwa perkembangan penduduk yang cepat tidak selalu merupakan penghambat bagi jalannya pembangunan ekonomi jika

penduduk ini mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan. Ini berarti bahwa pertambahan penduduk yang tinggi harus disertai dengan tingkat penghasilan yang tinggi pula. Pertambahan penduduk dengan tingkat penghasilan yang rendah tidak ada artinya bagi pembangunan ekonomi. Peranan penduduk terhadap pembangunan ekonomi antara negara maju dengan negara sedang berkembang tidak sama. Adapun peranan penduduk di negara maju dan negara sedang berkembang dapat Anda pelajari pada uraian berikut.

a. Peranan Penduduk Terhadap Pembangunan Ekonomi di Negara Maju

Bagi negara-negara maju, pertambahan penduduk yang pesat justru menyumbang terhadap kenaikan penghasilan riil perkapita. Hal ini dikarenakan di negara-negara yang maju pada umumnya mempunyai tabungan yang siap untuk melayani kebutuhan investasi, sehingga tambahan penduduk justru akan menambah potensi masyarakat sebagai sumber permintaan yang baru. Sebagai suatu contoh dengan bertambahnya penduduk juga akan menambah permintaan akan kebutuhan perumahan, kendaraan, kesehatan, pendidikan, pengangkutan dan lain sebagainya.

Menurut Profesor A. Hansen, bertambahnya penduduk justru akan menciptakan/memperbesar permintaan agregatif, terutama untuk investasi. Di samping itu para pengikut Keynes mengatakan bahwa pertambahan penduduk itu tidak sekedar sebagai tambahan penduduk melainkan juga sebagai suatu kenaikan daya beli masyarakat. Oleh karena itu penurunan jumlah penduduk akan menyebabkan turunnya rangsangan untuk mengadakan investasi sehingga mengakibatkan permintaan agregatif juga akan turun. Jika perkembangan penduduk tertunda maka akan mempunyai perkiraan bahwa pasar akan semakin sempit. Akibatnya para wiraswasta akan menurun, karena tingkat keuntungan merupakan fungsi dari luasnya pasar.

b. Peranan Penduduk Dalam Pembangunan Ekonomi di Negara Sedang Berkembang

Bagi negara-negara sedang berkembang keadaannya sangat berbeda, yaitu bahwa perkembangan penduduk yang cepat justru akan menghambat perkembangan ekonomi. Menurut aliran Klasik seperti Adam Smith, David Ricardo dan Thomas Robert Malthus, berpendapat bahwa selalu akan ada

perlombaan antara tingkat perkembangan output dengan tingkat perkembangan penduduk, yang akhirnya akan menang perkembangan penduduk. Menurut aliran Klasik, bahwa penduduk disamping sebagai konsumen juga berfungsi sebagai tenaga kerja, sehingga menurut mereka paling tidak akan terdapat kesulitan dalam penyediaan lapangan pekerjaan sehingga banyak penduduk yang tidak memperoleh pekerjaan, yang berarti mereka akan menganggur sehingga justru akan menekan standar hidup bangsanya menjadi lebih rendah.

Pertambahan penduduk yang tinggi menuntut adanya pembangunan ekonomi yang terus menerus. Pembangunan ekonomi memerlukan adanya investasi yang berasal dari tabungan. Padahal tabungan ini biasanya terdapat di negara maju. Negara-negara sedang berkembang pada umumnya hanya memiliki kapital yang sedikit. Usaha-usaha untuk mengadakan tabungan dirasa sangat susah karena pada umumnya produktivitas penduduk di NSB adalah rendah sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat produksi. Di samping itu di NSB, pada umumnya sebagian besar penduduk tinggal di desa dan hidupnya sebagian besar dari sektor pertanian, dimana hampir seluruh penghasilannya habis digunakan untuk pengeluaran konsumsi. Jadi akibatnya jumlah tabungan rendah sehingga tingkat investasi juga rendah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertambahan penduduk yang pesat justru akan merupakan penghambat bagi pembangunan ekonomi.

1. Permasalahan Penduduk Indonesia

a. Masalah Penduduk yang Bersifat Kuantitatif

1) Jumlah Penduduk Besar

Penduduk sebagai subjek sekaligus objek pembangunan, menjadi penduduk sebagai elemen terpenting dalam pelaksanaan pembangunan. Manfaat jumlah penduduk yang besar adalah: a) penyediaan tenaga kerja dalam masalah sumber daya alam, b) Mempertahankan keutuhan negara dari ancaman yang berasal dari bangsa lain. Selain manfaat yang diperoleh, ternyata negara Indonesia yang berpenduduk besar, yaitu nomor 4 di dunia menghadapi masalah yang cukup rumit yaitu:

a) Pemerintah harus dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan hidupnya.

Dengan kemampuan pemerintah yang masih terbatas masalah ini

sulit diatasi sehingga berakibat seperti masih banyaknya penduduk kekurangan gizi makanan, timbulnya pemukiman kumuh.

- b) Penyediaan lapangan kerja, sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan serta fasilitas sosial lainnya. Dengan kemampuan dana yang terbatas masalah ini cukup sulit diatasi, oleh karena itu pemerintah menggalakkan peran serta sektor swasta untuk mengatasi masalah ini.

2) Pertumbuhan Penduduk Cepat

Secara nasional pertumbuhan penduduk Indonesia masih relatif cepat, walaupun ada kecenderungan menurun. Antara tahun 1961–1971 pertumbuhan penduduk sebesar 2,1 % pertahun, tahun 1971–1980 sebesar 2,32% pertahun, tahun 1980–1990 sebesar 1,98% pertahun, dan periode 1990–2000 sebesar 1,6% pertahun. Keluarga berencana merupakan suatu usaha untuk membatasi jumlah anak dalam keluarga, demi kesejahteraan keluarga. Dalam program ini setiap keluarga dianjurkan mempunyai dua atau tiga anak saja atau merupakan keluarga kecil. Dengan terbentuknya keluarga kecil diharapkan semua kebutuhan hidup anggota keluarga dapat terpenuhi sehingga terbentuklah keluarga sejahtera. Dua tujuan pokok Program Keluarga Berencana yaitu:

- a) Menurunkan angka kelahiran agar penambahan penduduk tidak melebihi kemampuan peningkatan produksi.
- b) Meningkatkan kesehatan ibu dan anak untuk mencapai keluarga sejahtera

3) Persebaran Penduduk Tidak Merata

Kondisi persebaran penduduk di Indonesia sampai saat ini masih belum merata baik persebaran antarpulau, provinsi, kabupaten maupun antara perkotaan dan pedesaan. Perkembangan kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan Madura tergolong tinggi. Akibat dari tidak meratanya penduduk menyebabkan luas lahan pertanian di Jawa semakin sempit. Lahan bagi petani sebagian dijadikan permukiman dan industri. Sebaliknya banyak lahan di luar Jawa belum dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya sumber daya manusia. Sebagian besar tanah di luar Jawa dibiarkan begitu saja tanpa ada kegiatan pertanian. Keadaan demikian tentunya sangat tidak menguntungkan dalam melaksanakan pembangunan

wilayah dan bagi peningkatan pertahanan keamanan negara.

b. Masalah Penduduk yang Bersifat Kualitatif

1) Tingkat Kesehatan Penduduk yang rendah

Kualitas kesehatan penduduk Indonesia masih tergolong rendah, meskipun telah mengalami perbaikan. Indikator untuk melihat kualitas kesehatan penduduk adalah dengan melihat angka kematian dan angka harapan hidup. Angka kematian yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang rendah. Angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang baik. Kualitas kesehatan penduduk tidak dapat dilepaskan dari pendapatan penduduk. Semakin tinggi pendapatan penduduk maka pengeluaran untuk membeli pelayanan kesehatan semakin tinggi. Penduduk yang pendapatannya tinggi dapat menikmati kualitas makanan yang memenuhi standar kesehatan.

2) Tingkat Pendidikan yang Rendah

Tingkat pendidikan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kualitas SDM penduduk suatu negara. Kualitas SDM berhubungan dengan produktivitas kerja. Orang yang tingkat pendidikannya tinggi diharapkan punya produktivitas yang tinggi. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi di Indonesia adalah banyak orang berpendidikan tinggi (sarjana) tetapi menganggur. Keadaan demikian tentu sangat memprihatinkan. Orang yang menganggur menjadi beban bagi orang lain (keluarganya). Tingkat pendidikan diharapkan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan. Sehingga pembangunan dalam bidang pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah membawa dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan penduduk.

3) Tingkat Kemakmuran yang Rendah

Indonesia bukan termasuk negara miskin, akan tetapi jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan cukup besar. Kemakmuran berbanding lurus dengan kualitas SDM. Semakin tinggi kualitas SDM penduduk, semakin tinggi pula tingkat kemakmurannya. Banyak negara yang miskin sumber daya alam tetapi tingkat kemakmuran penduduknya tinggi. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya sumber daya alam. Mengapa banyak penduduk Indonesia yang hidup miskin?

2. Dampak Permasalahan Penduduk Terhadap Pembangunan

Penduduk adalah objek sekaligus subjek pembangunan. Sebagai objek, penduduk adalah sasaran pembangunan. Sebagai subjek, penduduk adalah pelaku pembangunan. Peranan penduduk sebagai subjek menentukan arah dan keberhasilan pembangunan. Potensi dan tantangan pembangunan ditentukan oleh keadaan riil kependudukan dan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara. Bagaimana potensi dan tantangan pembangunan di Indonesia? Kekayaan sumber daya alam yang ada di bumi Indonesia sangat besar. Ini merupakan suatu potensi. Masalahnya adalah sanggupkah penduduk Indonesia mengeksploitasi dan mengelola sumber daya alam yang melimpah itu? Fakta menunjukkan bahwa eksploitasi sumber daya alam di Indonesia banyak dilakukan oleh perusahaan asing. Proyek-proyek pembangunan oleh pemerintah juga sering menggunakan bantuan perusahaan asing.

Hal tersebut dikarenakan keterbatasan modal yang dimiliki dan rendahnya penguasaan teknologi penduduk Indonesia. Penguasaan teknologi dan kepemilikan modal terkait dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) penduduk Indonesia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia penduduk Indonesia ditunjukkan dengan GDP perkapita yang relatif rendah. Kualitas sumber daya manusia penduduk Indonesia yang rendah merupakan penghambat pembangunan. Secara terperinci faktor kependudukan yang menghambat pembangunan adalah:

a. Rendahnya kualitas SDM penduduk Indonesia

Volume barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduknya merupakan salah satu indikator kemakmuran suatu negara. Untuk memproduksi barang dan jasa diperlukan penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan. Penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan terkait dengan kualitas SDM penduduk suatu negara. Jadi kualitas SDM merupakan faktor penentu kemakmuran.

b. Pertumbuhan penduduk yang tinggi

Pertumbuhan penduduk bagi suatu negara dapat menjadi kekuatan sekaligus beban. Memiliki penduduk dengan kualitas tinggi merupakan kekuatan bagi negara untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Sebaliknya, memiliki penduduk dengan kualitas rendah berpotensi

menjadi beban pembangunan. Jumlah penduduk Indonesi saat ini sudah cukup besar. Akan tetapi, kualitas hidupnya masih rendah. Apabila pertumbuhan penduduk masih tetap tinggi tanpa ada upaya untuk meningkatkan kualitasnya, maka yang akan terjadi adalah penduduk Indonesia semakin terbelakang.

B. SUMBER DAYA ALAM DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

1. Pengertian, Sifat, dan Jenis Sumber Daya Alam

Sumber daya alam adalah segala benda yang terdapat di bumi baik benda hidup maupun benda mati, berguna bagi manusia, terbatas jumlahnya dan pengusahaannya memenuhi kriteria-kriteria teknologi, ekonomi sosial dan lingkungan. Sumber daya alam merupakan seluruh sumber daya yang sifatnya heterogen dan kompleks, baik berwujud sumber daya alam siap pakai maupun masih tersimpan di alam. Sebagai suatu contoh sumber daya alam antara lain adalah: nikel, batu bara, bijih besi, minyak, hutan, lahan, perikanan dan lain sebagainya.

Dilihat dari sifatnya, sumber daya alam mempunyai sifat sebagai berikut:

- a. Dinamis, sehingga memungkinkan terjadinya perubahan dalam informasi, teknologi dan relatif kelangkaannya dapat berakibat sesuatu yang semula dianggap tidak berguna menjadi berguna dan bernilai.
- b. Berguna serta mempunyai nilai dalam kondisi di mana kita menemukannya.
- c. Bersifat jamak sehingga sumber daya alam itu mempunyai dimensi jumlah, kualitas, waktu dan tempat. Sebagai suatu contoh: udara bersih di sekitar kita yang semula merupakan barang bebas, di mana untuk mendapatkannya tanpa diperlukan pengorbanan yang berupa uang. Akan tetapi di beberapa daerah, untuk memperoleh udara di beberapa belahan bumi ini mulai dirasakan kualitasnya, sehingga masyarakat terpaksa mengeluarkan biaya untuk memperoleh udara yang bersih dan sehat, dengan cara mengurangi pencemaran udara dengan pemasangan penyaring pada sumber zat pencemar maupun terpaksa pergi keluar daerah untuk menghirup udara segar.
- d. Menurut penggunaannya sumber daya alam dapat digunakan untuk

konsumsi secara langsung seperti udara, air dan ikan.

Dilihat dari jenisnya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi:

- a. Sumber daya alam yang dapat diperbarui (*renewable/replenishable/non exhaustible*). Dalam hal ini, sumber daya alam yang setelah dimanfaatkan, dapat kembali baik secara alami maupun dengan bantuan manusia. Contoh: hasil pertanian, hutan, perikanan, angin dan sebagainya.
- b. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui (*non renewable/non replanishable/exhaustible*). Dalam hal ini, sumber daya alam yang habis sekali pakai. Setelah sumber daya tersebut dimanfaatkan, butuh jangka waktu yang lama sekali untuk menghadirkan sumber daya alam tersebut kembali. Contohnya antara lain adalah: batu bara, nikel, minyak, batu kapur, emas dan perak.

Berdasar Nota Keuangan dan RAPBN Indonesia membagi jenis-jenis sumber daya alam secara sektoral menjadi:

- a. Sektor pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan dan pengairan.
- b. Sektor pertambangan yang meliputi minyak bumi, gas bumi, aspal, batu bara, bauksit, emas/perak, nikel, pasir besi, tembaga, timah.

2. Peranan Sumber Daya Alam Terhadap Pembangunan Ekonomi

Sejarah menunjukkan bahwa masyarakat dapat mencapai kemakmuran karena berhasil memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki. Sampai sekarang masih ada orang-orang yang mengatakan bahwa terbatasnya output di suatu negara yang pendapatannya rendah, antara lain disebabkan oleh sumber-sumber alam yang tersedia baik dalam arti kuantitas, jenis maupun kualitasnya rendah. Tanpa adanya sumber-sumber alam di suatu negara, maka tidak akan banyak harapan untuk adanya pembangunan ekonomi dan begitu juga sebaliknya. Sebagai contoh, beberapa kerajaan seperti Kahuripan, Singosari yang memanfaatkan air sungai Brantas untuk irigasinya dan ternyata membawa kemakmuran.

Adam Smith telah mengemukakan teorinya tentang “*absolute comparative advantage*” yang mengatakan, setiap masyarakat memproduksi sesuai dengan

keunggulan komparatif yang dimilikinya. Artinya, masyarakat yang kaya akan sumber daya alam akan lebih mampu memproduksi dibandingkan dengan masyarakat lain yang sumber daya alamnya lebih sedikit. Pada tahun 1955 Simon Kuznets mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dibatasi oleh kekurangan absolut dari sumber daya alam. Dari pernyataan Simon tersebut tersirat perkiraan, bahwa negara-negara yang miskin akan sumber daya alam akan tersendat-sendat pertumbuhan ekonominya. Data empiris menunjukkan bahwa kenaikan harga minyak tahun 1974, menyebabkan negara Kuwait, Saudi Arabia dan Uni Arab Emirat mencapai pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Dari data ini dirasakan pentingnya sumber daya alam dalam pembangunan ekonomi.

Akan tetapi, kenyataan yang harus dihadapi manusia adalah semakin tipisnya persediaan sumber daya alam. Apabila sumber daya alam terus dieksploitasi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, hal ini akan berpotensi menyebabkan pertumbuhan akan terhenti yang berarti pembangunan ekonomia akan mengalami kemandegan, karena habisnya pasokan sumber daya alam. Apabila terjadi hal yang demikian, maka untuk mempertahankan terjadinya pembangunan ekonomi suatu negara, dituntut adanya kearifan dari generasi sekarang untuk menyadari, bahwa generasi mendatang berhak menikmati sumber daya alam yang memang menjadi hak warisnya. Oleh karena itu, diperlukan cara/metode untuk mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab. Untuk mengetahui cara-cara tersebut, terlebih dahulu perlu dikaji tentang permasalahan dan faktor-faktor yang memengaruhi kelangkaan sumber daya alam.

C. KAPITAL DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Teori pembangunan yang dikemukakan oleh Harrold-Domar menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Apabila tabungan dan investasi rendah maka rendah pula pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Dalam pembangunan masalahnya adalah masalah menambahkan investasi modal, sedangkan keterbelakangan adalah masalah kekurangan modal. Jika terdapat modal yang memadai lalu modal tersebut diinvestasikan, hasilnya adalah pembangunan ekonomi. Lalu apa dan bagaimana peran modal dalam pembangunan ekonomi? Untuk mengetahuinya pahami

pembahasan di bawah ini.

1. Pengertian dan Fungsi Kapital/Modal

Modal atau kapital adalah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam produksi untuk menciptakan dan atau menambah output. Kapital terdiri atas barang-barang yang dibuat untuk penggunaan produksi pada masa yang akan datang seperti bangunan, pabrik, mesin maupun alat-alat yang dipergunakan untuk proses produksi. Dilihat dari fungsinya dalam pembangunan ekonomi, kapital mempunyai dua fungsi pokok yaitu:

- a. Sebagai pendorong perkembangan ekonomi. Peran kapital sebagai pendorong meliputi: a) investasi dalam pengetahuan teknik, b) perbaikan dalam pendidikan, c) perbaikan dalam kesehatan, dan d) peningkatan keahlian.
- b. Sebagai sumber menaikkan tenaga produksi.
- c. Dalam fungsi yang kedua ini, kapital tidak hanya berwujud pabrik, bangunan maupun mesin-mesin, tetapi juga human capital.

Fungsi kapital dalam jangka panjang adalah untuk menaikkan produktivitas. Seperti yang telah dijelaskan diatas, kapital tidak saja berwujud pabrik-pabrik dan perlengkapan, tetapi juga berwujud "*human capital*". Keadaan capital di negara berkembang relatif langka. Hal ini disebabkan oleh akumulasi capital di negara-negara tersebut sedikit. Beberapa ekonom mengatakan bahwa kemiskinan di suatu negara itu dikarenakan kurangnya kapital. Mereka menganggap kapital adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi. Padahal kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor. Dalam pembentukan kapital itu sendiri, yang perlu dicermati adalah bagaimana penawaran dan permintaan kapital itu terbentuk. Penawaran kapital rendah bila tabungan rendah, tabungan rendah karena pendapatan rendah, dan pendapatan rendah karena produktivitas rendah. Selain itu, sebagian besar pendapatan digunakan untuk konsumsi, sehingga tabungan rendah. Tambahan kapital yang besar belum tentu menyebabkan lancarnya proses perkembangan ekonomi.

2. Sumber-sumber Kapital untuk Pembangunan

- a. Sumber Fisik

Kapital dapat dibentuk dengan cara penggantian faktor-faktor produksi dari penggunaan yang kurang efisien ke penggunaan yang lebih efisien. Sehingga, faktor-faktor yang mengganggu secara tersembunyi dapat dimanfaatkan bagi pembangunan tanpa menurunkan produksi pada sektor semula. Misalnya penggunaan tenaga kerja yang masih mengganggu tersembunyi di sektor pertanian dapat dimanfaatkan untuk pembangunan irigasi, jalan-jalan pedesaan dan sebagainya.

b. Sumber Dana Finansial

Secara finansial, sumber dana pembangunan ekonomi dapat dikelompokan sebagai berikut:

1) Tabungan Masyarakat (*Voluntary Saving*)

Tabungan masyarakat adalah bagian dari pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan untuk kebutuhan konsumsi. Hal ini dapat berupa tabungan, taska, tahapan, premi asuransi, dan deposito berjangka. Tabungan ini dikelola bank untuk dipinjamkan pada investor.

2) Pajak atau Tabungan paksa (*Forced Saving*)

Pemberlakuan pajak akan berdampak pada menurunnya konsumsi masyarakat karena berkurangnya pendapatan. Pemerintah memaksa unit-unit ekonomi yang lain seperti rumah tangga dan perusahaan untuk mengurangi pendapatan mereka dengan cara membayar pajak kepada pemerintah. Pengaruh pajak terhadap produksi tampak pada kemampuan dan kemauan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Dari segi distribusi pendapatan pajak dapat mempersempit perbedaan pendapatan, tetapi dapat juga memperlebar jurang perbedaan pendapatan. Pajak yang progresif artinya pajak yang semakin tinggi pendapatan masyarakat, semakin tinggi pula pajak yang dikenakan. Sebaliknya, pajak regresif adalah apabila pendapatan semakin tinggi maka semakin rendah persentase pajak yang dikenakan. Untuk pajak proposional, persentase pajak tetap walaupun tingkat pendapatannya tinggi.

3) Tabungan Pemerintah

Tabungan pemerintah diperoleh dari sisa penerimaan rutin yang dipakai untuk membiayai pengeluaran rutin. Atau lebih sederhananya, tabungan pemerintah adalah selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Semakin besar tabungan pemerintah, jelas semakin besarlah dana yang

tersedia untuk pembangunan.

4) Pinjaman Pemerintah

Pinjaman pemerintah dapat berupa pinjaman sukarela dan pinjaman paksaan yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Pinjaman sukarela merupakan pinjaman yang diterima oleh pemerintah secara sukarela dari pihak mana saja baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pinjaman paksa merupakan jenis pinjaman yang dapat dipaksakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Pinjaman dalam negeri merupakan jenis pinjaman yang dapat diperoleh dari penduduk negeri sendiri. Konsekuensinya adalah tidak ada tambahan dana secara makro karena tidak terjadi aliran dana masuk ke negeri kita. Pinjaman luar negeri merupakan jenis pinjaman yang diperoleh pemerintah dari individu ataupun dari pemerintah negara lain.

5) Inflasi (*Invisible tax*)

Inflasi merupakan suatu keadaan dimana harga-harga umum meningkat secara terus menerus. Pada umumnya inflasi disebabkan oleh adanya permintaan yang lebih besar daripada penawaran yang terjadi karena terlalu banyaknya uang yang beredar. Inflasi pada ukuran besar berpotensi menyebabkan struktur harga akan rusak, struktur upah juga akan rusak, investasi akan terhenti dan digantikan dengan usaha spekulasi serta ekspor menjadi tidak menguntungkan karena timbul disparitas harga.

6) Investasi Asing (*Foreign Direct Investment*)

Investasi asing dilakukan oleh pemilik modal asing atau dari dalam negeri. Investasi asing dapat berupa investasi langsung maupun investasi portofolio pembelian saham. Keuntungan yang diperoleh bagi kita adalah berupa diolahnya SDA, meningkatnya lapangan kerja, meningkatnya penerimaan negara dari sumber pajak, serta adanya ahli teknologi. Sedangkan keuntungan bagi pihak asing adalah berupa deviden.

3. Kriteria Penggunaan Kapital

Terdapat beberapa kriteria dalam penggunaan kapital untuk investasi dalam pembangunan. Beberapa kriteria tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Kriteria Neraca Pembayaran (Balance of Payments Criteria)

Menurut kriteria ini, penggunaan kapital hendaknya digunakan pada sektor-sektor yang dapat mengurangi kesulitan-kesulitan dari neraca pembayaran internasional diwaktu yang akan datang. Penggunaan kapital untuk investasi jangan sampai menyebabkan terjadinya kenaikan impor dan hendaknya digunakan pada sektor-sektor yang tidak membutuhkan barang-barang kapital dari luar negeri. Kapital hendaknya digunakan untuk menaikkan volume ekspor dengan cara memproduksi barang-barang substitusi impor maupun menaikkan produksi barang-barang untuk diekspor. Bichanan menyebutkan, apabila ada kenaikan impor akan disertai dengan kenaikan pendapatan sebagai akibat adanya investasi-investasi tersebut.

b. Kriteria Produktivitas Sosial Marginal (*Social Marginal Productivity Criteria*)

Kriteria kedua berarti bahwa investasi itu hendaknya digunakan pada proyek-proyek yang dapat diharapkan dapat memberikan hasil tertinggi atau digunakan pada proyek-proyek yang paling menguntungkan.

c. Kriteria Intensitas Faktor-faktor Produksi (*Faktor Intensity Criteria*)

Kapital hendaknya digunakan pada proyek yang dapat menghemat penggunaan kapital, karena kapital merupakan faktor yang langka di suatu negara. Dengan perkataan lain, kapital hendaknya digunakan pada proyek dengan intensitas kapital rendah atau kapital yang sedikit tetapi dapat menghasilkan output yang banyak.

d. Kriteria Bagian Investasi Kembali (*Reinvestment Quotient Criteria*)

Investasi harus digunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan investasi per kapita untuk masa yang akan datang makin bertambah. Kriteria ini mengusahakan supaya tingkat investasi semakin lama semakin bertambah besar sehingga dapat mengimbangi pertambahan penduduk. Dalam arti pertambahan kapital harus lebih besar dari pada tambahan penduduk, sehingga income per kapita dapat menjadi bertambah besar.

e. Kriteria Operasional (*Operational Criteria*)

Menurut kriteria ini, penggunaan kapital dalam suatu proyek ada 3 faktor yang perlu diperhatikan yaitu: tingkat perputaran kapital (*capital turnover*) dari

investasi itu, keuntungan sosial yang ada (*social profitability*), dan pengaruhnya terhadap neraca pembayaran nasional.

4. Teori Penggunaan Kapital

Terdapat dua teori dalam hubungannya dengan penggunaan kapital untuk keperluan investasi, yaitu:

a. Teori Usaha Perlahan-Lahan (*Gradualist*)

Menurut teori ini usaha yang dilakukan oleh negara terbelakang hendaknya dilakukan secara perlahan-lahan. Negara yang terbelakang sebaiknya jangan mengadakan industrialisasi secara cepat, sebab resiko kekeliruan-kekeliruan akan terlalu besar untuk dipikul oleh negara yang miskin. Teori ini cocok untuk dilakukan di negara sedang berkembang. Investasi ini hendaknya diusahakan untuk memajukan industri-industri kecil, pembangunan masyarakat desa dan lain-lain yang menggunakan kelebihan tenaga kerja. Penggunaan kapital yang banyak diusahakan untuk proyek yang dapat memberikan keuntungan lebih besar dari kegiatan yang sifatnya padat karya (*Labor Intensive*).

b. Teori Dorongan Besar (*Big Push*)

Menurut teori ini, suatu usaha harus dilaksanakan secara besar-besaran. Karena kalau suatu usaha untuk menaikkan pendapatan hanya dilakukan secara kecil-kecilan atau dengan menggunakan kapital yang sedikit hal ini justru hanya akan mendorong pertumbuhan penduduk. Pertambahan penduduk akan melebihi tambahan pendapatan. Oleh karena itu, agar tambahan pendapatan melebihi tambahan penduduk maka investasi harus dilakukan secara besar-besaran. Karena investasi yang dilakukan besar-besaran akan dapat memperoleh pendapatan yang besar sehingga dapat menghilangkan kemiskinan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan teknologi yang paling produktif, konsumsi harus ditekan, sehingga investasi dapat terus ada dan meningkat.

Kedua teori di atas, mengilhami munculnya dua model pembangunan yaitu pembangunan seimbang dan pembangunan tidak seimbang.

a. Pembangunan Seimbang

Strategi pembangunan seimbang merupakan pembangunan berbagai jenis industri secara bersama-sama (*simultaneous*), sehingga industri itu saling menciptakan pasar bagi yang lain. Strategi pembangunan seimbang

ini dapat diartikan juga sebagai keseimbangan pembangunan di berbagai sektor.

Teori pembangunan seimbang ini mengatakan bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus serentak dan harmonis di berbagai sektor ekonomi sehingga semua sektor tumbuh bersama. Misalnya antara sektor industri dengan sektor pertanian, antara sektor dalam negeri dengan sektor luar negeri, antara sektor perdagangan dengan sektor jasa harus berkembang secara bersama-sama.

Strategi pembangunan seimbang ini berasal dari argumen teori big push. Doktrin pembangunan seimbang menitikberatkan bahwa perekonomian itu ada kemungkinan untuk berkembang apabila ada perimbangan yang baik antara berbagai sektor dalam perekonomian. Dengan pertumbuhan seimbang (*balanced growth*) diartikan bahwa perkembangan ekonomi tidak akan berhasil apabila investasi hanya terbatas pada titik pertumbuhan (*growing point*) tertentu pada sektor-sektor yang berkembang saja, sebab sektor-sektor lain berhubungan erat. Investasi harus disebarakan ke semua sektor untuk memperluas pasar antara satu sektor dengan sektor yang lain. Sehingga, diperlukan adanya keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi penawaran memberikan titik berat/tekanan pada pembangunan serentak dari semua sektor yang saling berkaitan dan berfungsi meningkatkan penawaran barang. Ini meliputi pembangunan yang serentak dan harmonis dari barang setengah jadi, bahan baku, barang jadi, pertanian, serta semua industri yang memproduksi barang konsumsi.

Sebaliknya dari sisi permintaan, penyediaan kesempatan kerja supaya lebih besar dan pendapatan dinaikkan agar permintaan barang dan jasa dapat tumbuh. Sisi ini berkaitan dengan industri yang sifatnya saling melengkapi seperti industri barang konsumsi, khususnya produk pertanian dan manufaktur. Jika industri dibangun secara serentak maka jumlah tenaga kerja yang terserap akan sangat besar. Dengan cara ini akan tercipta permintaan barang-barang dari masing-masing industri satu sama lain, dan semua barang akan habis terjual.

Tujuan dilaksanakannya pembangunan seimbang adalah supaya proses pembangunan tidak menghadapi hambatan-hambatan dalam

memperoleh bahan baku, tenaga ahli, sumber daya energi (air dan listrik), dan fasilitas-fasilitas untuk mengangkut hasil-hasil produksi ke pasar. Selain itu juga memperoleh pasar untuk barang-barang yang telah dan yang akan diproduksi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan seimbang dapat didefinisikan sebagai suatu usaha pembangunan yang berupaya untuk mengatur program investasi sedemikian rupa sehingga sepanjang proses pembangunan terlaksana secara serentak dan harmonis serta tidak akan timbul hambatan-hambatan yang bersumber dari penawaran maupun permintaan.

Para ahli menyebut teori pembangunan seimbang ini sebagai teori usaha besar-besaran (*big push theory*). Apabila akan melakukan pembangunan seimbang, tingkat investasi harus dilakukan besarnya jauh melebihi tingkat investasi yang dilakukan pada sebelum usaha pembangunan seimbang dilakukan. Kebaikan dari strategi pembangunan seimbang adalah:

- 1) Saling membantu antar sektor.
- 2) Mengurangi kesulitan-kesulitan penawaran yang berpotensi menghambat perkembangan diantara masing-masing sektor.

Keburukan dari strategi ini adalah:

- 1) Menurut Profesor Hirschman, bahwa masyarakat yang masih rendah tingkat pendapatannya sulit sekali mengubah sistem perekonomian yang tradisional menjadi sistem yang bersifat modern.
- 2) Sistem ini tidak cocok untuk negara sedang berkembang, karena untuk melaksanakan pembangunan seimbang dibutuhkan kapital yang sangat besar, sedangkan di NSB kapital sangat sedikit jumlahnya.

b. Pembangunan Tidak Seimbang

Teori ini dikemukakan oleh Micschman dan Streecten, yaitu pembangunan tidak seimbang merupakan pola pembangunan yang lebih cocok untuk negara sedang berkembang, karena negara sedang berkembang menghadapi kekurangan sumber daya. Pembangunan tidak seimbang digunakan untuk menyatakan bahwa program pembangunan disusun sedemikian rupa sehingga dalam perekonomian tersebut akan timbul kelebihan dan kekurangan dalam berbagai sektor sehingga

menimbulkan distorsi-distorsi dan ketidakstabilan dalam perekonomian. Oleh karena itu, dengan melakukan pembangunan tidak seimbang pada suatu periode waktu tertentu dipusatkan pada beberapa sektor yang akan mendorong penanaman modal yang terpengaruh (*Induced Investment*) di berbagai sektor pada periode waktu berikutnya. Dengan demikian, sumber daya yang langka dapat digunakan secara efisien pada setiap tahap pembangunan.

Menurut Hirschman, pembangunan tidak seimbang didasarkan pertimbangan bahwa secara historis pembangunan ekonomi terjadi arahnya tidak seimbang. Selain itu, pembangunan tidak seimbang akan menimbulkan kemacetan (*bottlenecks*) atau gangguan-gangguan dalam proses pembangunan yang akan menjadi pendorong bagi pembangunan.

Kebaikan pembangunan tidak seimbang yaitu akan mendorong kemajuan ekonomi lebih cepat dengan biaya ekspansi dapat diminimumkan. Dengan adanya kesulitan-kesulitan (*bottleneck.s*) dan kelangkaan bersama-sama dengan perkembangan yang tidak seimbang, hal ini akan ada dorongan yang kuat untuk kemajuan teknologi dan dapat menarik wiraswasta-wiraswasta baru. Sedangkan keburukan pembangunan tidak seimbang dapat menyebabkan terjadinya gap antara sektor. Salah satu sektor dapat berkembang dengan pesat, sektor yang lain mengalami perkembangan yang lambat.

D. PERAN TEKNOLOGI DAN FUNGSI WIRUSAHA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

Dalam teori Rostow menyatakan bahwa peran wirausaha dalam pembangunan ekonomi termasuk dalam *take off* menjadi *self-sustained growth*. Peran penting wirausaha bagi pembangunan ekonomi adalah kontributor inovasi atau gagasan baru yang akan dihasilkan. Menjadi jelas kiranya bahwa meskipun suatu negara memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, namun jika tidak memiliki wirausaha yang mampu mengolah sumber daya alam tersebut maka pembangunan akan terhambat. Wirausaha memiliki peran yang besar dalam mewujudkan pembangunan ekonomi, untuk itulah wirausaha juga menjadi unsur penting pembangunan yang perlu anda pelajari.

1. Pengertian Teknologi dan Fungsi Wiraswasta

Teknologi merupakan suatu perubahan dalam fungsi produksi yang nampak dalam teknik produksi yang ada. Sedangkan perubahan teknologi (*technological change*) adalah perubahan fungsi produk dalam suatu kegiatan tertentu dimana dengan input tertentu dapat menambah output. Jadi dengan adanya perubahan teknologi berarti bahwa:

- a. Dengan menggunakan input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar.
- b. Dengan menggerakkan input yang lebih kecil dapat menghasilkan output yang sama.
- c. Dapat menghasilkan barang-barang baru yang mempunyai kegunaan yang lebih banyak.

Apabila dalam suatu perekonomian terjadi perkembangan ekonomi yang akibat adanya penerapan teknologi, maka harus ada segolongan orang yang menguasai kombinasi sumber-sumber produksi untuk kegiatan yang bersifat produktif, yang menyebabkan terjadinya perkembangan ekonomi. Dengan kata lain, harus ada orang yang membuat keputusan untuk mengganti cara-cara lama dengan cara-cara baru. Perbuatan tersebut menunjukkan suatu inovasi yang disebut dengan *entrepreneurial function* atau fungsi wiraswasta.

Dari uraian di atas, arti sempit fungsi wiraswasta terbatas pada inovasi. Sebagai suatu contoh adalah fungsi pengkombinasian faktor-faktor produksi baru. Sehingga apabila perubahan teknologi itu untuk kepentingan pembangunan ekonomi, maka tindakan-tindakan komplementer dengan sumber-sumber lainnya harus diperhatikan. Sebagai suatu contoh, menyediakan kapital dan koordinasi dengan faktor produksi yang lain seperti tenaga kerja dan sumber-sumber lain. Dalam arti luas, fungsi wiraswasta harus diartikan dalam segala keadaan seperti dalam masyarakat kapitalis, sosialis maupun dalam pembangunan ekonomi pada umumnya. Jadi fungsi semangat wiraswasta adalah tindakan-tindakan yang menghasilkan kombinasi-kombinasi baru dari faktor produksi dalam proses yang produktif.

2. Tipe-tipe Semangat Wiraswasta

Dilihat dari tindakan, ada beberapa tipe wiraswasta, yaitu:

- a. *Innovating entrepreneur*

Wiraswasta dalam kategori tipe ini adalah orang-orang yang bersifat agresif dalam suatu percobaan-percobaannya dan tertarik untuk mempraktikkan.

b. *Initiative entrepreneur*

Wiraswasta dalam kategori tipe ini adalah orang-orang yang siap untuk menggunakan inovasi-inovasi yang berhasil ditemukan oleh innovating entrepreneur.

c. *Fabian entrepreneur*

Wiraswasta dalam kategori tipe ini adalah orang-orang yang sifatnya penuh hati-hati dan ragu-ragu yang nantinya akan meniru apabila inovasi itu jelas menunjukkan sesuatu yang menguntungkan.

d. *Drone entrepreneur*

Wiraswasta dalam kategori tipe ini adalah orang-orang yang sifatnya menolak untuk menggunakan kesempatan dalam mengubah produksi meskipun dengan biaya yang relatif rendah dibandingkan dengan produsen-produsen lainnya.

3. Macam-macam Inovasi

Inovasi dapat dibagi menjadi *capital saving* (menghemat kapital) dan *labor saving* (menghemat tenaga kerja). Di samping itu inovasi dapat juga dilihat dari sudut permintaan dan biaya-biaya seperti menekan biaya produksi (cost reducing) atau meningkatkan permintaan (demand increasing).

Menurut Schumpeter inovasi dapat berupa:

a. Turunnya biaya

Yang termasuk dalam kategori inovasi ini adalah:

- 1) memperkenalkan metode baru
- 2) menggunakan sumber-sumber bahan mentah baru
- 3) pemakaian bentuk organisasi yang baik

b. Peningkatan kapital

Yang termasuk dalam kategori inovasi ini adalah:

- 1) memperkenalkan barang-barang baru dengan kualitas lebih baik
- 2) pembukaan pasar-pasar baru

4. Motif-motif Inovasi

Motif inovasi dipengaruhi oleh berbagai keadaan yang berbeda seperti

keadaan sosial politik dan ekonomi suatu bangsa. Untuk memberi gambaran tentang ragam dari motif inovasi akan diuraikan tiga macam motif inovasi yaitu:

a. Motif inovasi di negara yang menganut sistem kapitalis

- 1) Berorientasi laba (*profit oriented*).
- 2) Mempertahankan organisasi dan untuk dapat hidup berkembang di dalam persaingan.
- 3) Untuk mempertahankan kedudukannya sebagai manajer dan untuk menjaga gengsi.
- 4) Adanya tekanan dari masyarakat untuk mengadakan inovasi.

b. Motif inovasi di negara yang menganut sistem sosialis

Motif-motif inovasi di negara penganut sistem ekonomi sosialis berasal dari ideologi pemimpin. Jadi arah dari inovasi ini tergantung pada pemimpin-pemimpin negara. Motif inovasi di negara ini tidak ada yang berasal dari persaingan usaha.

c. Motif inovasi di negara sedang berkembang

Motif inovasi di negara sedang berkembang sangat bervariasi tergantung dari keadaan ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan di masing-masing negara.

5. Beberapa Hambatan dalam Menggunakan Penemuan Baru (Inovasi)

Beberapa faktor yang menghambat dalam menggunakan inovasi antara lain adalah:

a. Faktor ekonomi

Penemuan baru kemungkinan besar sulit untuk secara langsung diterima masyarakat. Akan tetapi, diperlukan suatu media tertentu untuk mendemonstrasikan hasil penemuan baru tersebut. Setelah didemonstrasikan diperlukan pendidikan/pelatihan bagi orang-orang atau golongan yang akan memakainya. Sebagai suatu contoh adanya penemuan baru di bidang pertanian (misalnya traktor dan alat perontok padi). Agar para petani mau menggunakan teknologi baru yang lebih efisien yang berupa traktor dan alat perontok padi, maka pada langkah awal perlu diadakan penyuluhan yang disertai dengan demonstrasi tentang kegunaan, keunggulan dan cara pemakaian alat tersebut. Setelah itu para petani perlu dilatih agar bisa menggunakannya. Untuk keperluan

tersebut diperlukan biaya. Dengan demikian, apabila tidak tersedia biaya akan menghambat penggunaan teknologi baru tersebut.

b. Faktor sosial budaya

Faktor sosial budaya merupakan hambatan inovasi terutama pada masyarakat yang masih primitif. Dalam masyarakat semacam ini, manusia belum berpikir untuk menggunakan peralatan yang serba canggih, mereka sulit untuk diubah cara berpikirnya. Dengan demikian, dengan adanya penemuan baru ini diperlukan waktu dan cara pendekatan yang tepat yang dapat menarik penduduk untuk menggunakannya. Lain halnya dengan masyarakat yang sudah maju, di mana sikap dan pola berpikirnya sudah modern. Dengan demikian, dengan adanya peralatan yang serba canggih dan praktis ini akan mudah untuk menerimanya.

c. Tekanan dari beberapa orang yang berkuasa

Hambatan lain dalam menghambat penemuan baru sangat tergantung pada beberapa orang yang berkuasa. Dalam arti, bahwa penggunaan penemuan baru ini tergantung pada kepentingan para penguasa. Apabila penemuan baru itu mendukung kepentingan para penguasa, maka penemuan baru tersebut akan mudah diterima oleh masyarakat yang berhak untuk menggunakannya. Demikian juga sebaliknya, apabila penemuan baru itu tidak mendukung kepentingan para penguasa, maka para penguasa akan memengaruhi masyarakat untuk menolaknya.

6. Peranan Teknologi Terhadap Pembangunan Ekonomi

Menurut Schumpeter, perkembangan ekonomi yang terus-menerus atau lambat tidak hanya dipengaruhi oleh tersedianya alat-alat atau sumber-sumber produksi dan tabungan yang ada. Tetapi sebenarnya, perkembangan ekonomi itu dipengaruhi oleh pengerjaan sumber-sumber yang tersedia dengan cara yang berbeda-beda. Dengan kata lain, lambat/meningkatnya perkembangan ekonomi itu di samping di pengaruhi sumber-sumber produksi dan tabungan yang tersedia, juga dipengaruhi oleh macam teknologi yang digunakan. Sebagai suatu contoh, dalam suatu masyarakat tersedia sumber-sumber produksi yang banyak tetapi kalau teknologi yang digunakan masih bersifat tradisional, maka outputnya akan sedikit, demikian juga sebaliknya. Dari uraian di atas, dapat disarikan bahwa pengaruh teknologi terhadap pembangunan ekonomi adalah

lewat pengerjaan faktor-faktor produksi yang lain. Pengaruh teknologi terhadap pembangunan ekonomi terlihat melalui perubahan-perubahan fungsi produksi.

Dalam bidang pertanian, masyarakat tradisional mengolah tanah dengan cara dibajak dengan menggunakan tenaga binatang, sekarang dengan majunya teknologi, kegiatan tersebut sudah dilakukan dengan tenaga mesin (traktor). Contoh selanjutnya, pada waktu dulu sebelum ada mesin obras, cara membuat pakaian agar kelihatan halus dengan cara disetik balik (dijahit dua kali dengan dibalik), sekarang dengan adanya teknologi modern (dengan mesin obras) dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan lebih baik. Ada tiga macam kemajuan teknologi yaitu:

a. Kemajuan teknologi yang bersifat netral

Kemajuan teknologi bersifat netral terjadi apabila produksi dengan input yang sama, output yang diperoleh lebih tinggi. Kemajuan teknologi seperti ini dapat diperoleh dengan cara diadakannya pembagian kerja (*division of labor*) yang baik. Dengan pembagian kerja yang baik, diharapkan dengan input yang sama akan menghasilkan output yang lebih tinggi.

b. Kemajuan teknologi yang bersifat hemat tenaga kerja (labor saving)

Kemajuan teknologi dikatakan hemat tenaga kerja kalau dengan tenaga kerja dan modal yang sama akan dicapai output yang lebih tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara penggunaan alat-alat mekanisasi seperti komputer, traktor, mesin perontok padi, mesin penggiling padi (*rice milling unit*) dan lain sebagainya.

c. Kemajuan teknologi yang bersifat hemat kapital

Kemajuan teknologi dikatakan hemat kapital kalau dengan input kapital yang sama dapat menghasilkan output yang lebih tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan metode produksi yang lebih efisien (biaya produksi rendah) yaitu metode produksi yang menggunakan tenaga kerja banyak atau padat tenaga kerja. Kemajuan teknologi yang seperti ini jarang sekali terjadi, karena hampir semua penelitian ilmiah tentang perkembangan teknologi yang dilakukan di negara maju adalah bertujuan untuk menghemat tenaga kerja, bukannya untuk menghemat modal. Akan tetapi untuk negara sedang berkembang, karena mempunyai banyak tenaga kerja, maka kemajuan teknologi yang bersifat hemat modal sangat dibutuhkan.

BAB V

Teori Pembangunan Ekonomi

Dalam sejarah pemikiran ekonomi, ahli-ahli ekonomi yang lahir antara abad delapan belas dan permulaan abad kedua puluh ini, lazim digolongkan sebagai aliran/kaum Klasik. Aliran/kaum klasik ini dibedakan ke dalam dua golongan, yaitu: aliran klasik dan neo klasik. Dari kedua golongan ahli-ahli ekonomi Klasik dan Neo-Klasik, sebagian besar menumpahkan perhatiannya pada analisis sifat-sifat kegiatan masyarakat dalam jangka pendek, hanya sedikit sekali yang menganalisis mengenai masalah pertumbuhan ekonomi. Kurangnya perhatian kedua golongan tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan terutama oleh pandangan mereka yang diwarisi dari pendapat Adam Smith, yang berkeyakinan bahwa mekanisme pasar akan menciptakan suatu perekonomian berfungsi secara efisien.

A. TEORI PERTUMBUHAN MENURUT ALIRAN KLASIK

Termasuk ke dalam aliran klasik adalah ahli-ahli ekonomi yang mengemukakan analisisnya sebelum tahun 1870. Ahli-ahli yang termasuk dalam golongan kaum/aliran Klasik adalah Adam Smith, David Ricardi, Thomas Robert Malthus dan John Sturt Mill.

1. ADAM SMITH (1723-1790)

Adam Smith merupakan ahli ekonomi yang pertama, yang mengemukakan teori tentang pertumbuhan ekonomi. Dalam mengemukakan teorinya tentang proses pertumbuhan ekonomi, pada tahun 1776 ditulis dalam bukunya yang berjudul "*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of nations*". Menurut Adam Smith, inti dari proses pertumbuhan ekonomi dibedakan menjadi dua

aspek, yaitu:

a. Pertumbuhan Output Total

Menurut Adam Smith, pertumbuhan output total dipengaruhi oleh tiga unsur pokok, yaitu sumber daya alam (atau faktor produksi tanah) yang tersedia, jumlah penduduk, dan stok barang modal yang ada. Menurut Adam Smith, sumber daya alam merupakan faktor yang paling pokok dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Banyaknya sumber daya alam yang tersedia merupakan merupakan faktor dominan terciptanya pertumbuhan ekonomi suatu perekonomian. Apabila sumber daya alam ini belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stock barang modal yang ada memegang peranan dalam pertumbuhan output. Tetapi pertumbuhan output tersebut akan berhenti, jika semua sumber daya alam tersebut telah digunakan secara penuh.

Dilihat dari jumlah penduduk, peranannya terhadap proses pertumbuhan output tidak begitu nampak/pasif. Peranan penduduk dalam pertumbuhan ekonomi tergantung sepenuhnya pada kebutuhan tenaga kerja dari suatu masyarakat. Selanjutnya dilihat dari stock modal, menurut Smith modal merupakan faktor produksi yang secara aktif menentukan tingkat output. Artinya jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stock modal. Pengaruh stock modal terhadap tingkat output total dapat secara langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung maksudnya, penambahan modal akan langsung meningkatkan output. Sedangkan pengaruh tidak langsung maksudnya adalah bahwa peningkatan produktivitas perkapita dimungkinkan disebabkan karena adanya spesialisasi atau pembagian kerja. Adanya spesialisasi dibutuhkan penambahan modal yang banyak. Dengan adanya spesialisasi orang akan bekerja sesuai dengan keahliannya, sehingga diharapkan keterampilan akan meningkat yang akhirnya produktivitas kerja meningkat, sehingga hasil produksi akan meningkat:

Disamping ketiga unsur pokok di atas, ada dua faktor penunjang yang memengaruhi terciptanya pertumbuhan output yaitu makin meluasnya pasar serta adanya tingkat keuntungan di atas tingkat keuntungan minimal.

Menurut Adam Smith, untuk berlangsungnya pembangunan ekonomi, pasar harus seluas mungkin. Agar dapat menampung hasil produksi. Pasar diharapkan tidak hanya pasar dalam negeri saja tetapi juga pasar luar negeri.

Oleh karena itu, potensi pasar harus diperluas. Menurut Adam Smith, potensi pasar akan dapat dicapai secara maksimal, apabila setiap masyarakat diberi kebebasan untuk melakukan pertukaran dan melakukan kegiatan ekonominya. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menurut Smith perlu dihapus adanya peraturan-peraturan, undang-undang yang menjadi penghambat kebebasan berusaha dan kegiatan ekonomi baik antara warga masyarakat di suatu negara maupun antar warga masyarakat antar negara. Dari sini kelihatan bahwa Adam Smith merupakan penganjur *Laissez-Faire* dan *Free Trade*. Menurut pandangan Adam Smith, kebijaksanaan *Laissez-Faire* atau mekanisme pasar akan memaksimalkan tingkat pembangunan ekonomi yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat. Faktor penunjang kedua keberhasilan pertumbuhan ekonomi adalah tingkat keuntungan yang memadai. Tingkat keuntungan erat hubungannya dengan luas pasar. Apabila pasar tumbuh lebih cepat dari pertumbuhan modal, maka tingkat keuntungan akan naik. Demikian juga sebaliknya apabila pasar tidak tumbuh secepat pertumbuhan modal, maka tingkat keuntungan akan segera merosot, dan akhirnya akan mengurangi motivasi para pemilik modal untuk melakukan akumulasi modal. Menurut Adam Smith, dalam jangka panjang tingkat keuntungan akan menurun dan pada akhirnya akan mencapai tingkat keuntungan minimal atau perekonomian tersebut akan berada pada posisi stasioner.

b. Pertumbuhan Penduduk

Menurut Adam Smith perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. Pertambahan penduduk akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan mempertinggi tingkat spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Sebagai akibat dari spesialisasi maka kegiatan ekonomi akan bertambah. Menurut Adam Smith, jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten. Tingkat upah subsisten adalah tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup. Jika tingkat upah di atas tingkat subsisten, maka orang-orang akan menikah pada usia muda, tingkat kematian menurun dan jumlah kelahiran meningkat. Sebaliknya jika tingkat upah yang berlaku lebih rendah dari tingkat upah subsisten, maka jumlah penduduk akan menurun.

Menurut Adam Smith, tingkat upah yang berlaku ditentukan oleh tarik-

menarik antara kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Tingkat upah akan meningkat apabila permintaan akan tenaga kerja tumbuh lebih cepat dari penawaran tenaga kerja. Begitu juga sebaliknya tingkat upah akan menurun apabila penawaran tenaga kerja tumbuh lebih cepat dari permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja ditentukan oleh stock modal dan tingkat output masyarakat. Oleh karena itu, laju pertumbuhan permintaan tenaga kerja ditentukan oleh laju pertumbuhan stock modal (akumulasi modal) dan laju pertumbuhan output.

Mengenai corak dan proses pembangunan ekonomi, Smith mengatakan bahwa apabila pembangunan sudah terjadi, maka proses tersebut akan terus berlangsung secara kumulatif. Artinya apabila pasar berkembang, pembagian kerja atau spesialisasi akan terjadi dan akibatnya akan menimbulkan kenaikan produktivitas dan kenaikan pendapatan nasional. Kenaikan pendapatan nasional disertai dengan perkembangan penduduk dari masa ke masa yang terjadi secara bersama-sama akan memperluas pasar dan menciptakan tabungan yang lebih banyak. Selanjutnya apabila ditambah lagi dengan semakin tingginya spesialisasi dan semakin berkurangnya pasar akan menciptakan perangsang yang lebih besar lagi kepada pengusaha untuk mengembangkan teknologi dan mengadakan inovasi (pembaharuan). Selanjutnya perkembangan ekonomi akan berlangsung terus, Dengan demikian, dari tahun ke tahun pendapatan perkapita akan terus bertambah.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Adam Smith telah banyak memberikan sumbangan yang besar dalam menunjukkan, bagaimana proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi terjadi serta beberapa faktor yang memengaruhinya. Namun menurut beberapa ahli ekonomi teori yang dikemukakan Adam Smith mengandung banyak kelemahan. Beberapa kritik terhadap teori Adam Smith akan dibahas pada uraian berikut.

Kritik Terhadap Teori Adam Smith

Beberapa kritik terhadap teori Adam Smith antara lain:

- 1) Asumsi adanya pembagian masyarakat secara tegas antara golongan kapitalis dan golongan buruh dalam kenyataan kurang sesuai. Dalam kenyataan, seringkali kelas menengah mempunyai peran yang sangat penting dalam masyarakat modern. Teori Smith mengabaikan peranan

- kelas menengah dalam mendorong pembangunan ekonomi.
- 2) Sumber tabungan terbesar adalah dari para kapitalis, tuan tanah dan lintah darat. Kenyataannya sumber utama tabungan di dalam masyarakat modern atau masyarakat maju adalah para penerima pendapatan.
 - 3) Asumsi utama Adam Smith adalah pasar persaingan sempurna. Kenyataan kebijakan pasar bebas dari persaingan sempurna tidak ditemukan di dalam perekonomian manapun.
 - 4) Adam Smith agak mengabaikan peranan entrepreneur dalam pembangunan. Padahal para entrepreneur ini mempunyai peran yang sentral dalam pembangunan. Mereka adalah yang menciptakan inovasi yang pada akhirnya menghasilkan akumulasi modal.
 - 5) Menurut Smith, hasil akhir suatu perekonomian kapitalis adalah stasioner. Ini berarti bahwa perubahan hanya terjadi di sekitar titik keseimbangan, padahal dalam proses pembangunan seringkali terjadi tidak teratur dan tidak beragam.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa asumsi yang dikemukakan Adam Smith kurang realistis. Oleh karena adanya beberapa kelemahan dari teori Adam Smith maka munculah ahli ekonomi yang kedua yaitu David Ricardo yang mengulas tentang proses pertumbuhan ekonomi. Untuk memahami teori pertumbuhan ekonomi dari David Ricardo Anda baca uraian berikut.

2. DAVID RICARDO (1772-1823)

Sebelum Anda mempelajari tentang aspek-aspek pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dari Ricardo, terlebih dahulu Anda pelajari ciri-ciri perekonomian menurut Ricardo. Ciri-ciri perekonomian menurut David Ricardo adalah:

- a. Jumlah tanah terbatas.
- b. Tenaga kerja (penduduk) meningkat atau menurun tergantung pada apakah tingkat upah di atas atau di bawah upah minimal.
- c. Akumulasi modal terjadi apabila tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik modal berada di atas tingkat keuntungan minimal yang diperlukan untuk menarik mereka melakukan investasi.

- d. Kemajuan teknologi terjadi sepanjang waktu.
- e. Sektor pertanian dominan.

Menurut Ricardo, pola proses pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut: pada permulaan proses pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk rendah dan kekayaan alam relatif cukup banyak, akibatnya para pengusaha memperoleh keuntungan yang tinggi. Oleh karena pembentukan modal tergantung pada keuntungan, maka laba yang tinggi akan menciptakan tingkat pembentukan modal yang tinggi pula. akibatnya akan terjadi kenaikan produksi dan pertambahan permintaan tenaga kerja. Karena jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan bertambah maka upah akan naik, dan kenaikan upah ini akan mendorong pada pertambahan penduduk. Oleh karena luas tanah tetap, maka makin lama tanah yang digunakan mutunya akan semakin rendah. Sebagai akibatnya hasil tambahan yang diciptakan oleh seseorang pekerja akan semakin kecil, apabila lebih banyak pekerja yang digunakan. Dengan demikian, terjadinya pertambahan penduduk yang terus menerus, sewa tanah makin lama akan merupakan bagian yang cukup besar dari seluruh pendapatan nasional dan akan mengurangi tingkat keuntungan yang diperoleh pengusaha. Dengan demikian, dorongan untuk mengadakan pembentukan modal menurun dan selanjutnya akan menurunkan permintaan atas tenaga kerja. Hal ini menyebabkan tingkat upah turun, dan pada akhirnya akan berada pada tingkat yang minimal sekali. Pada tingkat ini, perekonomian akan mencapai stationary state.

Namun demikian, adanya kenaikan produktivitas yang disebabkan oleh kemajuan teknologi dapat mempertinggi tingkat upah dan keuntungan. Oleh karena itu, proses pertumbuhan dapat berjalan terus. Tetapi hal ini tidak akan bertahan lama karena pertumbuhan penduduk, selanjutnya akan menurunkan kembali tingkat upah dan tingkat keuntungan.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa menurut Ricardo kemajuan teknologi tidak dapat menghalangi terjadinya stationary state. Kemajuan teknologi tersebut hanya mampu mengundurkan masa terjadinya keadaan tersebut. Keadaan stationary state dapat pula dihalangi terjadinya, apabila tuan tanah bersedia menggunakan sewa tanah yang diterimanya untuk pembentukan modal. Tetapi menurut Ricardo, tuan tanah merupakan golongan masyarakat yang sangat boros, dan akan membelanjakan uangnya untuk

pengeluaran yang bersifat kemewahan dan bukan untuk pembentukan modal yang produktif. Maka golongan tuan tanah tidak dapat diharapkan untuk menghalangi suatu perekonomian mencapai posisi stationary state. Apakah Anda paham yang dimaksud dengan stationary state? Jika belum Ada baca ciri-ciri masyarakat yang mencapai posisi stationary state berikut. Ciri-ciri masyarakat mencapai posisi tersebut adalah:

- 1) Tingkat output konstan.
- 2) Jumlah penduduk konstan.
- 3) Pendapatan perkapita juga konstan.
- 4) Tingkat upah pada tingkat upah alamiah (minimal).
- 5) Tingkat keuntungan pada tingkat yang minimal.
- 6) Akumulasi modal terhenti.
- 7) Tingkat sewa tanah maksimal.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa David Ricardo telah banyak menyumbangkan gagasannya seperti hanya Adam Smith. Namun menurut beberapa ahli teori tersebut masih mengandung kelemahan. Beberapa kritik terhadap teori David Ricardo dapat Anda baca pada uraian berikut.

Kritik Terhadap Teori David Ricardo

- 1) Menurut Schumpeter, teori Ricardo bukanlah teori pertumbuhan ekonomi, tetapi teori distribusi yang menentukan besarnya pangsa tenaga kerja, tuan tanah dan pemilik modal.
- 2) Pandangan Ricardo bahwa suatu negara akan mencapai keadaan stationer secara otomatis adalah tidak beralasan, karena tidak ada perekonomian yang mencapai keadaan stationer dengan laba yang meningkat, produksi yang meningkat dan akumulasi modal terjadi.
- 3) Ricardo kurang memerhatikan potensi kemajuan teknologi dalam menahan laju berlakunya “the law of deminishing returns” dari faktor produksi tanah. Menurut Ricardo, pada awalnya kemajuan teknologi dapat menahan laju berlakunya the law of deminishing returns, tetapi akhirnya pengaruh kemajuan teknologi tersebut habis dan perekonomian menuju ke arah stasioner. Kenyataan menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dapat menaikkan produksi pertanian yang sangat pesat di negara-negara

maju.

3. THOMAS ROBERT MALTHUS

Menurut Malthus, kenaikan jumlah penduduk yang terus menerus dibarengi dengan kemajuan faktor-faktor atau unsur-unsur perkembangan yang lain merupakan unsur yang perlu untuk adanya tambahan permintaan. Namun apabila kenaikan jumlah penduduk tidak dibarengi dengan kemajuan faktor-faktor perkembangan yang lain, sudah tentu tidak akan menaikkan permintaan dan pendapatan. Dengan demikian, tumbuhnya jumlah penduduk saja justru akan menurunkan tingkat upah dan memperendah biaya produksi. Turunnya biaya produksi akan memperbesar keuntungan-keuntungan kapitalis dan mendorong mereka untuk terus berproduksi. Tetapi keadaan ini hanya sementara sifatnya, sebab permintaan efektif (*effective demand*) akan semakin berkurang dikarenakan pendapatan buruh sendiri berkurang.

Menurut Malthus, terjadinya perkembangan ekonomi diperlukan kenaikan jumlah kapital untuk investasi yang terus menerus. Menurut Malthus, kapital dapat diperoleh karena penghasilan yang diterima oleh seseorang tidak semuanya dibelanjakan tetapi sebagian akan ditabung untuk pembentukan kapital.

Hal tersebut berlainan dengan pendapat J.B. Say yang terkenal dengan hukum pasarnya yang berbunyi "*Supplay creates its own demand*" yang artinya asal jumlah produksi bertambah maka secara otomatis permintaan akan ikut bertambah pula, karena pada hakikatnya kebutuhan manusia tidak terbatas. Pendapat Say ini dikritik oleh Malthus, dengan mengatakan bahwa Hukum Say hanya berlaku bila kenaikan pendapatan seluruhnya digunakan untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa ($C=Y$). Menurut Malthus, tabungan sangat perlu demi pembentukan modal setelah ada permintaan untuk investasi. Permintaan investasi akan ada bila terdapat kenaikan jumlah permintaan (*aggregate demand*). Jadi menurut Malthus, perkembangan ekonomi dapat terjadi apabila ada tabungan yang digunakan untuk keperluan investasi. Tetapi investasi ini dihambat oleh kurangnya permintaan efektif. Adapun kurangnya permintaan efektif disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk. Karena bertambahnya penduduk akan berakibat menekan tingkat upah. Oleh karena itu, Malthus merasa pesimis terhadap perkembangan ekonomi.

4. JOHN STUART MILL

John Stuart Mill adalah ahli ekonomi keempat dari kaum klasik yang menyumbangkan gagasannya terhadap proses pembangunan ekonomi. Pendapat Mill tentang proses pembangunan ekonomi tidak jauh berbeda dengan ahli ekonomi sebelumnya. Mill sependapat dengan Adam Smith yang menyatakan bahwa spesialisasi dalam pekerjaan akan meningkatkan keahlian para pekerja, memperbaiki organisasi produk dan mendorong dilakukannya inovasi sehingga akan mempertinggi produktivitas. Tingginya produktivitas akan meningkatkan pendapatan dan memperlancar pembangunan ekonomi. Mill juga mengatakan bahwa luasnya spesialisasi dibatasi oleh luasnya pasar. Pendapat Mill juga sama dengan pendapat David Ricardo, berlakunya pertambahannya penduduk secara terus menerus, sedangkan luas tanah terbatas menyebabkan berlakunya hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Selanjutnya Mill berpendapat bahwa apabila jumlah penduduk terus bertambah, pembangunan ekonomi akan mengalami kemunduran dan pada akhirnya akan mencapai stationary state. Sumbangan Mill terhadap proses pembangunan ekonomi yang belum dikemukakan oleh ahli sebelumnya adalah bahwa adanya faktor non ekonomi yang turut memengaruhi proses pembangunan ekonomi. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah kepercayaan masyarakat, kebiasaan berpikir, adat-istiadat dan corak institusi dalam masyarakat.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa teori pembangunan ekonomi menurut kaum Klasik dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:

- a. Perkembangan ekonomi dalam suatu masyarakat tergantung kepada empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah stock alat-alat modal, luas tanah dan tingkat teknologi yang dicapai.
- b. Pendapatan nasional suatu masyarakat terdiri atas tiga jenis, yaitu upah, keuntungan, dan sewa tanah.
- c. Kenaikan tingkat upah akan menyebabkan penambahan jumlah penduduk.
- d. Keuntungan merupakan faktor penentu besarnya pembentukan modal.
- e. Apabila tidak terdapat keuntungan maka pembentukan modal tidak akan

- terjadi dan perekonomian akan mencapai tingkat stationary state.
- f. Hukum hasil lebih yang makin berkurang berlaku untuk segala kegiatan ekonomi, sehingga mengakibatkan tanpa adanya kemajuan teknologi, pertambahan penduduk akan menurunkan tingkat upah, menurunkan tingkat keuntungan akan tetapi akan menaikkan tingkat sewa tanah.
 - g. Adanya faktor non ekonomi yang turut memengaruhi proses pembangunan ekonomi. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah kepercayaan masyarakat, kebiasaan berpikir, adat-istiadat dan corak institusi dalam masyarakat.

B. TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT ALIRAN NEO-KLASIK

Teori pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik berkembang setelah tahun 1870. Teori ini berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi Klasik. Ahli-ahli ekonomi yang termasuk sebagai kaum Neo-Klasik antara lain adalah Alfred Marshall, Leon Walras, Knut Wicksel, Robert Solow dan Trevor Swan.

Menurut aliran ini, pertumbuhan ekonomi dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi tergantung pada penyediaan faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, kemajuan teknologi dan akumulasi kapital), dimana akumulasi kapital merupakan faktor terpenting.
2. Tingkat bunga dan tingkat pendapatan menentukan tingginya tingkat tabungan. Pada suatu tingkat tertentu, tingkat bunga juga menentukan tingginya tingkat investasi. Pada tingkat bunga rendah maka investasi akan tinggi dan sebaliknya pada tingkat bunga tinggi maka investasi akan rendah.
3. Akumulasi kapital merupakan faktor penting untuk terjadinya perkembangan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi dapat diikhtisarkan sebagai berikut: adanya kemajuan teknologi menyebabkan investasi bertambah. Tambahan permintaan untuk investasi akan menyebabkan tingkat bunga naik yang selanjutnya akan menaikkan jumlah tabungan. Dengan adanya kenaikan investasi, harga-harga

barang kapital juga akan naik. Selanjutnya karena kenaikan tingkat bunga dan harga-harga barang kapital, maka investasi selanjutnya terbatas pada proyek-proyek yang dapat memberikan keuntungan terbesar. Apabila proyek-proyek tersebut telah terlaksana maka permintaan terhadap investasi berkurang, sehingga tingkat bunga dan harga barang-barang kapital turun kembali. Setelah itu proyek-proyek yang kurang menguntungkan menjadi menguntungkan kembali. Pada tingkat bunga yang rendah ini akan menyebabkan orang tidak menabung. Hal ini akan mengakibatkan akumulasi kapital rendah atau tidak ada sama sekali, akhirnya perekonomian mengalami keadaan yang statis (tidak ada perkembangan). Agar terjadi perkembangan, maka kondisi *full employment* harus selalu dijaga selama proses akumulasi kapital.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses yang berjalan secara perlahan-lahan tetapi berlangsung terus menerus. Berkenaan dengan hal ini tokoh aliran Neo-Klasik, Alfred Marshall menganggap bahwa perekonomian sebagai kehidupan organik yang tumbuh dan berkembang secara perlahan-lahan.

Pertumbuhan sebagai suatu proses yang harmonis dan kumulatif. Maksudnya adalah bahwa proses perkembangan itu meliputi berbagai faktor dimana faktor-faktor itu tumbuh secara bersama-sama. Menurut Marshall, harmonisnya perkembangan itu dipengaruhi oleh dua faktor yaitu *internal economics* dan *external economics*. Internal economics timbul karena adanya kenaikan skala produksi yang tergantung pada sumber-sumber dan efisiensi dari pengusaha sendiri, seperti adanya mesin-mesin baru, spesialisasi, pasar yang luas maupun manajemen yang baik. Sedangkan external economics tergantung pada perkembangan industri-industri pada umumnya yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan antar industri itu sendiri, seperti timbulnya industri-industri cabang yang saling membantu satu sama lain demi kelancaran produksi, fasilitas transpor yang lebih baik.

Menurut aliran Klasik, bahwa pertumbuhan ekonomi akan macet karena terbatasnya sumber-sumber alam. Sedang aliran Neo-Klasik berpendapat bahwa ada kemampuan manusia untuk mengalami terbatasnya pertumbuhan itu. Di samping itu, aliran Neo-Klasik juga beranggapan bahwa selalu akan ada kemajuan-kemajuan pengetahuan teknik secara gradual, continues, dan selalu ada perkembangan permintaan masyarakat. Selain itu, menurut aliran Neo-

Klasik, dengan adanya pasar yang luas (sampai ke luar negeri), produksi dapat dilaksanakan secara besar-besaran, spesialisasi bisa lebih mendalam, produktivitas naik sehingga penghasilan pun akan naik.

C. TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT SCHUMPETER

Teori Schumpeter ini pertama kali dikemukakan dalam bukunya yang berbahasa Jerman pada tahun 1911. Kemudian pada tahun 1934 diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan judul "*The Theory of Economic Development*". Pada tahun 1939, Schumpeter menggambarkan teorinya tentang proses pembangunan dan faktor utama yang memengaruhinya dalam bukunya yang berjudul *Business Cycle*.

Menurut Schumpeter, perkembangan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis ataupun gradual, melainkan merupakan perubahan yang spontan dan terputus-putus (*discontinues*), Perubahan yang spontan dan terputus-putus dalam saluran pandangan dan gangguan-gangguan dalam keseimbangan itu nampak dalam permintaan konsumen akan barang-barang akhir. Selanjutnya menurut Schumpeter, perkembangan-perkembangan selanjutnya itu tidak bersifat gradual, tetapi mengandung ketidakpastian dan resiko yang besar, sehingga tidak dapat diperhitungkan terlebih dahulu dan ini menyebabkan timbulnya keragu-raguan dalam mengembangkan usaha lebih lanjut. Menurut Schumpeter, faktor terpenting untuk perkembangan ekonomi adalah wiraswasta (*entrepreneur*). Karena mereka adalah orang-orang yang mengambil inisiatif untuk berkembangnya produksi nasional.

Schumpeter berkeyakinan bahwa sistem kapitalis merupakan sistem yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Namun demikian, Schumpeter berpendapat bahwa dalam jangka panjang sistem kapitalisme akan mengalami kemandegan (*stagnasi*). Schumpeter pesimis terhadap perkembangan ekonomi. Seperti telah diuraikan di atas, bahwa dalam jangka panjang sistem kapitalis akan runtuh (mengalami kemandegan), karena adanya transportasi gradual di dalam sistem tersebut menuju ke arah sistem yang lebih bersifat sosialis.

D. TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT ALIRAN POST-KEYNESIAN

Ahli-ahli Post-Keynesian adalah mereka yang mencoba mengembangkan teori pertumbuhan Keynes. Ahli-ahli tersebut adalah Evsey Domar dan R.F. Harrod. Domar mengemukakan teorinya tersebut untuk pertama kalinya pada tahun 1947 dalam "*American Economic Review*", sedangkan Harrod telah mengemukakan teorinya dalam "*Economic Journal*" pada tahun 1939. Pada hakikatnya teori tersebut dikembangkan oleh dua ahli ekonomi secara sendiri-sendiri, namun karena inti dari teori tersebut adalah sama, maka sekarang dikenal sebagai teori Harrod-Domar.

Teori Harrod-Domar merupakan perluasan dari analisis Keynes mengenai kegiatan ekonomi nasional dan masalah penggunaan tenaga kerja. Analisis Keynes dianggap kurang lengkap karena menyinggung persoalan mengatasi masalah-masalah ekonomi dalam jangka panjang. Analisis yang disebut Harrod-Domar adalah bertujuan untuk mengatasi kelemahan teori yang dikemukakan oleh Keynes. Teori Harrod-Domar pada hakikatnya menganalisis mengenai persoalan-persoalan tentang: Syarat-syarat apakah atau keadaan yang bagaimanakah yang harus tercipta dalam perekonomian untuk menjamin agar dari masa ke masa kesanggupan memproduksi yang selalu bertambah, sebagai akibat dari penanaman modal akan selalu sepenuhnya digunakan? Teori Harrod-Domar pada hakikatnya berusaha untuk menunjukkan syarat yang diperlukan agar pertumbuhan yang mantap atau steady growth. Yang dimaksud dengan steady growth adalah pertumbuhan yang akan selalu menciptakan penggunaan sepenuhnya alat-alat modal. Dalam teori Harrod-Domar, pembentukan modal dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan sesuatu perekonomian untuk menghasilkan barang-barang maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah pengeluaran efektif seluruh masyarakat. Teori ini menunjukkan suatu kenyataan yang diabaikan oleh teori-teori Keynes, yaitu apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kesanggupan yang lebih besar untuk menghasilkan barang-barang. Teori Harrod-Domar beranggapan pula bahwa penambahan dalam kesanggupan berproduksi ini tidak secara sendirinya akan menciptakan

pertambahan produksi dan kenaikan pendapatan nasional. Dengan demikian, walaupun kapasitas memproduksi bertambah, pendapatan nasional baru akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi akan tercipta, apabila pengeluaran masyarakat mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan masa sebelumnya.

Dalam analisisnya, Teori Harrod-Domar menggunakan beberapa asumsi, antara lain adalah:

1. Pada taraf permulaan, perekonomian telah mencapai tingkat kesempatan kerja penuh.
2. Perekonomian terdiri atas dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan.
3. Kecenderungan menabung batas besarnya tetap.
4. Perbandingan antara modal dengan jumlah produksi (rasio modal produksi/capital output ratio) dan perbandingan antara tambahan modal dengan jumlah tambahan produksi (rasio penambahan modal produksi/incremental capital output ratio) besarnya tidak berubah.

Sebagai ikhtisar dari analisis Harrod-Domar, menurut Irawan dan Suparmoko (1989), dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Investasi merupakan pusat dari persoalan pertumbuhan yang mantap, sebab proses investasi mempunyai dua sifat yaitu menciptakan pendapatan dan menaikkan kapasitas produksi nasional.
- b. Naiknya kapasitas produksi dapat menghasilkan output yang lebih banyak atau pengangguran yang lebih banyak tergantung pada sifat pendapatannya.
- c. Laju pertumbuhan yang seimbang tergantung pada besarnya angka pengganda (*multiplier*) dan tingkat produktivitas investasi yang baru.
- d. Bila laju pertumbuhan yang sebenarnya lebih besar dari laju pertumbuhan yang mantap, maka akan cenderung terjadi inflasi begitu juga sebaliknya akan terjadi deflasi.
- e. Gelombang konjungtur dipandang sebagai penyimpangan dari jalannya perkembangan yang mantap.

BAB VI

Tahap-tahap Pembangunan Ekonomi

Fokus utama sebuah negara dalam melaksanakan pembangunan adalah peningkatan kemampuan ekonomi warga negaranya. Teori tentang tahap-tahap pembangunan ekonomi dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu Frederich List, Bruno Hilderbrand, Karl Bucher dan W.W Rostow. Untuk dapat memahami dari masing-masing ahli Anda pelajari uraian berikut.

A. Fredrich List

Sebagai penganut paham *Laissez faire*, Fredrich List berpendapat bahwa paham *Laissez faire* dapat menjamin alokasi sumber-sumber secara optimal, meskipun proteksi bagi industri-industri yang masih lemah tetap dibutuhkan. Fredrich List berpendapat bahwa perkembangan ekonomi suatu negara itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah:

1. Peranan pemerintah
2. Organisasi-organisasi swasta
3. Lingkungan kebudayaan masyarakat

Menurut List, perkembangan ekonomi hanya akan terjadi apabila dalam masyarakat terdapat kebebasan dalam organisasi politik dan kebebasan perseorangan. Ia menyusun tahap-tahap perkembangan ekonomi dimulai dari:

1. Fase primitif biadab
2. Fase pertanian
3. Fase pertanian dan pabrik
4. Pabrik dan perdagangan

Selain itu, menurut List perkembangan industri hanya cocok untuk negara

yang berhawa sedang. Hal ini dikarenakan, negara tersebut memiliki kepadatan penduduk yang sedang akan tetapi memiliki pasar yang cukup luas. Kegiatan di sektor pertanian sudah efisien, sehingga sebagian penduduk dapat dipindahkan ke sektor industri. Dengan demikian, standar hidup penduduk sektor pertanian menjadi tinggi dan siap untuk menampung hasil sektor industri. Menurut List, apabila suatu bangsa memiliki berbagai sumber alam, maka lebih baik bangsa tersebut mengeksploitasi bahan-bahan mineral. Perkembangan sektor industri adalah untuk perkembangan ekonomi, meskipun pada awalnya diperlukan proteksi yang cukup tinggi.

Sedangkan pertanian, paling cocok dikembangkan di negara beriklim tropis. Hal ini mengingat bahwa jumlah penduduk di negara tropis relatif lebih besar. Selain itu, pengembangan sektor pertanian yang belum efisien menjadikan negara ini tidak cocok untuk pengembangan sektor industri.

B. Bruno Hilderbrand

Bruno Hilderbrand ini mengkritik pendapat dari Fredrich List. Ia lebih condong pada pengalaman-pengalaman yang terdapat di Inggris. Ia mengatakan bahwa perkembangan ekonomi itu bukan terjadi karena sifat-sifat produksi atau konsumsi seperti yang disampaikan oleh Fredrich List, melainkan lebih ditekankan pada metode distribusi yang digunakan. Oleh karena itu, Bruno Hilderbrand mengemukakan bahwa tahap-tahap pembangunan/perkembangan ekonomi itu menjadi 3 tahap yaitu:

- a. Perekonomian barter atau perekonomian natural
- b. Perekonomian uang
- c. Perekonomian kredit

Akan tetapi, Bruno Hildebrand tidak menjelaskan bagaimana tahap-tahapan tersebut berkembang menuju tahap selanjutnya.

C. Karl Bucher

Karl Bucher ini mencoba mensintesis pendapat List dan Hilderbrand. Menurut Karl Bucher, perkembangan ekonomi melalui tiga tingkat atau tahap yaitu:

- a. Produksi untuk kebutuhan sendiri.
- b. Perekonomian kota, yaitu terjadinya pertukaran yang semakin meluas.
- c. Perekonomian nasional, dimana peranan pedagang-pedagang menjadi

semakin penting. Menurut tahap ketiga ini, bahwa barang-barang itu diproduksi untuk pasar bukan untuk kepentingan sendiri.

Tahapan yang dikemukakan Karl Bucher diatas merupakan gambaran evolusi yang terjadi di negara Jerman.

D. W.W. Rostow

Salah satu teori tentang tahap-tahap perkembangan ekonomi yang paling banyak mendapat perhatian dan komentar adalah teori tentang tahap-tahap perkembangan ekonomi yang dicetuskan oleh W.W. Rostow. Teori ini pada mulanya dikemukakan sebagai suatu artikel dalam "*Economic Journal*" dan kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam bukunya yang berjudul "*The stages of economic growth*".

Menurut Rostow, proses perkembangan/pembangunan ekonomi dapat dibedakan dalam lima tahap dan setiap negara dapat digolongkan ke dalam salah satu tahap dari kelima tahap perkembangan ekonomi tersebut. Kelima tahap perkembangan ekonomi yang dikemukakan oleh Rostow adalah:

1. Masyarakat tradisional (*the traditional society*).
2. Masyarakat prasyarat untuk lepas landas (*precondition for take-off*).
3. Masyarakat lepas landas (*take-off*).
4. Masyarakat menuju kedewasaan/kematangan (*the drive to maturity*).
5. Masyarakat konsumsi yang berlebihan (*high mass consumption*).

Untuk melengkapi teorinya tentang tahap-tahap perkembangan ekonomi, Rostow telah menerbitkan pula suatu buku yang berjudul "*Politics and the Stage of Economic Growth*". Analisis yang dikemukakan oleh Rostow tentang perkembangan ekonomi, berbeda dengan analisis yang dikemukakan oleh Kuznets dan Chenery tentang perubahan struktur ekonomi dalam proses pembangunan. Teori Rostow tentang tahap-tahap perkembangan ekonomi ini lebih luas. Tetapi analisisnya lebih bersifat umum dibandingkan dengan ketiga analisis yang telah dibahas di atas, dimana teorinya tidak secara rinci menganalisis corak perubahan yang terjadi pada suatu sektor dalam proses pembangunan.

Pembahasan meliputi uraian mengenai pokok-pokok teori Rostow dan berbagai kritik yang dikemukakan terhadap teori Rostow. Seperti telah diuraikan di atas, tahap-tahap pembangunan ekonomi menurut Rostow adalah:

a. Masyarakat Tradisional

Yang dimaksud dengan masyarakat tradisional adalah suatu masyarakat yang strukturnya berkembang di dalam fungsi produksi yang terbatas, yang didasarkan kepada teknologi, ilmu pengetahuan dan sikap masyarakat seperti sebelum masa Newton. Yang dimaksud dengan masa Newton menurut Rostow adalah suatu masyarakat yang masih menggunakan cara-cara memproduksi yang relatif primitif dan cara hidup masyarakat yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dicetuskan oleh pemikiran yang bukan rasional tetapi oleh kebiasaan yang telah berlaku secara turun temurun.

Menurut Rostow, ciri-ciri masyarakat tradisional adalah sebagai berikut:

- 1) Tingkat produksi perkapita dan tingkat produktivitas perpekerja masih sangat terbatas, oleh sebab itu sebagian besar dari sumber-sumber daya masyarakat digunakan untuk kegiatan dalam sektor pertanian.
- 2) Struktur sosialnya sangat bersifat hierarkis. Maksudnya adalah bahwa anggota masyarakat mempunyai kemungkinan yang sangat kecil sekali untuk mengadakan mobilitas secara vertikal dalam struktur sosial. Maksudnya, bahwa kedudukan seseorang dalam masyarakat tidak akan berbeda dengan kedudukan ayahnya, kakeknya dan nenek moyangnya. Sebagai suatu contoh adalah, kenyataan menunjukkan bahwa sangat kecil sekali kemungkinannya seorang anak petani akan menjadi tuan tanah atau kelas masyarakat lain yang lebih tinggi.
- 3) Hubungan keluarga dan kesukuan sangat besar sekali pengaruhnya terhadap organisasi yang terdapat dalam masyarakat dan dalam menentukan kedudukan seseorang dalam masyarakat.
- 4) Kegiatan publik dan pemerintah, Rostow menggambarkan bahwa, walaupun kadang-kadang terdapat sentralisasi dalam pemerintahan, namun pusat dari kekuasaan politik terdapat di daerah-daerah dan pada umumnya di tangan tuan-tuan tanah. Kebijakan dari pemerintah pusat selalu dipengaruhi oleh pandangan tuan-tuan tanah di berbagai daerah.

b. Masyarakat Prasyarat untuk Lepas Landas

Seperti telah diuraikan di atas, Rostow mengartikan pembangunan ekonomi suatu proses yang menyebabkan perubahan dari ciri-ciri penting

dalam suatu masyarakat yaitu perubahan dalam sistem politiknya, struktur sosialnya, nilai-nilai masyarakatnya dan struktur kegiatan ekonominya. Apabila perubahan-perubahan seperti di atas itu sudah terjadi dalam masyarakat sehingga menyebabkan pertumbuhan yang lebih selalu berlaku, berarti proses pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan sudah mulai berlaku. Suatu masyarakat yang mencapai taraf proses pertumbuhan yang demikian sifatnya (pertumbuhan ekonomi sudah sering terjadi), kondisi masyarakat tersebut sudah boleh dianggap berada pada tahap prasyarat untuk lepas landas.

Rostow mendefinisikan masyarakat prasyarat lepas landas sebagai suatu masa transisi dimana suatu masyarakat mempersiapkan dirinya, atau dipersiapkan dari luar, untuk mencapai pertumbuhan yang mempunyai kekuatan untuk terus berkembang (*self-sustained growth*). Menurut Rostow, mulai tahap yang kedua ini dan seterusnya pertumbuhan ekonomi akan berlaku secara otomatis.

Corak dari tahap prasyarat untuk lepas landas menurut Rostow dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Tahap prasyarat untuk lepas landas yang dicapai oleh negara-negara Eropa, Asia, Timur Tengah dan Afrika, yang dilakukan dengan merombak masyarakat tradisional yang sudah lama ada.
- 2) Tahap yang dicapai oleh negara-negara yang dinamakan oleh Rostow sebagai *born free*, seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru, yang dapat mencapai tahap prasyarat untuk lepas landas tanpa harus merombak sistem masyarakat yang tradisional, karena masyarakat negara-negara tersebut terdiri atas imigran yang telah mempunyai sifat-sifat yang diperlukan oleh suatu masyarakat untuk mencapai tahap prasyarat untuk lepas landas.

Fase/tahap prasyarat lepas landas (*precondition for take-off*) adalah merupakan fase yang diperlukan agar perkembangan ekonomi dapat lepas landas (*take-off*). Syarat-syarat untuk lepas landas pada mulanya berkembang di Eropa Barat oleh adanya dua keadaan yang saling memengaruhi yaitu:

- 1) Pertumbuhan perlahan-lahan (evolusi) dalam ilmu pengetahuan modern.
- 2) Inovasi-inovasi, bersama-sama dengan penemuan daerah-daerah baru dan adanya kehendak untuk menciptakan teknologi baru dalam sektor-

sektor yang cukup penting.

Dalam masyarakat fase prasyarat lepas landas ini dibutuhkan adanya perubahan yang radikal dalam sektor industri yaitu:

- 1) Membangun fasilitas prasarana umum (*social overhead capital*) terutama di bidang transpor. Hal ini dimaksudkan di samping untuk perluasan pasar atau sumber-sumber yang ada kemudian dieksploitir, juga dimaksudkan agar pemerintah setempat dapat mengatur secara efektif.
- 2) Revolusi teknik di bidang pertanian. Kenaikan produksi harus ditingkatkan dengan teknik baru, karena banyaknya orang-orang yang pindah ke kota-kota (*urbanisasi*).
- 3) Perluasan impor yang dibiayai oleh produksi sumber-sumber alam yang ada. Impor ini meliputi juga impor kapital. Karena dengan adanya kapital dari luar negeri untuk menambah alat-alat dan bahan-bahan mentah yang tidak terdapat di negara sendiri untuk keperluan industri. Di samping itu kapital tersebut juga untuk menjaga tingkat pendapatan riil selama fasilitas prasarana umum masih dibentuk.

Dengan adanya pembangunan tiga sektor tersebut, diharapkan industri akan berkembang. Perkembangan ini terjadi apabila masyarakat tradisional tersebut terutama yang hidup di bidang pertanian mau menerima dan menggunakan teknologi baru. Di samping itu pemerintah harus mampu mendorong masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang bersifat modern, serta mampu mengadakan fasilitas prasarana umum untuk berhasilnya politik perdagangan dan industri. Jadi pemerintah harus aktif, kalau tidak masa lepas landas akan tertunda. Dengan kata lain dapat diungkapkan, apabila pemerintah belum menaruh perhatian pada ketiga sektor perkembangan tersebut yaitu fasilitas prasarana umum, pertanian dan perdagangan maka fase lepas landas akan tertunda.

c. Tahap Lepas Landas

Dalam tahap lepas landas pertumbuhan merupakan peristiwa yang selalu berlaku. Permulaan dari masa lepas landas adalah berupa berlakunya perubahan yang sangat drastis dalam masyarakat. Seperti revolusi politik, tercapainya kemajuan yang pesat dalam inovasi atau berupa terbukanya pasaran-pasaran baru yang penting akibat dari perubahan-perubahan secara teratur akan tercipta

pembaharuan dan pananaman modal. Penanaman modal yang makin bertambah tinggi tingkatnya ini mengakibatkan tingkat pertumbuhan pendapatan nasional menjadi bertambah laju dan akan melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan demikian, tingkat pendapatan perkapita makin lama akan menjadi makin bertambah besar.

Perbedaan antara tahap lepas landas dari tahapan sebelumnya adalah dalam tahap ini mulai menerapkan teknik baru dalam industri yang dapat berjalan dengan sendirinya. Pada tahap ini juga terdapat dorongan wiraswasta serta sumber kapital yang semakin meluas.

Dalam ranah non-ekonomi, lepas landas biasanya ditunjukkan dengan kemenangan-kemenangan sosial, politik dan budaya dari masyarakat yang menghendaki adanya modernisasi. Hal inilah yang selanjutnya mendorong masyarakat untuk memusatkan perhatian pada usaha di sektor modern selain sektor modern yang telah dimodernkan pada masa tersebut.

d. Tahap/Menuju Kematangan (*the drive to maturity*)

Tahap perkembangan ekonomi yang keempat menurut Rostow adalah menuju kematangan (*the drive to maturity*). Ada beberapa cara untuk mendefinisikan *the drive maturity*. Dalam hal ini yang dimaksud dengan *the drive maturity* adalah *economic maturity* (kematangan ekonomi). Kematangan ekonomi (*economic maturity*) disefinisikan oleh Rostow sebagai suatu periode ketika masyarakat secara efektif menerapkan teknologi modern terhadap sumber-sumber ekonomi. Dalam fase ini proses industri dibedakan dengan sektor-sektor baru yang penting, yang membantu sektor-sektor yang memimpin (*leading sektor*) selama dalam lepas landas, dimana sektor-sektor ini sudah mulai berkurang tingkat perkembangannya.

Pada tahap lepas landas usaha-usaha yang penting adalah batu bara, besi-besi dan mesin berat. Setelah itu usaha kegiatan yang penting adalah industri baja, kapal, obat-obatan, listrik dan lain-lain kegiatan yang menggunakan mesin-mesin modern. Pada tahap menuju kematangan, usaha-usaha atau sektor-sektor penting yang memimpin ditentukan oleh banyaknya teknologi dan kualitas persediaan sumber-sumber ekonomi. Pada fase yang keempat ini pendapatan perkapita bertambah, namun bertambahnya pendapatan perkapita tidak ada hubungannya dengan kematangan teknologi. Bertambahnya

pendapatan perkapita dipengaruhi oleh keseimbangan antara penduduk, sumber-sumber dan kebijakan-kebijakan dalam pembagian pendapatan. Jadi dapat dikatakan bahwa masyarakat yang telah matang dengan teknologi dapat berarti dua yaitu mungkin kaya dan mungkin juga miskin. Menurut sejarah, pendapatan negara-negara yang sudah dewasa (yang mencapai fase keempat) adalah berbeda-beda. Berarti suatu negara sudah “dewasa” ada kemungkinan tingkat pendapatan perkapita penduduknya rendah, begitu juga sebaliknya ada yang pendapatannya tinggi.

Pada masyarakat yang sudah berkembang kematangan teknologi (*technological maturity*) memiliki ciri sebagai berikut:

- 1) Struktur dan kualitas tenaga kerjanya berubah, terutama mengenai perbandingan antara yang bekerja di sektor pertanian dan nonpertanian.
- 2) Cara bekerja juga berubah yaitu dari cara kasar ke cara tidak kasar (*skilled and white collar workers*).
- 3) Sifat kepemimpinan dalam industri akan berubah

Apabila suatu masyarakat berkembang pada tahap kematangan teknologi, maka struktur serta kualitas tenaga kerja akan berubah terutama pada perbandingan pekerja sektor pertanian dan non-pertanian serta perbandingan pekerja kasar dan pekerja tidak kasar.

Pada tahap lepas landas, industri-industri itu biasanya dipimpin oleh orang-orang yang mempunyai daya kreasi yang selalu berusaha untuk mengembangkan sektornya masing-masing. Pada tahap menuju kematangan orang-orang tersebut lebih bersemangat untuk berkembang dan berkuasa. Pada fase atau tahap ini, manajer-manajer profesional mempunyai kedudukan yang semakin penting.

Dalam tahap ini akan ada masa dimana perluasan sektor industrialisasi bukan menjadi tujuan pokok lagi. Hal ini disebabkan berlakunya hukum guna batas yang semakin berkurang. Pada pertengahan abad-19 terjadi persoalan yaitu bagaimana mesin-mesin industri modern akan digunakan. Masalah ini pertama muncul di Eropa Barat lalu USA, Jepang dan Rusia. Sifat-sifat pada tahap ini adalah adanya teknik modern dan investasi tetap diatas 10%.

e. Tahap Konsumsi yang Berlebih (*the high consumption*)

Untuk dapat mencapai fase yang kelima (*the high consumption*), ada tiga cara

yang dapat ditempuh, yaitu:

- 1) Menyediakan/manawarkan (sesuai ukuran masyarakat setempat) jaminan yang lebih baik, kemakmuran dan leisure kepada angkatan kerja.
- 2) Menyediakan “konsumsi swasta” yang lebih banyak, termasuk rumah keluarga secara terpisah (single family homes), barang-barang konsumsi tahan lama dan jasa-jasa massal.
- 3) Mencari perluasan kekuatan bagi negara yang bersangkutan di mata dunia.

Tahap konsumsi yang berlebih/tinggi, didefinisikan sebagai suatu masyarakat dimana perhatian masyarakat telah lebih menekankan kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat, dan bukan lagi kepada masalah produksi. Amerika Serikat telah memilih alternatif kedua, Jerman memilih alternatif ketiga, sedangkan Eropa Barat dan Inggris memilih alternatif pertama. Hal ini sebagai upaya untuk mempertahankan pengaruh sosialisme di Eropa.

Di samping kelima tahap-tahap perkembangan ekonomi yang dikemukakan oleh Rostow, ada lagi yang disebut dengan lanjutan konsumsi yang berlebih. Pada waktu Eropa Barat dan Jepang memasuki zaman high mass consumption, maka timbul unsur-unsur baru dalam sistem perekonomian dunia. Unsur tersebut adalah adanya kecenderungan kenaikan tingkat kelahiran di negara-negara kaya. Misalnya Amerika Serikat selama Perang Dunia II, angka kelahiran adalah antara 15 - 22 per 1.000 penduduk, dan sesudah perang naik menjadi 25 per 1.000 penduduk.

BAB VII

Tipe-tipe Pembangunan Ekonomi

Cakupan materi yang akan dibahas dalam bab ini meliputi 4 tipe pembangunan ekonomi yaitu spontan, didorong, dipaksakan dan ekonomi negara sedang berkembang. Berikut ini akan diuraikan satu persatu dari beberapa tipe-tipe pembangunan ekonomi.

Tipe pembangunan ekonomi ada empat jenis yaitu :

1. Tipe pembangunan ekonomi spontan
2. Tipe pembangunan ekonomi didorong
3. Tipe pembangunan ekonomi dipaksakan
4. Tipe pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang

Berikut ini penjelasan lebih jauh mengenai masing-masing tipe pembangunan ekonomi di atas:

A. PEMBANGUNAN EKONOMI SPONTAN (*SPONTANEOUS DEVELOPMENT*)

Pembangunan ekonomi spontan merupakan pembangunan ekonomi yang umumnya terjadi secara lambat dan segala proses yang terjadi di dalamnya berjalan tanpa campur tangan dari pemerintah. Proses pembangunannya diawali dengan klas feodal yang membentuk diri menjadi klas wiraswasta secara perlahan, dimana klas wiraswasta ini menginvestasikan kembali keuntungan yang dimilikinya. Keadaan demikian akan mengakibatkan akumulasi dan perkembangan yang pesat dalam produksi, produktivitas, perdagangan luar negeri, dan pendapatan nasional suatu negara. Sehingga dapat dikatakan proses

pembangunannya terjadi secara bottom-up.

Pembangunan ekonomi tipe spontan memiliki beberapa ciri, antara lain sebagai berikut:

- a. Berjalan lebih lambat
- b. Proses pembangunannya berjalan tanpa campur tangan dari pemerintah
- c. Sumber perkembangan berasal dari klas wiraswasta
- d. Terjadi di negara dengan sistem perekonomian kapitalis
- e. Akumulasi modal secara perlahan

Negara penganut tipe pembangunan ekonomi spontan adalah negara – negara bekas blok barat. Yaitu negara yang kemudian lebih dikenal sebagai negara-negara kapitalis, seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Belanda.

B. PEMBANGUNAN EKONOMI YANG DIDORONG (INDUCEMENT DEVELOPMENT)

Pembangunan ekonomi yang didorong merupakan suatu bentuk tipe pembangunan ekonomi yang berada di antara tipe pembangunan ekonomi spontan dan tipe pembangunan ekonomi yang dipaksakan. Pembangunan ekonomi ini dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan media berupa kebijakan, dengan tujuan untuk memberikan jalan atau memfasilitasi sektor swasta untuk melakukan investasi. Jadi dalam tipe pembangunan yang didorong ini pemerintah berfungsi sebagai rangsangan.

Perkembangan ekonomi tipe ini bertujuan untuk memperbaharui dan memperkuat kedudukan militer, politik, dan organisasi untuk mengurangi tekanan dari negara lain.. Pemerintah pada tipe ini beranggapan tidak memerlukan kenaikan tingkat hidup penduduknya. Sistem serta ketaatan klas yang telah lama dijunjung masih senantiasa dipertahankan oleh pemerintah dan penduduk yang taat juga disiplin. Oleh karena itulah, keberhasilan perkembangan ini sangat ditentukan oleh penduduk negaranya.

Peranan pemerintah dalam pembangunan ekonomi adalah sebagai pencegah agar perekonomian tidak keluar jalur serta pertumbuhan yang stabil, melalui berbagai alat kebijaksanaan yang aktif namun tidak langsung. Adapun ciri-ciri pembangunan ekonomi yang didorong antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah yang membentuk klas feodal menjadi klas kapitalis.
2. Pemerintah sebagai pelopor investasi.
3. Perkembangan ekonomi ditujukan untuk membangun kekuatan dalam negeri.
4. Penduduk di negara penganut tipe pembangunan ekonomi yang didorong ini sangat taat dan patuh terhadap pemerintahnya.
5. Pemerintah mengambil peran yang sangat penting dan sektor swasta mengikutinya sehingga dapat mengambil alih usaha pemerintah.

Jepang merupakan contoh negara penganut tipe pembangunan yang didorong. Jepang adalah negara yang diperintah oleh kaum feodal yang telah menyesuaikan diri dibawah pemerintahan ke perekonomian kapitalis.

Pembangunan ekonomi di Eropa (tipe spontan), maupun pembangunan ekonomi di Jepang (tipe yang di dorong) meskipun terdapat perbedaan dalam proses pembangunannya tetapi pada dasarnya mempunyai kesamaan yaitu keduanya berdasar pada perusahaan swasta dan milik swasta.

C. PEMBANGUNAN EKONOMI YANG DIPAKSAKAN

Pembangunan ekonomi yang dipaksakan sangat kontras dengan kedua tipe sebelumnya. Pembangunan ekonomi yang dipaksakan ini didasarkan pada kepemilikan dan pengawasan pemerintah seluruhnya. Pemerintah secara aktif dan langsung mengendalikan gerak perekonomian melalui suatu proses pengambilan keputusan yang terpusat. Seperangkat sasaran yang telah ditetapkan oleh para perencana pusat sebagai dasar penyusunan rencana ekonomi nasional yang lengkap dan komprehensif. Jadi perbedaan mendasar antara pembangunan ekonomi spontan, pembangunan ekonomi didorong dan pembangunan ekonomi dipaksakan adalah rangsangan versus paksaan/pengendalian.

Perencanaan yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan ekonomi tidak hanya menetapkan seperangkat sasaran tertentu yang merupakan suatu rangkaian kemajuan ekonomi yang diinginkan. Akan tetapi, juga berusaha melaksanakan rencananya dengan mengendalikan secara langsung kegiatan dari hampir seluruh unit-unit produksi dalam perekonomian. Sehingga dapat dikatakan proses pembangunan ekonominya secara top-down. Adapun ciri-ciri

pembangunan ekonomi dipaksakan antara lain sebagai berikut :

1. Terdapat rencana-rencana pembangunan yang dibuat oleh pemerintah.
2. Konsentrasi di sektor industri berat.
3. Terjadi penekanan konsumsi.
4. Pemerintah berfungsi sebagai kontrol (pengendali).

Tetapi hal yang perlu diingat adalah, tidak semua negara mampu meniru tipe pembangunan ini. Prosesnya memerlukan tahapan yang belum tentu telah dimiliki oleh negara lain, seperti tenaga teknis yang banyak tersedia, perekonomian yang telah relatif maju, hingga dualisme ekonomi yang masih terjadi meski tanpa dominasi kolonialisme.

Negara penganut tipe pembanguan ekonomi dipaksakan adalah negara–negara bekas blok timur yang kemudian lebih dikenal sebagai negara-negara sosialis, seperti Rusia dan Republik Rakyat China (RRC).

D. PEMBANGUNAN EKONOMI DI NEGARA SEDANG BERKEMBANG

Pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang dicirikan dengan munculnya masalah-masalah kemiskinan. Jika kita membahas mengenai masalah kemiskinan, kita harus mengetahui perspektif sejarahnya mengapa kemiskinan tersebut dapat terjadi. Hal ini dapat dilihat dari tiga sebab sebagai berikut :

1. Asal Mula Ekonomi Dualistis (*Dual Economy*)

Ekonomi dualistis terjadi dimana industri ekspor yang terpadu dengan perekonomian dunia dengan sistem yang modern tetapi di samping itu terdapat kegiatan-kegiatan yang masih mempunyai tingkat subsisten (pertanian tradisional dan kerajinan).

Hal ini terjadi karena, investasi yang ditujukan pada pasar sangat kecil sehingga menyebabkan negara yang sedang berkembang bergantung pada kolonial. hal demikian berdampak pada rendahnya produktivitas dan penghasilan yang diterima oleh masyarakat, yang kemudian menimbulkan keseganan untuk mengadakan investasi dalam negeri dan lebih memilih proyek-proyek yang menguntungkan di pasar dunia.

2. Periode antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II (Turunnya

Kekuasaan Barat)

Adanya perang membawa dua akibat bagi negara sedang berkembang yaitu meningkatnya permintaan akan bahan mentah industri dan bahan makan dari negara sedang berkembang. Terjadinya penurunan ekspor barang-barang konsumsi ke negara sedang berkembang.

Keadaan demikian mendorong negara yang sedang berkembang untuk membangun industri dasar agar tidak lagi bergantung pada industri luar negeri. Maka secara resmi, pada tahap inilah awal terjadinya industrialisasi di negara sedang berkembang. Meskipun negara sedang berkembang masih memiliki ekonomi dualistik, tetapi usaha perbaikan kestabilan ekonomi telah mulai nampak pada tahap ini.

3. Perkembangan Internasional

Setelah Perang Dunia II berakhir keadaan di negara yang sedang berkembang tidak banyak berubah, tetap melakukan produksi primer yang kalah bersaing dengan produksi negara-negara maju.

Hal sebaliknya terjadi di negara maju. Barang-barang industri milik negara maju tampak terus naik karena adanya kecenderungan inflasi. Jadi, harga produk primer turun, sedangkan harga barang-barang industri naik. Dampak yang terjadi adalah nilai dasar tukar (*terms of trade*) negara-negara penghasil produk primer, dalam hal ini negara yang sedang berkembang, berada dalam posisi tidak menguntungkan.

Meskipun demikian, melalui *Atlantic Charter*, tercipta kesadaran dari negara-negara maju untuk membantu Negara yang Sedang Berkembang dengan membuat organisasi-organisasi internasional, seperti *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD), *Food and Agricultural Organization* (FAO), hingga *International Trade Organization* (ITO) ekonomi internasional, namun meskipun demikian hal tersebut tidak juga berjalan dengan efektif.

Adapun ciri-ciri pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang

- a. Sumber kapital kecil
- b. Keterampilan tenaga kerja yang masih rendah
- c. Karakter negara sedang berkembang
- d. Pengetahuan teknis terbatas

Negara-negara penganutnya adalah negara yang umumnya menjadi bekas

jajahan dari negara-negara maju, seperti Indonesia, India, Chili, Rhodesia, Bolivia, Malaysia, Uni Afrika Selatan.

BAB VIII

Syarat, Masalah dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan masalah penting baru setelah Perang Dunia ke II. Berabad-abad sebelum itu, negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin sudah merasa puas dengan tingkat hidup yang relatif sederhana (buta huruf, penyakit menular, dan sebagainya). Sikap ini mulai berubah setelah melakukan hubungan dengan negara lain setelah Perang Dunia II berakhir. Dorongan membangun perekonomian merupakan bagian penting dalam mengusahakan kemerdekaan. Usaha pertama adalah mengubah sikap hidup subsisten menjadi modern, sehingga keinginan untuk maju yang kuat adalah keinginan berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Tujuan mereka berbeda akan tetapi pada hakikatnya sama yaitu mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut adalah beberapa faktor-faktor yang harus diperhatikan yaitu faktor adalah sejarah, psikologi, sosiologi, dan pengetahuan politik. Disamping itu untuk mencapai tujuan tersebut perlu perumusan dan implementasi kebijakan pembangunan khususnya kebijakan pembangunan ekonomi. Dalam melaksanakan kebijaksanaan pembangunan ekonomi diperlukan syarat-syarat umum dan pola pengembangan agar perkembangan dapat berjalan seperti yang diharapkan.

A. SYARAT-SYARAT UMUM PEMBANGUNAN EKONOMI

Faktor-faktor yang harus diperhatikan adalah faktor-faktor sejarah, psikologi, sosiologi dan pengetahuan politik. Syarat-syarat yang diperlukan agar perkembangan dapat berjalan seperti yang mereka harapkan menurut Baldwin dan Meier ada enam, yaitu harus ada:

1. *Indegenous forces* (kekuatan dari dalam untuk berkembang)

Kekuatan dari dalam adalah kekuatan yang ada dalam masyarakat itu sendiri untuk berkembang. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan perkembangan. Kekuatan-kekuatan yang berasal dari luar masyarakat dapat mendorong dan memeberikan fasilitas-fasilitas pada kehendak untuk berkembang, namun kekuatan dari luar hanya merupakan pelengkap dan tidak dapat menggantikan kekuatan-kekuatan yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Bantuan luar negeri belum tentu dapat menjamin terus berkembangnya perekonomian tersebut. Lagi pula bantuan luar negeri yang berupa investasi asing akan cenderung memanfaatkan modalnya kearah sumber-sumber alam untuk pasar dunia, dan belum tentu hal ini menguntungkan rakyat setempat.

2. Mobilitas Faktor-Faktor Produksi

Ketidak sempurnaan pasar (*market imperfections*) akan sangat membatasi mobilitas faktor-faktor produksi dari penggunaan yang kurang produktif ke penggunaan yang lebih produktif. Untuk mengatasi hal ini maka market imperfections harus diiadakan, sehingga faktor-faktor produksi dapat digunakan sepenuhnya.

Schulz dalam bukunya "*The role of government in promoting economic growth*", mengatakan bahwa sebenarnya perkembangan ekonomi negara-negara sedang berkembang tidak cukup hanya mengatasi kesukaran-kesukaran yang ada. Untuk perkembangan ekonomi perlu menempatkan usaha-usaha dan capital dalam tiga bentuk:

- a. Meningkatkan jumlah barang capital
- b. Memperbaiki kualitas penduduk sebagai produsen
- c. Menambah tingkat usaha produk

3. Akumulasi Kapital

Akumulasi capital merupakan faktor penting untuk pertumbuhan ekonomi. Akumulasi dapat berwujud kenaikan dalam volume tabungan riil, sehingga sumber uang yang semula untuk tujuan konsumtif dapat diarahkan untuk tujuan produktif.

Untuk mengukur banyaknya capital yang dibutuhkan perlu diperhatikan beberapa hal antara lain: 1) perkiraan tingkat pertambahan penduduk; 2) target kenaikan pendapatan riil per kapita dan 3) angka rasio pertambahan antara

investasi dan output atau *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). Apabila pendapatan per kapita hendak dinaikkan maka akumulasi capital harus semakin bertambah besar. Ini berarti bahwa investasi harus ditingkatkan, dengan cara: menaikkan tingkat tabungan dengan membatasi konsumsi, pemerintah menjual obligasi, pembatasan impor barang-barang konsumsi dan barang capital agar ada inovasi didalam negeri.

4. Kriteria dan Arah Investasi

Untuk mengalokasikan capital terlebih dulu harus diadakan kriteria untuk arah investasi. Pemilihan kriteria tidaklah mudah sebab mungkin kriteria yang satu berupa memaksimalkan total output untuk suatu waktu tertentu, sedangkan kriteria yang lain mungkin lebih baik untuk memaksimalkan output pada waktu lain.

Kriteria produktivitas sosial marjinal ditafsirkan sesuai dengan perubahan-perubahan faktor-faktor tersebut dan biasanya menimbulkan perbedaan pendapat. Beberapa faktor yang harus diperhatikan diantaranya adalah pendapatan per kapita, pendapatan nasional, faktor waktu, kepentingan masyarakat, unsur pasar, titik pertumbuhan, pertumbuhan seimbang atau *balance growth*, teknik produksi

5. Penyerapan Kapital dan Stabilitas

Setiap masyarakat dalam suatu negara mempunyai batas kemampuan penyerapan kapital (*capital absorption capacity*). Kapasitas ini ditentukan pada umumnya oleh dua hal yaitu disatu pihak ditentukan oleh adanya atau tersedianya faktor-faktor produksi komplementer yang bekerja sama dengan capital, dan dilain pihak oleh syarat-syarat yang diperlukan untuk menghindari inflasi dan untuk mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran internasional.

Penyerapan kapital juga dipengaruhi oleh masa perkembangan perekonomian disitu; misalnya karena waktu yang diperlukan lama maka terjadi inflasi dan deficit dalam Neraca Pembayaran Internasional. Variansinya sebagai berikut:

- a. Jika akumulasi kapital melebihi kemampuan penyerapan, seperti yang terjadi di negara sedang berkembang, setiap tambahan investasi bahkan cenderung menimbulkan inflasi. Hal ini terjadi karena fasilitas-fasilitas

yang tersedia belum banyak.

- b. Jika akumulasi kapital lebih kecil daripada kemampuan negara untuk menyerap kapital, maka akan timbul kesulitan-kesulitan terutama di bidang neraca pembayaran karena negara-negara tersebut sangat membutuhkan devisa untuk impor barang-barang yang diperlukan. Impor terutama untuk waktu dekat berupa barang-barang konsumsi dan bukan barang kapital. Namun karena harga barang-barang impor ini cenderung naik sehingga biaya-biaya untuk ekspor dan menghasilkan barang-barang ekspor naik pula. Akibatnya kemampuan ekspor menurun dan impor barang-barang capital akan semakin menurun juga.

6. Nilai dan Lembaga-Lembaga yang Ada

Kelima faktor tersebut di atas bersifat ekonomi, sedangkan nilai-nilai dan lembaga-lembaga bersifat nonekonomi. Namun faktor ini tidak kalah penting dalam peranan yang dimainkannya untuk perkembangan ekonomi.

Perkembangan ekonomi dapat melaju cepat bila diciptakan kebutuhan-kebutuhan baru, motif-motif baru, cara/metode-metode produksi baru, demikian pula harus ada perubahan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat. Kriteria ekonomi dari investasi (*economic criteria of investment*) saja tidaklah cukup untuk digunakan sebagai patokan kebijaksanaan investasi.

B. MASALAH-MASALAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

1. Menurut Sadono Sukirno

Di negara berkembang masalah penduduk merupakan salah satu masalah pembangunan yang paling utama. Faktor-faktor yang mempercepat perkembangan penduduk diantaranya adalah jumlah penduduk yang sudah terlalu banyak. Selain itu, tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif sangat cepat dalam beberapa dasawarsa belakangan ini. Menurut Sadono Sukirno, masalah dalam pembangunan ekonomi diantaranya adalah:

a. Struktur umur penduduk dan masalah pengangguran

Masalah yang dihadapi adalah struktur penduduk yang berat sebelah, yaitu banyaknya penduduk yang berada dibawah umur (di bawah 15 th), pengangguran

yang bertambah serius, arus urbanisasi yang tinggi. Tingkat perkembangan penduduk yang semakin cepat menyebabkan proporsi penduduk yang belum dewasa menjadi bertambah tinggi dan jumlah anggota keluarga menjadi bertambah besar. Sedikitnya ketersediaan lapangan pekerjaan bagi penduduk yang berusia produktif sangat sedikit dapat menyebabkan pengangguran terjadi dimana-mana.

b. Masalah perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke kota besar

Perpindahan penduduk dari pedesaan ke kota-kota besar sangat berlebihan sehingga menyebabkan jumlah penduduk kota tumbuh dengan cepat. Kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada dikota tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menampung pertambahan penduduk kota yang demikian banyaknya. Karenanya disamping pengangguran yang kian memburuk di desa-desa, banyak diantara Negara berkembang menghadapi pula masalah pengangguran dikota yang sangat serius.

2. Menurut Irawan dan Suparmoko

Masalah-masalah Pembangunan dalam Negeri:

a. Tekanan Penduduk

Dalam periode Perang Dunia I dan depresi, nampaknya ada kemungkinan terjadi pengangguran besar-besaran, maka mereka memandang bahwa tingkat kelahiran yang sudah rendah itu dianggapnya masih tinggi, sehingga karena ketakutan ini, maka tingkat kelahiran menurun secara drastis. Sesudah PD II berakhir, karena kemajuan di bidang materi maka tingkat kelahiran naik lagi, sedang tingkat kematian tetap turun, sehingga jumlah penduduk mulai bertambah lagi secara dramatis. Tekanan penduduk terjadi akibat dari :

1) Masalah kelebihan penduduk

Masalah ini juga merupakan penghalang untuk perkembangan ekonomi. Keadaan seperti ini terjadi negara berkembang. Yang bermula dari kelebihan penduduk di desa-desa, maka ada keharusan untuk memperkembangkan industri dan usaha-usaha sekunder. Dengan naiknya jumlah penduduk, maka produksi makanan harus diperluas. Jadi, daya beli untuk barang-barang industri tak ada karena digunakan untuk membeli makanan, sedangkan kelebihan penduduk itu harus diimbangi dengan produksi barang industri supaya tercipta

kesempatan kerja.

2) Pengawasan jumlah penduduk

Sebenarnya perkembangan ekonomi dan lebih-lebih dalam mengatasi kesulitan-kesulitan untuk berkembang tak dapat dibiarkan sendiri, melainkan sedikit banyak harus ada campur tangan pemerintah.

3) Masalah kemanusiaan

Halangan untuk perkembangan ekonomi dari aspek kemanusiaan misalnya: tradisi bahwa membantu mengongkosi atau menjamin sanak saudara merupakan kewajiban. Selama tradisi ini masih berjalan maka usaha seseorang harus dibagi kepada orang banyak sehingga ia dan keluarganya tidak banyak mendapat perbaikan nasib.

b. Tanah dan penggunaannya

Tanah yang cocok untuk pertanian merupakan faktor penting untuk perkembangan ekonomi bagi negara-negara berkembang. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Pada umumnya produktivitas per orang yang bekerja di sektor ini sangatlah rendah. Sudah tentu karena keadaan ini maka per kesatuan tanah akan mempunyai hasil lebih rendah meskipun keadaan alam relatif lebih baik dari pada keadaan alam di negara-negara maju.

c. Pembangunan masyarakat desa

Pembangunan masyarakat desa dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana orang-orang disitu bersama dengan pejabat pemerintah berusaha untuk memperbaiki keadaan perekonomian, sosial dan kebudayaan dalam masyarakat yang bersangkutan, mengintegrasikan masyarakat ini dalam kehidupan bangsa dan dapat membantu membangun bangsa atau negara.

Pembangunan masyarakat desa meliputi 2 unsur yaitu: ikut sertanya penduduk sendiri dalam usaha untuk memperbaiki tingkat hidupnya dengan inisiatif mereka sendiri dibarengi dengan bantuan-bantuan teknik serta lain-lain bantuan sedemikian rupa sehingga memajukan inisiatif mereka untuk berusaha sendiri dan saling membantu. Dalam beberapa hal pembangunan masyarakat desa itu dimulai dari suatu sektor yang kemudian sedikit demi sedikit meliputi sektor-sektor lain yang lebih luas.

C. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI

Kebijakan merupakan sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan). Kebijakan diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan, menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*). Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Analisis kebijakan pembangunan ekonomi adalah usaha terencana yang berkaitan dengan pemberian penjelasan (*explanation*) dan preskripsi atau rekomendasi (*prescription or recommendation*) terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan pembangunan ekonomi yang telah diterapkan.

1. Kebijakan Ekonomi dalam Negeri

Kebijaksanaan ekonomi dalam negeri digolongkan menjadi dua yaitu:

a) Kebijaksanaan Fiskal

Kebijaksanaan fiskal yaitu kebijaksanaan pemerintah dalam pengeluaran dan pendapatannya dengan tujuan untuk menciptakan kesempatan kerja yang tinggi tanpa inflasi. Ada tiga instrumen kebijaksanaan fiskal yang dapat dijalankan (Sukirno, 2010), yang meliputi: Pertama, menaikkan pajak rumah tangga. Kebijaksanaan ini akan menyebabkan jumlah pendapatan yang dapat dibelanjakan masyarakat berkurang, sehingga akan mengakibatkan penurunan konsumsi masyarakat. Perpajakan mendorong pembentukan modal melalui dua cara: (1) mengalihkan sumber-sumber swasta kepada negara untuk digunakan dalam saluran produktif yang diinginkan; (2) dengan menyediakan rangsangan pada sektor swasta untuk menaikkan produksi. Kedua, mengurangi pengeluaran pemerintah fiskal (*fiscal incentive*) pada pengusaha tertentu. Pengurangan pemerintah akan menurunkan pengeluaran masyarakat, dan Dengan demikian, dapat mengurangi tekanan inflasi.

Ketiga, memberi rangsangan fiskal (*fiscal insentive*) pada pengusaha tertentu. Misalnya, memberikan modal dengan syarat-syarat yang ringan, pembebasan sementara pajak, mengurangi atau membebaskan pajak impor modal dan

bahan baku. “Dalam konteks perekonomian negara terbelakang peranan kebijaksanaan fiskal adalah untuk memacu lajunya pembentukan modal. Ia dirancang sebagai piranti pembangunan ekonomi” (Jhingan, 1988:471). Oleh karena itu, menurutnya tujuan kebijaksanaan ini adalah untuk:

1) Meningkatkan laju investasi

Pemerintah pertama kali harus menerapkan kebijaksanaan investasi di sektor-sektor publik, sehingga dapat mendorong investasi di sektor swasta. Dengan cara meningkatkan rasio tabungan incremental melalui keuangan negara, pajak dan pinjaman wajib.

2) Meningkatkan kesempatan kerja

Agar kesempatan kerja meningkat, maka pengeluaran pemerintah harus diarahkan kepada penyediaan over head social dan ekonomi, dan dalam jangka panjang pengeluaran seperti itu akan menciptakan lapangan kerja dan menaikkan efisiensi produktivitas ekonomi.

3) Untuk mendorong investasi optimal secara sosial

Kategori investasi ini menghasilkan ekonomi eksternal, memperluas pasar, meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi.

4) Untuk meningkatkan stabilitas di tengah ketidakstabilan ekonomi internasional.

Dapat disimpulkan bahwa kebijaksanaan fiskal bagi negara-negara sedang berkembang adalah untuk mengekang kecenderungan konsumsi dalam rangka meningkatkan kecenderungan menabung demi tercapainya pembentukan modal bagi investasi. Sehingga kebijaksanaan fiskal memainkan peranan dinamis dan berfungsi sebagai instrumen untuk menggalakkan pembangunan ekonomi, khususnya sebagai alat untuk mempertinggi penggunaan sumber-sumber daya, dan sebagai alat untuk memperbesar penanaman modal.

b) Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah untuk memengaruhi jalannya perekonomian dengan cara memengaruhi penawaran uang dalam masyarakat atau dengan cara memengaruhi tingkat bunga.

Ada beberapa jenis kebijakan moneter, yaitu:

1) *Reserve Ratio Policy*

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan

memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

Bank sentral harus mengatur cadangan bank-bank komersial sedemikian rupa sehingga tingkat harga tercegah dari kenaikan dan tanpa berpengaruh buruk pada investasi dan produksi.

2) Politik Diskonto

Politik diskonto yaitu kebijaksanaan bank sentral untuk memengaruhi tingkat bunga. Suku bunga yang tinggi akan merupakan hambatan bagi pertumbuhan investasi swasta maupun publik. Sebaliknya suku bunga rendah merupakan syarat penting untuk mendorong investasi swasta di bidang pertanian dan industri terutama bagi pengusaha dan industri kecil.

3) *Credit Selective Control*

Kebijaksanaan ini dimaksudkan untuk memengaruhi pola investasi dan produksi. Tujuan utamanya adalah untuk mengendalikan tekanan inflasioner yang timbul di dalam proses pembangunan. Pengendalian kredit secara kualitatif lebih efektif dari pada tindakan pengendalian kredit kuantitatif dalam memengaruhi alokasi kredit dan pola investasi.

4) *Open Market Operation*

Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (*government securities*). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang. Beberapa kelemahan kebijaksanaan moneter:

- a) Bank-bank komersial pada umumnya mempunyai cadangan yang berlebihan, sehingga perubahan pada tingkat cadangan minimum tidak akan banyak memengaruhi kegiatan mereka untuk meminjamkan uang kepada para pengusaha dan masyarakat.
- b) Jumlah cadangan yang berlebihan yang dimiliki bank komersial mengakibatkan mereka jarang meminjam uang ke bank sentral.

- c) Keadaan pasar uang dan pasar modal masih belum sempurna, ini mengakibatkan operasi pasar terbuka tidak dapat dijalankan secara efektif karena masyarakat belum banyak menjual belikan surat-surat berharga.
- d) Sistem bank belum berkembang. Hanya sebagian kecil saja masyarakat yang berhubungan dengan bank. Dengan demikian, kebijaksanaan moneter hanya sebagian kecil saja memengaruhi kegiatan perekonomian.

2. Kebijakan Ekonomi Luar Negeri

a. Kebijakan pelaksanaan pemerintah

Biasanya negara sedang berkembang melaksanakan kebijakan perdagangan internasional untuk melindungi industri dalam negeri, misalnya; dengan proteksi, subsidi, dan multiple exchange rates. Namun kebijakan tarif untuk proteksi mempunyai kelemahan bahwa konsumen dipaksa mengonsumsi barang-barang dalam negeri yang lebih rendah kualitasnya, sedangkan para produsen justru dimanja.

Cara lain untuk mendorong perkembangan ekonomi ialah dengan memberikan subsidi pada industri-industri tertentu. Subsidi ini dapat, memperendah harga penjualan, sehingga subsidi akan mendorong produksi dan mobilitas tenaga kerja. Disamping itu ada cara multiple exchange rates yaitu kurs devisa berbeda-beda bagi barang-barang yang diimpor.

b. Bantuan teknis

Bantuan teknis penting untuk pembangunan negara sedang berkembang. Adapun yang dimaksud dengan bantuan teknis ialah mengatur atau membentuk “*tim internasional*” untuk memberi nasihat kepada pemerintah negara sedang berkembang dalam hubungannya dengan fasilitas-fasilitas untuk pendidikan di luar negeri, mengatur penyelenggaraan latihan-latihan bagi para teknisi serta memberikan fasilitas untuk membantu pemerintah negara sedang berkembang dengan menyediakan tenaga-tenaga ahli, perlengkapan-perengkapan dan mengorganisir jasa-jasa tersebut untuk pembangunan ekonomi negara sedang berkembang.

c. Investasi asing swasta

Investasi ini dapat berbentuk “investasi langsung” (*Foreign Direct Investment*) yaitu langsung punya usaha di situ dan “investasi portofolio” yaitu membeli

saham-saham perusahaan di negara sedang berkembang. Investasi teknik-teknik dan keahlian baru dapat ditiru oleh negara sedang berkembang, tetapi investasi asing itu tidak banyak karena biasanya investasi tersebut terbatas pada proyek-proyek ekspor dan tidak untuk kepentingan negara yang sedang berkembang itu.

d. Investasi asing pemerintah

Investasi asing pemerintah, berupa pinjaman dan hadiah dari pemerintah asing atau badan-badan internasional kepada pemerintah negara sedang berkembang. Biasanya investasi ini dapat digunakan sekehendak negara peminjam. Badan-badan internasional yang memberikan pinjaman untuk investasi ini misalnya IBRD, sekarang dikenal dengan Bank Dunia, tugasnya antara lain menjamin investasi asing swasta dan memobilisir investor-investor asing swasta. Sebenarnya bantuan yang diberikan, baik berupa pinjaman atau hadiah dan lain-lain dari luar negeri hanya merupakan tambahan modal saja, sedangkan yang penting bagi pembangunan ekonomi ialah modal yang ada dalam negeri itu sendiri.

e. Kebijakan tata niaga

Dalam bagian ini dibicarakan secara lebih khusus alat-alat kebijakan tata niaga untuk pengembangan sektor industri.

1) Pola umum pengembangan sektor industri

Pada umumnya negara-negara yang berusaha meningkatkan pendapatan nasional lewat pembentukan nilai tambah di dalam negeri dan berusaha menciptakan lapangan kerja, menempuh jalan pembangunan dan pengembangan sektor industri. Agar supaya sektor industri pengolahan (manufacturing industry) dapat berhasil berkembang, harus ada jaminan pasar yang akan menyerap hasil-hasil produksinya.

2) Pengaturan tata niaga dan permasalahan

Kebijakan ekonomi terbuka memiliki keuntungan dan kelemahan. Agar kebijakan tersebut tidak merugikan perekonomian dalam negara secara keseluruhan, harus disusun suatu peraturan tata niaga tertentu sedemikian rupa sehingga dapat mendorong perekonomian nasional untuk tumbuh lebih sempurna.

a) Pola ekspor (*Outward Looking*)

Sehubungan dengan pola ekspor untuk mengembangkan industri dalam negeri, maka pengaturan seyogianya diarahkan untuk mendukung pola ekspor tersebut. Kebaikan dari pola ini ialah terciptanya kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, serta munculnya negara eksportir dalam pasaran dunia. Kelemahan pola ini berupa tuduhan bahwa negara eksportir mengorbankan negara-negara importir.

b) Pola pasar dalam negeri

Untuk strategi pengembangan pasar dalam negeri, tersedianya sumber daya alam sebagai bahan mentah merupakan prasyarat utama. Dengan tersedianya bahan mentah yang cukup dan murah harganya serta didukung oleh tersedianya tenaga kerja dan skill yang cukup maka pengembangan sektor industri dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan pasar dalam negeri, sehingga perkataan barang-barang produksi dalam negeri dapat bersaing dengan barang-barang impor.

c) Tarif

Seringkali tarif dianggap sebagai alat yang cukup efektif untuk menanggulangi impor atau membatasinya. Namun demikian, sering terjadi tarif kurang efektif untuk membatasi impor barang-barang tertentu dan bahkan tidak cukup mendorong produksi dalam negeri. Hal ini sangat tergantung pada elastisitas penawaran barang produksi dalam negeri atau juga sangat tergantung juga pada elastisitas permintaan atas barang yang bersangkutan. Biasanya tarif ditujukan untuk membatasi impor barang-barang tertentu dan mendorong produksi barang sejenis didalam negeri. Dalam kasus permintaan dalam negeri sangat inelastis terhadap harga maka tarif harus segera diikuti dengan produksi dalam negeri yang cukup.

d) Quota

Cara lain untuk membatasi impor barang adalah dengan kuota. Dari segi kuantitas kuota lebih efektif dalam membatasi jumlah barang yang diimpor, sehingga mengakibatkan tingginya harga barang dan terbatasnya jumlah barang. Pihak yang menikmati adanya kuota adalah pihak produsen importir di dalam negeri, tetapi kuota merugikan pihak produsen di luar negeri. Kuota juga harus diterapkan setelah mempertimbangkan dampaknya terhadap industri lain yang berkaitan. Kuota yang dikenakan atas barang industri hulu dapat mengundang impor barang-barang sejenis pola industri hilir, karena harga

barang yang bersangkutan menjadi mahal sebagai akibat besarnya marjin yang dinikmati “produsen importir”.

e) Penunjukan Importir

Penunjukan importir oleh pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi/mengontrol jumlah barang impor yang masuk, tetapi bukan karena adanya kuota. Efek dari penunjukan importir ini sebenarnya tidak berbeda dengan kuota, tetapi lebih pada adanya unsur monopoli pada importir yang ditunjuk. Hanya agar tidak terjadi tindakan balasan dari negara pengekspor maka dilakukan tindakan kuota terselubung semacam itu. Penunjukan importir mengakibatkan adanya semacam monopoli impor. Sehingga importir yang ditunjuk menikmati terlalu banyak keuntungan. Itu akan dapat mengakibatkan timbulnya *high cost economy* (ekonomi biaya tinggi).

BAB IX

Kemiskinan dan Strategi Mengatasi Kemiskinan

Materi yang akan Anda pelajari antara lain : pengertian kemiskinan, macam-macam kemiskinan, indikator, batas, penghitungan angka kemiskinan serta strategi dalam memecahkan masalah kemiskinan.

A. PENGERTIAN KEMISKINAN

Kemiskinan adalah rendahnya taraf kehidupan suatu masyarakat baik yang berada di pedesaan maupun yang berada di daerah perkotaan. Kemiskinan merupakan rendahnya nilai tatanan kehidupan di suatu daerah, baik di perkotaan maupun di pedesaan, baik yang menyangkut masalah moral, materil maupun spirituil. Kemiskinan tidak hanya diartikan dalam segi ekonomi saja tetapi juga harus mencerminkan kondisi riil yang sebenarnya dihadapi keluarga miskin. Definisi kemiskinan yang mencerminkan kondisi riil yaitu menyangkut kemungkinan orang atau keluarga miskin itu untuk melangsungkan dan mengembangkan usaha serta taraf kehidupannya, seperti nampak pada gambar berikut.

B. MACAM- MACAM KEMISKINAN

1. Kemiskinan Menurut penyebabnya

- a. Kemiskinan alamiah, yaitu kemiskinan yang terjadi karena keadaan alam yang miskin atau langka, sehingga produktivitas masyarakat menjadi rendah.
- b. Kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi karena alokasi

sumber daya yang tidak terbagi secara merata. Apabila total produksi yang dihasilkan dapat dibagi secara merata, maka tidak akan terjadi kemiskinan.

2. Kemiskinan Secara Konsep

- a. Kemiskinan subjektif, yaitu apabila setiap orang mendasarkan pemikirannya sendiri dengan menyatakan bahwa kebutuhannya tidak terpenuhi secara cukup walaupun secara absolut ataupun relatif sebenarnya tidak tergolong miskin. Dengan kata lain individu melakukan perbandingan antara "*needs dan wants*".
- b. Kemiskinan absolut adalah seseorang (keluarga) yang memiliki pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan minimum untuk memelihara kondisi fisiknya secara efisien.
- c. Konsep kemiskinan relatif berkaitan dengan konsep relative deprivation atau posisi relatif seseorang terhadap anggota masyarakat lain terhadap kemampuan pemenuhan kebutuhan. Konsep ini berkaitan erat dengan ketimpangan pendapatan.

C. BATASAN KEMISKINAN

Batas garis kemiskinan yang diterapkankan setiap negara ternyata berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan (BPS, 1994). Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari. Sedangkan pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa.

Dalam hal ini, BPS menggunakan dua macam pendekatan, yaitu : pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dan pendekatan *Head Count Index*. Pendekatan yang pertama merupakan pendekatan yang sering digunakan, yaitu kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan *Head Count Index* merupakan ukuran yang menggunakan kemiskinan absolut. Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada di bawah suatu batas yang disebut batas garis kemiskinan, yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan

dan non-makanan. Dengan demikian, garis kemiskinan terdiri atas 2 komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (*food line*) dan garis kemiskinan non-makanan (*non-food line*).

Makanan dan non-makanan memengaruhi penentuan pilihan komoditi. Harga, selera, dan pendapatan akan menentukan pilihan komoditi yang akan dikonsumsi dan besarnya nilai pengeluaran non-makanan. Sehingga, proporsi pengeluaran non-makanan merupakan fungsi harga–harga, selera, dan pendapatan.

D. INDIKATOR KEMISKINAN

Menurut kriteria BPS, 2014, rumah tangga dikatakan miskin jika:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah.
8. Hanya mengonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000,- per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal

motor, atau barang modal lainnya.

Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga termasuk dalam kategori miskin.

Indikator lain, seseorang atau keluarga dapat dikategorikan miskin apabila memenuhi indikator di bawah ini:

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan).
2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
3. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam. Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat.
5. Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
6. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
7. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak-anak telantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpendil).

E. PENYEBAB KEMISKINAN

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, yaitu:

1. Merosotnya standar perkembangan pendapatan perkapita secara global.

Standar pendapatan per-kapita bergerak seimbang dengan produktivitas yang ada pada suatu sistem. Jika produktivitas berangsur meningkat maka pendapatan perkapita akan naik. Sebaliknya jika produktivitas berangsur menyusut maka pendapatan per-kapita akan turun beriringan. Faktor yang memengaruhi kemerosotan standar perkembangan pendapatan perkapita:

- a. Naiknya standar perkembangan suatu daerah
- b. Politik ekonomi yang tidak sehat
- c. Faktor- faktor luar negeri, diantaranya yaitu:

- 1) Rusaknya syarat- syarat perdagangan
 - 2) Beban hutang
 - 3) Kurangnya bantuan luar negeri
 - 4) Perang
- d. Menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat

Faktor ini sangat urgen dalam pengaruhnya terhadap kemiskinan. Maka untuk menaikkan etos kerja dan produktivitas masyarakat harus didukung dengan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, serta jaminan kesehatan dan pendidikan yang bisa dipertanggung jawabkan secara optimal.

2. Biaya kehidupan yang tinggi

Melonjak tingginya biaya kehidupan merupakan akibat dari tidak adanya keseimbangan pendapatan atau gaji masyarakat. Maka kemiskinan adalah konsekuensi logis dari realita di atas. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya tenaga kerja ahli, lemahnya peranan wanita di depan publik dan banyaknya pengangguran.

3. Pembagian subsidi income pemerintah yang kurang merata.

Hal ini selain menyulitkan akan terpenuhinya kebutuhan pokok dan jaminan keamanan untuk para warga miskin, juga secara tidak langsung mematikan sumber pemasukan warga. Di sisi lain penduduk miskin masih terbebani oleh pajak negara.

F. CARA MENGHITUNG PENDUDUK MISKIN DAN DESA MISKIN

Mengukur jumlah kemiskinan dapat dilakukan dengan cara menghitung jumlah orang miskin sebagai proporsi dan populasi. Pada awalnya menggunakan cara *Head count Index* kemudian disempurnakan dengan cara *poverty gap*. *Proverty gap* menghitung transfer yang akan membawa pendapatan setiap penduduk miskin hingga tingkat di atas garis kemiskinan.

Ada 3 metode untuk menentukan daerah miskin, yaitu dengan metode standar deviasi (SD), metode range (R), dan metode persepsi lapangan (PL). Suatu daerah disebut miskin apabila paling sedikit dua atau tiga metode tersebut menyatakan miskin. Dengan metode SD, jumlah skor setiap daerah

dibandingkan dengan rata-rata skor tingkat propinsi untuk menentukan apakah daerah tersebut miskin. Dengan metode R, skor tiap daerah dibandingkan dengan range untuk menentukan apakah daerah tersebut miskin. Metode PL menggunakan kuesioner khusus guna menghimpun pendapat camat/pemimpin daerah tentang status daerah-daerah di wilayahnya. Suatu daerah/desa diklasifikasikan miskin atau tidak tergantung dari pendapat pemimpin daerah/camat mengenai keadaan potensi/fasilitas sosial ekonomi desa, perumahan/lingkungan, dan kependudukan. Persepsi pemimpin daerah/camat ini akan dievaluasi oleh petugas pencacah (mantri statistik).

Seseorang dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata penghasilan per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan yang ditentukan oleh BPS. Garis Kemiskinan adalah jumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk memenuhi kebutuhan makanan setara 2.100 kilo kalori per orang per hari serta untuk memenuhi kebutuhan non-makanan berupa perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan aneka barang/jasa lainnya.

Desa Miskin adalah desa yang secara ekonomis pendapatan per kapitanya per tahun berada di bawah standar minimum pendapatan per kapita nasional dan infrastruktur desa yang sangat terbatas.

G. STRATEGI MENANGGULANGI KEMISKINAN

Menurut Mudrajat Kuncoro, 2010 strategi menanggulangi kemiskinan meliputi:

1. Nurske, 1951

Mendasarkan pada mobilisasi tenaga kerja yang masih belum didaya gunakan (*idle*) dalam rumah tangga petani gurem agar terjadi pembentukan modal di pedesaan. Tenaga kerja yang masih belum didayagunakan pada rumah tangga petani kecil dan gurem merupakan sumber daya yang tersembunyi dan merupakan potensi tabungan. Cara yang di gunakan untuk memobilisasi tenaga kerja dan tabungan pedesaan adalah :

- a. Menggunakan pajak langsung atas tanah.
- b. Dapat dilakukan dengan menyusun kerangka kelembagaan di

pedesaan yang memungkinkan tenaga kerja yang belum didayagunakan untuk memupuk modal tanpa perlu menambah upah.

2. Lewis, 1954; Fei Rains, 1964

Menitikberatkan pada transfer sumber daya dari pertanian ke industri melalui mekanisme pasar. Ketersediaan tenaga kerja semacam itu dikemukakan untuk menjelaskan bagaimana pangsa relatif upah dan laba pada sektor kapitalis (apakah di sektor pertanian atau industri, di perekonomian pedesaan atau di kota) dapat dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja di sektor subsistem, yang dapat memengaruhi tabungan dan investasi dalam perekonomian secara umum.

3. Schulz, 1963; Mellor, 1976

Menyoroti potensi pesatnya pertumbuhan dalam sektor pertanian yang di buka dengan kemajuan teknologi dan kemungkinan sektor pertanian menjadi sektor yang memimpin. Model ini dikenal dengan model pertumbuhan berbasis teknologi, atau *Rural-Led Development*. Sektor pertanian tidak hanya sebagai sumber pasokan sumber daya (baik pangan, bahan baku, tenaga kerja, atau tabungan), namun sebagai sektor yang mampu meningkatkan permintaan atas produk pertanian dan non pertanian, oleh karena itu mendukung proses pertumbuhan seimbang. Proses ini akan berhasil apabila dua syarat terpenuhi yaitu:

- a. Kemampuan mencapai tingkat pertumbuhan output pertanian yang tinggi.
- b. Menciptakan pola permintaan yang kondusif terhadap pertumbuhan. Ini tergantung dari dampak keterkaitan ekonomi pedesaan lewat pengeluaran atas barang konsumsi yang dipasok dari dalam sektor itu sendiri, dan melalui investasi yang didorong.

4. Pembangunan pertanian dan Perluasan Akses Kredit Masyarakat

Ada 3 (tiga) aspek dari pembangunan pertanian yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pengurangan kemiskinan tersebut, terutama daerah pedesaan. Kontribusi terbesar bagi peningkatan terbesar bagi peningkatan pendapatan pedesaan dan pengurangan kemiskinan pedesaan

dihasilkan dari adanya revolusi teknologi dalam pertanian padi, termasuk pembangunan irigasi. Kontribusi utama lainnya datang dari program pemerintah untuk meningkatkan produksi tanaman keras. Misalnya, lebih dari 200.000 petani di luar Jawa telah di bantu untuk menanam karet, kelapa dan kelapa sawit. Selain itu, penyediaan fasilitas kredit juga merupakan salah satu alternatif yang dapat dikembangkan untuk mengurangi kemiskinan, terutama pada tataran implementasinya. Studi empiris menunjukkan bahwa fasilitas kredit merupakan cara yang efektif untuk mereduksi kemiskinan.

5. Peningkatan Tingkat Pendidikan Masyarakat

Kualitas sumber daya manusia erat kaitannya dengan pendidikan masyarakat. Kebijakan wajib belajar perlu diiringi dengan kebijakan lain yang dapat menampung dan mengatasi anak putus sekolah yang cenderung menjadi anak jalanan. Apabila pendidikan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia menjadi lebih baik maka kesadaran masyarakat akan masa depan menjadi lebih baik. Kondisi ini akan mendorong masyarakat untuk lebih berkreasi dalam meningkatkan taraf hidupnya.

6. Menciptakan Lapangan Kerja dan Pembangunan sumber daya

Untuk menyalurkan atau mengimbangi meningkatnya pendidikan masyarakat, sebaiknya pemerintah menciptakan lapangan kerja. Sachs dan Larrain (1993) menyatakan bahwa untuk menciptakan lapangan kerja dapat dilakukan dengan meningkatkan saving (S) dan investasi (I), baik investasi domestik maupun foreign direct investment (FDI). Penarikan FDI akan efektif jika diciptakan prasyaratnya, yaitu: stabilitas sosial, politik dan keamanan. Perluasan lapangan kerja juga dapat dilakukan dengan cara penyebaran pusat-pusat industri dan penyebaran sektor industri. Dengan kata lain industri tidak bertumpu pada satu sektor, namun industrialisasi harus dikembangkan pada berbagai sektor.

7. Membudayakan Entrepreneurship

Dengan membudayanya sikap entrepreneurship pada masyarakat diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengurangi angka pengangguran. Dengan demikian, mereka dapat menciptakan lapangan kerja untuk diri sendiri dan orang lain. Peran entrepreneur sangat besar, yaitu:

- a. Menambah produksi nasional.

- b. Menciptakan kesempatan kerja.
- c. Membantu pemerintah mengurangi pengangguran.
- d. Membantu pemerintah dalam pemerataan pembangunan.
- e. Menambah sumber devisa bagi pemerintah.
- f. Menambah sumber pendapatan negara dengan membayar pajak.

8. Peran lembaga swadaya masyarakat (LSM)

Peran sangat besar dalam perencanaan dan implementasi program pengurangan kemiskinan. Karena fleksibilitas dan pengetahuan mereka tentang komunitas yang mereka bina, LSM-LSM ini beberapa hal bisa menjangkau golongan miskin tersebut secara lebih efektif daripada program-program pemerintah.

BAB X

Migrasi

A. KONSEP DAN DEFINISI MIGRASI

Mobilitas sebagaimana digunakan dalam studi geografi, mengacu pada semua bentuk gerakan individu atau kelompok secara spasial. Gerakan penduduk, yang mencakup perubahan tempat tinggal secara permanen atau semi permanen secara khusus didefinisikan sebagai migrasi. Sedangkan gerakan penduduk yang hanya sementara seperti dalam perjalanan wisata, liburan atau perjalanan bisnis disebut *commuting* dan sirkulasi.

Jadi mobilitas penduduk dikategorikan dalam dua kelompok yaitu mobilitas permanen dan non permanen. Mobilitas permanen (atau yang biasanya disebut migrasi) adalah penduduk yang menetap di daerah lain selama waktu minimal enam bulan atau mereka yang, menetap kurang dari enam bulan tapi berniat menetap untuk waktu enam bulan atau lebih.

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik/negara ataupun batas administrasi/batas bagian dalam suatu negara (Munir, 2000 : 116).

B. MIGRASI DAN PEMBANGUNAN

Migrasi dari desa ke kota pada awalnya dipandang sebagai hal yang menguntungkan dalam kajian pembangunan ekonomi. Migrasi internal dianggap sebagai suatu proses yang alamiah di mana surplus tenaga kerja secara perlahan ditarik dari sektor perdesaan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja bagi pertumbuhan industri perkotaan. Proses tersebut dianggap bermanfaat secara sosial karena sumber daya manusia dipindahkan dari lokasi-lokasi

dimana produk sosial marginalnya (*social marginal product*) sering dianggap sama dengan nol ke tempat-tempat dimana produk marginal tersebut tidak hanya positif tetapi juga tumbuh dengan cepat sebagai akibat dari akumulasi modal dan kemajuan teknologi.

Migrasi juga dianggap suatu proses yang bisa menghilangkan ketidakseimbangan struktural antara desa-kota dengan dua cara langsung. Pertama, dari sisi penawaran, migrasi internal yang tidak proporsional meningkatkan tingkat pertumbuhan pencari kerja perkotaan sehubungan dengan adanya pertumbuhan penduduk perkotaan, karena proporsi dari orang muda yang berpendidikan cukup baik mendominasi arus migrasi ini. Kehadiran mereka ini cenderung menambah pertumbuhan penawaran tenaga kerja perkotaan sementara itu terjadi penurunan jumlah sumber daya manusia di pedesaan. Kedua, dari sisi permintaan, penciptaan lapangan kerja perkotaan lebih sulit dari penciptaan lapangan kerja pedesaan karena kebutuhan sumber daya komplementer di sektor industri. Selain itu, tekanan-tekanan kenaikan upah di perkotaan dan tunjangan tambahan yang diwajibkan bagi para pekerja ditambah pula dengan ketiadaan alat-alat teknologi produksi padat karya yang tepat guna agar suatu kenaikan pangsa pertumbuhan output sektor modern disebabkan oleh kenaikan produktivitas tenaga kerja. Kenaikan penawaran yang cepat tersebut dan pertumbuhan permintaan yang lambat cenderung untuk mengubah masalah ketidakseimbangan tenaga kerja dalam jangka pendek menjadi surplus tenaga kerja daerah perkotaan dalam jangka panjang.

C. MIGRASI DI NEGARA BERKEMBANG

Umumnya para migran low skilled dari negara miskin dan berkembang menjadi saingan berat para pekerja kasar negara setempat. Hal ini disebabkan para tenaga kerja migran bersedia digaji lebih rendah tetapi masih jauh lebih tinggi dibandingkan upah yang diterima di negara asal. Maka dari itu para migran harus ekstra luar biasa hati-hati. Kenyataan ini membuat para migran harus bertahan terhadap setiap kemungkinan permusuhan yang timbul dalam pergaulan dengan orang-orang di negara setempat.

Dengan kondisi tersebut, secara ekonomis dan psikologis, sebenarnya migrasi tenaga kerja sangat mahal, khususnya bagi para pekerja kasar. Hal ini juga berdampak pada negara-negara yang mengirim para migran (*sending*

countries). Tidak jarang perlakuan-perlakuan kurang manusiawi terhadap para pekerja migran melukai perasaan bangga secara nasional (terutama apabila migran mengalami tindakan di luar batas kemanusiaan seperti yang sering terjadi dengan tenaga kerja wanita dari Indonesia).

Masalah ini merupakan tantangan bagi negara miskin dan berkembang untuk meningkatkan kualitas tenaga kerjanya yang akan bermigrasi untuk bekerja ke negara lain. Negara-negara maju misalnya, cenderung menyambut migran yang memiliki keterampilan tinggi, sementara menutup kemungkinan bagi para migran yang kurang memiliki keterampilan.

D. KEBIJAKAN MIGRASI

Model Todaro secara sekilas nampak kurang memerhatikan arti penting migrasi desa-kota (karena model ini berpendapat bahwa migrasi pada dasarnya merupakan suatu mekanisme penyesuaian alokasi tenaga kerja di desa dan di kota), namun model tersebut mengandung sejumlah implikasi kebijakan yang sangat penting bagi Dunia ketiga. Berikut ini adalah lima implikasi kebijakan yang paling penting.

Pertama, ketimpangan kesempatan kerja antara kota dan desa harus dikurangi. Karena para migran diasumsikan akan tanggap terhadap adanya selisih-selisih pendapatan, maka ketimpangan kesempatan ekonomi antara segenap sektor perkotaan dan pedesaan harus dikurangi. Kedua, pemecahan masalah pengangguran tidak cukup hanya dengan penciptaan lapangan kerja di kota. Pemecahan masalah pengangguran di perkotaan yang dilakukan atas dasar saran-saran ilmu ekonomi keynesian atau tradisional (yaitu melalui penciptaan lebih banyak lapangan kerja di sektor perkotaan tanpa harus meningkatkan penghasilan dan kesempatan kerja di pedesaan dalam waktu bersamaan) dapat mengakibatkan suatu situasi yang paradoks, yakni meskipun lapangan kerja di daerah perkotaan telah ditambah namun tingkat penganggurannya tetap saja meningkat. Ketiga, pengembangan pendidikan yang berlebihan mengakibatkan migrasi dan pengangguran. Model Todaro juga memiliki implikasi kebijakan untuk mencegah investasi di bidang pendidikan yang berlebihan terutama pendidikan tinggi. Keempat, pemberian subsidi upah dan penentuan harga faktor produksi tradisional (tenaga kerja) justru menurunkan produktivitas. Salah satu resep kebijakan ekonomi yang baku

untuk menciptakan kesempatan kerja di perkotaan adalah dengan menghilangkan distorsi harga faktor produksi dan menggunakan harga yang sebenarnya, yaitu harga dibentuk oleh mekanisme pasar. Terakhir, kelima, program pembangunan desa secara terpadu harus dipacu. Kebijakan yang hanya ditujukan untuk memenuhi sisi permintaan kesempatan kerja di kota, seperti subsidi upah, rekrutmen pegawai lembaga-lembaga pemerintah, penghapusan distorsi harga faktor-faktor produksi dan penyediaan insentif perpajakan bagi para majikan, dalam jangka panjang ternyata tidak begitu efektif untuk meniadakan atau menanggulangi masalah pengangguran bila dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan yang khusus dirancang untuk mengatur secara langsung penawaran tenaga kerja ke wilayah perkotaan.

E. TEORI-TEORI MIGRASI

1. Arthur Lewis

Arthur Lewis merupakan salah satu ahli yang mengatakan bahwa alasan yang menyebabkan seseorang melakukan migrasi adalah karena perbedaan upah. Lewis (1954) berpendapat bahwa di negara-negara yang sedang berkembang terdapat dualisme kegiatan perekonomian, yaitu di sektor ekonomi subsisten (pertanian) di pedesaan, dan sektor ekonomi modern dengan tingkat produktivitas yang tinggi di perkotaan. Proses pembangunan di Negara-negara sedang berkembang dimulai dari sektor subsisten dan dalam waktu yang hampir bersamaan dilakukan pembangunan besar-besaran di sektor industri modern. Produktivitas yang tinggi di sektor industri modern, telah menghasilkan sektor ini memberikan kontribusi yang besar dalam mendorong laju pembangunan ekonomi. Sedangkan pada sektor pertanian dengan produktivitas yang relatif rendah, telah menyebabkan terjadinya kelebihan tenaga kerja di sektor ini. Sering dengan kondisi tersebut, penambahan penduduk yang relatif besar di pedesaan, menyebabkan luas lahan di sektor pertanian semakin sempit. Akibatnya tenaga kerja di sektor pertanian akan pindah ke sektor industri perkotaan. Di sisi dengan perkembangan yang pesat yang terjadi di sektor industri/kapitalis yang sangat terkonsentrasi di daerah perkotaan ini, mengakibatkan perbedaan upah antara sektor industri dan pertanian semakin besar. Kondisi ini pula yang menyebabkan terjadinya migrasi penduduk dari

pedesaan ke perkotaan.

Dengan adanya perbedaan upah antara sektor industri dan pertanian, maka tenaga kerja akan bermigrasi ke perkotaan dalam rangka memperoleh pekerjaan pada sektor industri, karena sektor pertanian mengalami pertumbuhan relative lambat, baik di sektor produksi, penyerapan tenaga kerja, demikian juga tingkat upah.

Model pembangunan teori ini memerhatikan proses perpindahan tenaga kerja dari desa ke kota, perekonomian dibagi 2 sektor yaitu (a) sektor tradisional (pedesaan yang subsisten) yang ditandai dengan produktivitas tenaga kerja yang sangat rendah dan (b) sektor modern (industri perkotaan) dimana tenaga kerja dari sektor subsisten berpindah secara perlahan. Titik perhatian utama model ini adalah proses perpindahan tenaga kerja dan pertumbuhan tingkat pengerjaan (employment) di sektor modern (perkotaan) menyebabkan pertumbuhan output di sektor modern. Kecepatan dua hal (perpindahan tenaga kerja dan pertumbuhan pengerjaan) tergantung pada tingkat akumulasi modal industri di sektor modern.

Walaupun model pembangunan dua sektor dari Lewis adalah sederhana dan sesuai dengan pengalaman sejarah pertumbuhan ekonomi di Barat, model ini mempunyai 3 asumsi pokok yang sangat berbeda dengan kenyataan-kenyataan dari migrasi dan keterbelakangan yang terjadi saat ini.

Pertama, model ini menganggap bahwa tingkat perpindahan tenaga kerja dan tingkat perpindahan tenaga kerja dan tingkat penciptaan kesempatan kerja di sektor perkotaan adalah proporsional dengan tingkat akumulasi modal di perkotaan. Tetapi jika surplus laba para pemilik modal diinvestasikan kembali dalam bentuk peralatan yang lebih hemat tenaga kerja (labor-saving) daripada sekedar menambah modal saja. Hal ini lebih memberikan gambaran apa yang biasa disebut pertumbuhan ekonomi “anti pembangunan”.

Kedua, asumsi dari model ini yang berbeda dengan kenyataan adalah asumsi bahwa “surplus” tenaga kerja terjadi di daerah pedesaan sedangkan di daerah perkotaan ada banyak kesempatan kerja. Hampir semua penelitian sekarang menunjukkan keadaan yang sebaliknya yang terjadi yaitu banyak pengangguran terbuka terjadi di daerah perkotaan tetapi hanya ada sedikit surplus tenaga kerja di daerah pedesaan.

Ketiga, asumsi model Lewis yang tidak realistis adalah anggapan bahwa

upah nyata di perkotaan akan selalu tetap sampai pada satu titik dimana penawaran dari surplus tenaga kerja pedesaan habis. Salah satu gambaran yang menarik dari pasar tenaga kerja perkotaan dan penentuan tingkat upah di hampir semua NSB adalah adanya kecenderungan bahwa tingkat upah untuk meningkat secara nyata sepanjang waktu, baik dalam nilai absolutnya maupun jika dibandingkan dengan pendapatan rata-rata pedesaan, sekalipun ada kenaikan tingkat pengangguran terbuka.

2. Todaro

Model Todaro merumuskan bahwa migrasi berkembang karena perbedaan antar pendapatan yang diharapkan dan yang terjadi di pedesaan dan di perkotaan. Anggapan yang mendasar adalah bahwa para migran tersebut memerhatikan berbagai kesempatan kerja yang tersedia bagi mereka dan memilih salah satu yang bisa memaksimalkan manfaat yang mereka harapkan dari bermigrasi tersebut. Manfaat-manfaat yang diharapkan ditentukan oleh perbedaan-perbedaan nyata antara kerja di desa dan di kota serta kemungkinan migrasi tersebut untuk mendapatkan kerja di kota.

Pada hakikatnya, teori ini menganggap bahwa angkatan kerja, baik actual maupun potensial, memperbandingkan pendapatan yang mereka “harapkan” di perkotaan pada suatu waktu tertentu dengan memperhitungkan pendapatan rata-rata di pedesaan. Akhirnya mereka melakukan migrasi jika pendapatan yang ‘diharapkan’ di kota lebih besar daripada pendapatan rata-rata di pedesaan. Secara singkat bisa disebutkan disini bahwa model migrasi dari Todaro mempunyai 4 (empat) karakteristik utama yaitu:

- a. Migrasi terutama sekali dirangsang oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomis yang rasional. Misalnya pertimbangan manfaat (*benefits*) dan biaya (*costs*), terutama sekali secara finansial tetapi juga secara psikologis.
- b. Keputusan untuk bermigrasi lebih tergantung pada perbedaan upah riil “yang diharapkan” daripada “yang terjadi” antara pedesaan dan perkotaan, di mana perbedaan yang “diharapkan” itu ditentukan oleh interaksi antara dua variabel yaitu perbedaan upah pedesaan-perkotaan yang terjadi kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan di sektor perkotaan.
- c. Kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan di perkotaan berhubungan terbalik dengan tingkat pengangguran di perkotaan.

- d. Tingkat migrasi yang melebihi tingkat pertumbuhan kesempatan kerja di perkotaan sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, tingkat pengangguran yang tinggi di perkotaan merupakan hal yang tidak terelakkan karena adanya ketidakseimbangan yang parah antara kesempatan-kesempatan ekonomi di perkotaan dan di pedesaan pada hampir semua NSB.

3. Haris-Todaro

Seperti yang dikemukakan oleh Todaro, terjadinya migrasi dari sektor tradisional di pedesaan ke sektor modern di perkotaan ditentukan oleh dua faktor, yaitu: Pertama, tingkat perbedaan upah nyata antara sektor pertanian (pedesaan) dan sektor industri (perkotaan). Kedua, adanya peluang untuk memperoleh pekerjaan di perkotaan. Migrasi akan terjadi apabila ada perbedaan upah yang diharapkan (*expected rate*) antara sektor pertanian di pedesaan dan sektor industri di perkotaan. Tetapi jika upah yang diharapkan (*expected rate*) lebih tinggi di sektor pertanian di pedesaan tidak akan terjadi migrasi dari perkotaan ke pedesaan.

4. Don Bellante dan Mark Jackson

Bellante dan Jackson dengan kerangka konsep yang dikembangkan, telah menghipotesiskan bahwa migrasi tenaga kerja ke suatu daerah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sebagai penawaran dan juga permintaan terhadap tenaga kerja. Jika penawaran tenaga kerja bertambah terus, maka pada daerah tersebut akan terjadi kelebihan tenaga kerja, sedangkan di daerah asal akan menjadi kekurangan tenaga kerja. Dalam kondisi demikian terjadi perubahan tingkat upah. Tingkat upah di daerah tujuan cenderung menurun, dan daerah asal cenderung naik.

5. Sture Oberg (1993)

Oberg mengatakan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi migrasi tenaga kerja dimasa mendatang selain tergantung dari karakteristik/perilaku migrant yang bersangkutan, juga tergantung dari faktor-faktor pendorong dan penarik. Dari analisis yang dilakukan Oberg pada daerah miskin dan kaya yang memiliki perbedaan tingkat kesejahteraan memperlihatkan bahwa faktor-faktor pendorong yang menyebabkan seseorang bermigrasi dibedakan menjadi 2 (dua) aspek, yaitu faktor pendorong yang kuat (*hard push faktor*) dan yang lemah (*soft push faktor*). Faktor pendorong yang kuat adalah karena peperangan

(*war*), kelaparan dan lingkungan yang tidak aman (*environment catastrophes*). Sedangkan faktor-faktor pendorong yang lemah antara lain: perselisihan etnik (*persecution*), kemiskinan (*poverty*), dan keterasingan dan lingkungan sosial (*social loneliness*).

6. Lary A. Sjaastad

Sjaastad (1962) mengatakan migrasi merupakan suatu investasi modal manusia, dalam hal ini migrant sebelum melakukan perpindahan pekerjaan ke daerah lain terlebih dahulu mempersiapkan diri, seperti investasi modal manusia, pertimbangan terhadap keluarga dan sanak saudara yang ditinggalkan, serta biaya psikis yang tidak dapat dihitung dengan uang.

7. Everett S. Lee

Ada 4 faktor yang menyebabkan orang mengambil keputusan untuk melakukan migrasi, yaitu:

- a. Faktor-faktor yang terdapat di daerah asal,
- b. Faktor-faktor yang terdapat di tempat tujuan,
- c. Rintangan-rintangan yang menghambat, dan
- d. Faktor-faktor pribadi.

Di setiap tempat asal ataupun tujuan, ada sejumlah faktor yang menahan orang untuk tetap tinggal di situ, dan menarik orang luar untuk pindah ke tempat tersebut; ada sejumlah faktor negatif yang mendorong orang untuk pindah dari tempat tersebut; dan sejumlah faktor netral yang tidak menjadi masalah dalam keputusan untuk migrasi. Selalu terdapat sejumlah rintangan yang dalam keadaan-keadaan tertentu tidak seberapa beratnya, tetapi dalam keadaan lain dapat diatasi. Rintangan-rintangan itu antar lain adalah mengenai jarak, walaupun rintangan "jarak" ini meskipun selalu ada, tidak selalu menjadi faktor penghalang. Rintangn-rintangan tersebut mempunyai pengaruh yang berbeda-beda pada orang-orang yang mau pindah. Ada orang yang memandang rintangan-rintangan tersebut sebagai hal sepele, tetapi ada juga yang memandang sebagai hal yang berat yang menghalangi orang untuk pindah. Sedangkan faktor dalam pribadi mempunyai peranan penting karena faktor-faktor nyata yang terdapat di tempat asal atau tempat tujuan belum merupakan faktor utama, karena pada akhirnya kembali pada tanggapan seseorang tentang faktor tersebut, kepekaan pribadi dan kecerdasannya.

8. Lewis Ranis-Fei

Teori migrasi lainnya menekankan analisisnya terhadap faktor ekonomi adalah teori Lewis Ranis-Fei, yang menjelaskan proses terjadinya perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian (tradisional) ke sektor industri (*modern*). Teori ini memperbaiki teori Lewis. Sektor tradisional pada dasarnya berada di daerah pedesaan sedangkan sektor modern berada di daerah perkotaan. Teori ini berpandangan bahwa adanya kelebihan tenaga kerja di sektor pertanian, sementara itu di sektor industri terdapat kesempatan kerja yang cukup banyak, sehingga memotivasi para pekerja untuk pindah ke sektor modern dan berakibat terjadinya proses migrasi desa-kota. Hal ini tidak terlepas sebagai akibat terjadinya perbedaan dalam tingkat produktivitas antara kedua sektor tersebut, yang didalam kenyataannya menunjukkan produktivitas di sektor industri juga lebih tinggi dibandingkan dengan produktivitas di sektor pertanian. Selanjutnya hal ini memberikan implikasi perbedaan upah yang cukup mencolok antara sektor industri dan pertanian.

9. Ravenstein

Ravenstein mengemukakan hukum-hukum tentang migrasi, walaupun pada perkembangannya dikritik oleh N.A Humprey yang menyatakan bahwa migrasi tidak memiliki hukum sama sekali, hal serupa juga dikemukakan Stephen Bourne. Hukum migrasi yang dikemukakan Ravenstein ialah:

a. Migrasi dan Jarak

- 1) Banyak migran pada jarak yang dekat.
- 2) Migran jarak jauh lebih tertuju ke pusat perdagangan dan industri yang penting.
- 3) Migrasi Bertahap.
- 4) Adanya arus migrasi yang terarah.
- 5) Adanya migrasi dari desa - kota kecil -kota besar.
- 6) Setiap arus migrasi utama menimbulkan arus balik penggantinya.

b. Perbedaan antara desa dan kota mengenai kecenderungan melakukan migrasi

- 1) Di desa lebih besar dari pada kota besar.
- 2) Arus dan Arus balik.
- 3) Wanita melakukan migrasi pada jarak yang dekat dibandingkan pria.
- 4) Teknologi dan migrasi.

- 5) Teknologi menyebabkan migrasi meningkat.
- 6) Motif ekonomi merupakan dorongan utama melakukan migrasi.

BAB XI

Peranan Sektor Pertanian terhadap Pembangunan Ekonomi

Pembangunan pertanian dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan sosial. Implementasinya tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan status dan kesejahteraan petani saja, tetapi juga sekaligus untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya, lingkungan, maupun melalui perbaikan, pertumbuhan, dan perubahan.

Pengertian pembangunan pertanian menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

- 1) Pembangunan pertanian menurut (Lynn, 2003) adalah bagian utuh dari pembangunan. Industri harus menyediakan barang untuk petani. Lapangan kerja non pertanian perlu untuk mempertahankan keluarga di daerah pedesaan. Produksi pangan harus konsisten dengan selera konsumen.
- 2) Pembangunan Pertanian menurut M. Dawam Rahardjo, pengamat dan peneliti sosial, Rektor Universitas Islam 45 (Unisma) Bekasi. Menurutnya, pembangunan pertanian diletakkan pada skala prioritas teratas. Pertanian telah dijadikan dasar pembangunan nasional yang menyeluruh. Disadari bahwa perkembangan pertanian merupakan prasyarat industrialisasi yang akan menjadi tulang punggung perekonomian nasional yang tangguh.
- 3) Definisi pembangunan pertanian yang dikemukakan oleh Schultink, pembangunan pertanian merupakan upaya-upaya pengelolaan sumber daya alam untuk memastikan kapasitas produksi pertanian jangka panjang dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui pilihan-pilihan pendekatan yang ramah terhadap lingkungan.

- 4) Dalam konteks Indonesia, yang dimaksud dengan pembangunan pertanian adalah upaya-upaya yang diarahkan untuk meningkatkan: ketersediaan dan kualitas infrastruktur pertanian dan pedesaan, menciptakan struktur kepemilikan lahan pertanian yang lebih baik dan lebih adil, menciptakan ketahanan pangan dan ketahanan energi, meningkatkan kesejahteraan petani, masyarakat pedesaan dan masyarakat keseluruhan serta mengurangi disparitas kesejahteraan masyarakat pedesaan dan perkotaan.

Keseluruhan hal di atas dilakukan dengan pendekatan yang ramah lingkungan sehingga tidak mengurangi kapasitas produktif jangka panjang dari basis sumber daya pertanian yang kita miliki.

A. PERANAN SEKTOR PERTANIAN DALAM PEREKONOMIAN

Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi sangat penting karena sebagian besar penduduk di negara-negara miskin menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut. Mayoritas negara sedang berkembang (NSB) mengandalkan sektor pertanian untuk kebutuhan negara mereka. Ada perkecualian seperti Malaysia dan Saudi Arabia. Kedua negara ini, yang kaya akan sumber daya alam untuk ekspor (timah dan minyak), mempunyai cadangan devisa yang banyak untuk mengimpor kebutuhan-kebutuhan pangan mereka.

Ukuran sektor pertanian menjadikan sektor ini mempunyai peranan yang penting dalam penyediaan input, yaitu tenaga kerja, bagi sektor industri dan sektor modern lainnya. Di sisi lain, sektor pertanian juga dapat digunakan sebagai sumber modal utama bagi pertumbuhan ekonomi modern. Modal berasal dari tabungan yang diinvestasikan dan tabungan berasal dari pendapatan. Di negara-negara miskin, pangsa pendapatan pertanian terhadap produk nasional mencapai 50%. Berarti separuh atau lebih dari produk nasional disumbangkan oleh sektor non-pertanian, terutama industri dan perdagangan. Sektor-sektor ini merupakan penyumbang penting bagi tabungan yang akhirnya digunakan untuk investasi.

Pentingnya peran sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi suatu negara juga dikemukakan oleh Meier (1995) sebagai berikut :

1. Dengan suplai makanan pokok dan bahan baku bagi sektor lain dalam

ekonomi yang berkembang

2. Dengan menyediakan surplus yang dapat diinvestasikan dari tabungan dan pajak untuk mendukung investasi pada sektor lain yang berkembang
3. Dengan memberi barang konsumsi dari sektor lain, sehingga akan meningkatkan permintaan dari penduduk pedesaan untuk produk dari sektor yang berkembang, dan
4. Dengan menghapuskan kendala devisa melalui penerimaan devisa dengan ekspor atau dengan menabung devisa melalui substitusi impor.

Negara Indonesia, terkenal sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Pembangunan pertanian di Indonesia dianggap sangat penting dibandingkan dengan keseluruhan pembangunan ekonomi, apalagi semenjak sektor pertanian ini menjadi penyelamat perekonomian nasional karena justru pertumbuhannya meningkat, sementara sektor lain pertumbuhannya negatif. Beberapa alasan yang mendasari pentingnya pertanian di Indonesia :

1. potensi sumber dayanya yang besar dan beragam,
2. pangsa terhadap pendapatan nasional cukup besar,
3. besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, dan
4. menjadi basis pertumbuhan di pedesaan.

Potensi pertanian yang besar namun mayoritas petani termasuk golongan miskin. Hal ini sangatlah ironis, sehingga mengindikasikan bahwa pemerintah bukan saja kurang memberdayakan petani tetapi sektor pertanian secara keseluruhan.

B. SYARAT-SYARAT PEMBANGUNAN PERTANIAN

Menurut A.T. Mosher (1965) ada beberapa syarat supaya pembangunan pertanian dikembangkan dengan baik. Mosher mengelompokkan syarat-syarat pembangunan tersebut menjadi dua, yaitu syarat-syarat mutlak dan syarat-syarat pelancar.

1. Syarat-syarat Mutlak

a. Adanya pasar untuk hasil-hasil tani

Pembangunan pertanian akan meningkatkan produksi atas hasil usaha

tani. Hasil-hasil ini akan dipasarkan dan dijual dengan harga yang cukup tinggi untuk menutupi biaya dan tenaga yang dikeluarkan para petani sewaktu memproduksinya. Dalam memasarkan hasil pertanian, diperlukan adanya permintaan (*demand*) akan hasil-hasil pertanian tersebut, sistem pemasaran, dan kepercayaan para petani pada sistem pemasaran tersebut.

b. Teknologi yang senantiasa berkembang

Peningkatan produksi pertanian dapat dilakukan dengan memakai cara baru atau pelibatan teknologi dalam pengolahannya. Di dalamnya termasuk cara-cara bagaimana para petani menyebarkan benih, memelihara tanaman dan memungut hasil serta memelihara ternak. Termasuk dalam hal benih, pupuk, obat pemberantas hama, alat-alat, dan sumber-sumber tenaga. Selain itu juga termasuk jenis-jenis usaha oleh para petani agar dapat menggunakan tenaga dan tanah mereka sebaik mungkin.

Agar pembangunan pertanian dapat berjalan secara kontinyu, sektor ini harus dinamis. Apabila perubahan ini terhenti, maka pembangunan pertanian pun akan terhenti. Produk terhenti kenaikannya, bahkan dapat menurun karena merosotnya kesuburan atau karena kerusakan yang semakin meningkat oleh hama penyakit.

c. Tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal

Pembangunan pertanian memerlukan ketersediaan bahan-bahan dan alat-alat produksi seperti bibit, pupuk, obat-obatan pemberantasan hama, makanan, dan obat ternak. Ketersediaannya di berbagai tempat dalam jumlah yang cukup banyak untuk memenuhi keperluan tiap petani yang hendak menggunakannya.

d. Adanya perangsang produksi bagi petani

Dalam meningkatkan produksi, petani membutuhkan adanya ransangan yang nyata. Salah satunya adalah harga hasil produksi pertanian yang menguntungkan, pembagian hasil yang wajar, dan ketersediaannya barang-barang dan jasa bagi para petani untuk keluarganya.

e. Tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinu

Syarat mutlak kelima adalah tersedianya sarana pengangkutan. Tanpa tersedianya sarana pengangkutan yang efisien dan murah, maka keempat syarat

mutlak lainnya tidak dapat berjalan dengan efektif, karena produksi pertanian harus terdistribusi secara luas. Oleh karena itu, diperlukan suatu jaringan pengangkutan yang bercabang luas.

2. Syarat-syarat Pelancar

a. Pendidikan pembangunan

Pendidikan pembangunan dapat difokuskan pada pendidikan non-formal berupa kursus-kursus, latihan-latihan, penyuluhan-penyuluhan, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas.

b. Kredit produksi

Lembaga-lembaga perkreditan yang memberikan kredit produksi kepada para petani merupakan suatu faktor pelancar yang penting bagi keberhasilan pembangunan pertanian. Hal ini disebabkan karena dalam peningkatan produksi, para petani akan lebih banyak mengeluarkan uang untuk membeli bibit unggul, obat-obatan pemberantasan hama, pupuk, dan alat pertanian lainnya. Pengeluaran tersebut harus dibiayai dari tabungan atau dengan meminjam untuk jangka waktu antara saat bahan-bahan produksi dan peralatan itu dibeli dan saat hasil panen dapat dijual.

c. Kegiatan gotong royong petani

Kegiatan gotong royong petani biasanya dilakukan secara informal. Para petani bekerja sama dalam tahap penanaman, memanen hasil panen, membantu tetangga petani yang sedang sakit, maupun bersatu dalam menanggulangi bencana-bencana yang mendadak, seperti: banjir, angin topan, serangan hama, dan sebagainya.

d. Perbaikan dan perluasan tanah pertanian

Ada dua cara tambahan untuk mempercepat pembangunan pertanian, yaitu dengan cara memperbaiki mutu tanah yang telah menjadi usaha tani, misalnya dengan pupuk, irigasi, dan pengaturan pola tanam. Cara kedua adalah mengusahakan tanah baru, misalnya pembukaan petak-petak sawah baru (ekstensifikasi).

e. Perencanaan nasional pembangunan pertanian

Perencanaan pertanian adalah proses memutuskan apa yang hendak

dilakukan pemerintah mengenai tiap kebijakan dan kegiatan yang memengaruhi pembangunan pertanian selama jangka waktu tertentu. Penentuan dan pemilihan prioritas yang dilakuakn oleh pemerintah merupakan ciri khusus perencanaan.

C. KEBIJAKAN PERTANIAN DI INDONESIA

Kebijakan pertanian merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memajukan pertanian, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif, produksi dan efisiensi produksi naik, tingkat hidup petani lebih tinggi, dan kesejahteraan menjadi lebih merata.

1. BIMAS (Bimbingan Massal) dan INMAS (Intensifikasi Massal)

Bimas merupakan suatu sistem penyuluhan kepada petani ke arah usaha tani yang lebih baik dan lebih maju, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dari hasil taninya. Bimbingan tersebut dilaksanakan secara masal karena yang hendak dicapai adalah peningkatan produksi dan penadapatan yang sangat besar (8 sampai 10 persen per tahun). Selain itu apabila pembimbingan secara perseorangan akan sangat lambat dan mahal.

Istilah Bimas mulai dipakai secara resmi pada tahun 1967/1968 yaitu pada saat pemerintah ingin melaksanakan intensifikasi padi pada sawah seluas 1.000.000 ha dengan menerapkan sistem panca usaha tani, sebelum itu dipakai istilah Demas (Demokrasi Massal) yang berawal dari proyek peningkatan produksi padi di Karawang (1963) pada sawah seluas 100 ha.

Sedangkan program Inmas merupakan program intensifikasi padi dengan fasilitas penyuluhan yang sama dengan Bimas tetapi tanpa kredit. Daerah Inmas mencakup daerah persawahan yang memenuhi semua syarat teknik Bimas (antara lain sawah yang beririgasi teknis atau setengah teknis). Tetapi petaninya dianggap sudah cukup maju, sehingga tanpa kredit pemerintah pun, mereka diharapkan mampu melaksanakan penerapan panca usaha secara lengkap. Pengaturan dan pengelolaan program Bimas dan Inmas ini dilakukan oleh organisasi yang sama, yaitu organisasi Bimas.

Ada dua pendapat yang menilai tentang manfaat dan efektivitas organisasi Bimas. Pertama, kesan bahwa dengan pola organisasi Bimas ternyata program

intensifikasi padi dapat menuai kesuksesan, meskipun dalam Pelita II, kenaikan hasil per hektar cenderung mulai menurun meskipun pada Pelita I peningkatan produksi padi merupakan program yang mendapat prioritas tertinggi. Kedua, bertitik tolak pada anggapan bahwa kelebihan organisasi Bimas pada sifatnya sebagai organisasi pendobrak untuk mempercepat pengenalan teknologi baru yang dilandasi penggunaan bibit unggul dan pupuk. Keberhasilan program Bimas di dalam peningkatan produksi beras tidak perlu diragukan lagi, tetapi ternyata keberhasilan tersebut tidak diimbangi oleh keberhasilan di bidang produksi bahan pangan lainnya.

2. Kebijakan Kredit Pertanian

Ketika petani mengalami kegagalan dalam bertani, mereka akan berusaha untuk mencari sumber pendapat lain yang dapat dengan segera mengatasi kesulitannya tersebut. Salah satu sumber pendapatan tersebut berasal dari lembaga-lembaga perkreditan yang ada di perdesaan. Seorang ahli mengatakan bahwa lembaga perkreditan ini berperan bukan saja sebagai lambang ikatan antara golongan yang punya dan tidak, tetapi ada kalanya merupakan satu bentuk tenggang rasa yang dimanifestasikan dalam bentuk barang.

Beberapa program perkreditan seperti Lembaga Perkreditan Rakyat (LPR), KUD, KIK, KMKP, dan KCK bertujuan memberikan bantuan modal kepada pengusaha kecil agar lebih termotivasi dalam meningkatkan kegiatannya. Selain itu, semua bentuk perkreditan yang ada diharapkan dapat dinikmati secara merata oleh semua lapisan masyarakat, terutama bagi golongan petani kecil dan golongan ekonomi lemah, sehingga dapat mengurangi ketergantungan mereka terhadap lembaga-lembaga perkreditan informal (misalnya rentenir, tukang kredit barang, petani kaya, dan lain-lain) dengan bunga yang relatif tinggi.

3. Kebijakan harga dasar dan Harga Tinggi

a. Kebijakan Harga Minimum

Pada tahun 1968, lahir konsep kebijakan harga dasar (*floor price*) dengan nama “rumus tani”. Rumus tani ini merupakan sebuah konsep kebijakan yang memerhatikan hubungan antara dua unsur sarana produksi yang terpenting, yaitu pupuk dan harga hasil produksi. Atau dengan kata lain, rumus tani adalah satu pedoman perhitungan dalam membandingkan harga beras yang dijual

oleh petani dengan harga pupuk yang dibeli. Rumus tani ini telah mencerminkan definisi harga adsar yang telah disarankan oleh Saleh Afiff dan Mears. Karena pupuk pada saat itu (1968) hampir semuanya harus diimpor, sehingga harga beras yang dianggap “wajar” adalah sebagai berikut :

$$P = \frac{1.5 AB}{2}$$

di mana :

P = harga minimum padi yang diproduksi (Rp per kilogram)

A = harga CIF pupuk urea yang diimpor (dalam dolar AS)

B = kurs BE (pasar bebas) yang berlaku dalam rupiah per dolar AS

Dalam rumus tersebut terdapat angka satu setengah yang berarti bahwa harga pupuk urea dalam rupiah di pelabuhan (CIF) harus dikalikan satu setengah karena harus ditambah dengan ongkos pengangkutan dan biaya-biaya pelabuhan. Angka pembagi dua menyatakan perbandingan antara padi dan beras, artinya dua kilogram padi kering sama dengan satu kilogram beras.

Secara objektif rumus tersebut masih memiliki kekurangan, diantaranya karena tidak memerhatikan faktor harga beras internasional dan perbedaan yang mungkin ditimbulkan di antara satu daerah dengan daerah lainnya mengingat begitu besarnya perbedaan antar daerah (baik geografis maupun demografis) di Indonesia.

b. Kebijakan Harga Tertinggi

Kebijakan harga biasanya ditujukan untuk dua belah pihak, yaitu produsen dan konsumen. Salah satu tugas pemerintah dimanapun mereka berada dan dalam sistem ekonomi apapun adalah mengupayakan agar rakyat dapat memenuhi kebutuhannya, terutama kebutuhan pokoknya. Dalam kebijakan harga, pemerintah berkewajiban agar harga-harga kebutuhan pokok rakyat terjangkau oleh daya beli mereka. Dalam hal kebutuhan seperti beras misalnya, pemerintah mempunyai pedoman harga tertinggi (*celling price*) yang dianggap wajar, sehingga pemerintah mengupayakan agar harga tersebut tidak dilampaui.

Upaya untuk menetapkan harga maksimum (*celling price*) ini dilakukan pemerintah dengan berbagai cara, misalnya dengan kebijakan pengadaan, dengan pemberian subsidi harga atau dengan kebijakan-kebijakan lainnya yang pada prinsipnya bertujuan sama. Perlindungan harga yang berwujud subsidi ini

tidak hanya terjadi pada beras, tetapi juga pada komoditas-komoditas lainnya, seperti tepung, gandum, pupuk.

BAB XII

Peranan Sektor Industri Terhadap Pembangunan Ekonomi

A. KONSEP INDUSTRI

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri dapat berupa barang atau jasa.

1. Klasifikasi Industri

Berikut ini beberapa klasifikasi industri berdasarkan beberapa kriteria :

a. Penggolongan Industri berdasarkan ISIC

- 1) industri makanan, minuman tembakau;
- 2) industri tekstil, pakaian jadi, dan kulit;
- 3) industri kayu dan peralatan-peralatan dari kayu termasuk perabotan rumah tangga;
- 4) industri kertas dan barang-barang dari kertas, percetakan dan penerbitan;
- 5) industri kimia dan barang-barang dari kimia, batu bara, minyak, dan plastik;
- 6) industri bahan galian, barang logam, kecuali minyak dan batu bara;
- 7) industri logam dasar;
- 8) industri dari barang logam mesin dan peralatannya;
- 9) industri pengolahan lainnya.

b. Berdasarkan keperluan perencanaan anggaran

- 1) Subsektor pengolahan non migas
 - 2) Subsektor pengilangan minyak bumi
 - 3) Subsektor pengolahan gas alam cair
- c. Berdasarkan pengembangan sektor industrialisasi
- 1) Industri hulu, yang terdiri atas industri kimia dasar; mesin, logam dasar dan elektronik.
 - 2) Industri hilir, yang terdiri atas aneka industri dan industri kecil.
- d. Berdasarkan besar kecilnya sektor usaha
- 1) Menurut BPS
 - a) Industri besar (bepekerja 100 lebih)
 - b) Sedang (bepekerja 20-99)
 - c) Kecil (bepekerja 5-19)
 - d) Rumah tangga (bepekerja kurang dari 5)
 - 2) Menurut BI
 - a) Perusahaan besar (asset>600juta)
 - b) Perusahaan kecil (asset<600juta)
- e. Berdasarkan tempat bahan baku
- 1) Industri ekstraktif
 - 2) Industri non ekstraktif
 - 3) Industri fasilitatif
- f. Berdasarkan besarnya modal
- 1) Industri padat karya
 - 2) Industri padat modal
- g. Berdasarkan pemilihan lokasi
- 1) Menitikberatkan pasar
 - 2) Menitikberatkan pekerja
 - 3) Menitikberatkan bahan baku

2. Sasaran Industri

Di bawah ini merupakan sasaran industri yang dirancang pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Tabel 12.1 Sasaran Industri

JANGKA MENENGAH 2004-2009	OUTPUT YANG DIHARAPKAN
1. Tumbuhnya industri yang mampu menciptakan lapangan kerja yang besar.	1. Teratasinya masalah pengangguran di sektor industri.
2. Selesainya program revitalisasi, konsolidasi dan restrukturisasi Industri.	2. Pulihnya kehidupan industri yang semula terpuruk akibat krisis.
3. Teroptimalkannya pasar dalam negeri dalam rangka pembangunan industri komponen lokal dan industri pengolahan sumber daya alam lainnya.	3. Meningkatnya kandungan lokal, khususnya penggunaan bahan baku dan komponen.
4. Semakin meningkatnya daya saing industri berorientasi ekspor.	4. Meningkatnya ekspor secara signifikan.

<p>5. Tumbuhnya industri-industri potensial yang akan menjadi kekuatan penggerak pertumbuhan industri di masa depan.</p>	<p>5. Terbangunnya pilar-pilar industri masa depan.</p>
<p>6. Tumbuh berkembangnya IKM, khususnya industri menengah sekitar tiga kali lebih cepat daripada industri kecil.</p>	<p>6. Semakin kuatnya struktur industri.</p>
<p>JANGKA PANJANG (2010-2025)</p>	
<p>OUTPUT YANG DIHARAPKAN</p>	
<p>7. Kuatnya basis industri manufaktur sehingga menjadi World Class Industry.</p>	<p>Indonesia menjadi Negara Industri Maju Baru dengan konsep industri berkelanjutan.</p>
<p>8. Kuatnya industri penggerak pertumbuhan ekonomi.</p>	

9. Meningkatnya sumbangan IKM terhadap PDB dibandingkan dengan sumbangan industri besar.	
10. Kuatnya jaringan kerja sama (networking) antara IKM dan industri besar.	

B. KEBIJAKAN SEKTOR INDUSTRI

Kebijakan sektor industri adalah suatu kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan efisiensi industri dan persaingan. Selain itu juga regenerasi industri dan perluasan serta penciptaan lapangan kerja. Kebijakan industri juga mencakup kebijakan meningkatkan persaingan dan mempromosikan pembangunan regional serta langkah-langkah kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dan penggunaan teknologi baru. Membangun sektor industri ditujukan supaya industri mampu berkembang dalam arena persaingan seperti saat ini dan sekaligus menjadikan penggerak perekonomian nasional di masa depan, maka sektor industri perlu memiliki daya saing yang tinggi. Daya saing dalam hal ini mencakup kuatnya struktur, tingginya peningkatan nilai tambah dan produktivitas di sepanjang rantai nilai produksi, dan dukungan dari seluruh sumber daya produktif.

C. PERANAN SEKTOR EKONOMI TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI

Pembangunan ekonomi merupakan pilar penting bagi terselenggaranya proses pembangunan di segala bidang dalam suatu negara. Apabila pembangunan ekonomi suatu bangsa berhasil, maka bidang-bidang lain seperti bidang hukum, politik, pertanian, dan lain-lain akan sangat terbantu. Proses industrialisasi dan pembangunan industri merupakan satu jalur kegiatan untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti tingkat hidup yang lebih maju maupun taraf hidup yang lebih bermutu. Dengan kata lain pembangunan industri itu merupakan suatu fungsi dari tujuan pokok kesejahteraan rakyat bukan merupakan kegiatan yang mandiri untuk hanya sekedar mencapai fisik saja.

Peranan industri ditinjau dari aspek kesempatan kerja dapat dilihat dari bagian persentase angkatan kerja yang dalam sektor industri. Sektor Industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Kontribusi sektor Industri terhadap pembangunan nasional dari tahun ke tahun menunjukkan kontribusi yang signifikan.

D. PERANAN SEKTOR INDUSTRI DI NEGARA SEDANG BERKEMBANG

Peranan sektor industri sangat penting bagi semua negara terutama negara sedang berkembang. Berikut ini peranan sektor industri di negara sedang berkembang :

1. Sebagai mesin pembangunan. Sektor Industri memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sektor lain karena nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar, juga kemampuan menciptakan nilai tambah (*value added creation*) dari bahan dasar input yang diolah.
2. Pada negara berkembang, peranan sektor industri juga menunjukkan kontribusi yang semakin tinggi. Hal ini menyebabkan perubahan struktur perekonomian negara yang bersangkutan.

E. PERDAGANGAN

Menurut Boediono (1992), perdagangan dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain, bukan antar suatu negara dengan negara lain. Penduduk yang dimaksud bisa warga biasa (*individu*), bisa sebuah perusahaan ekspor-impor, bisa perusahaan industri dan perusahaan negara. Perdagangan luar negeri hanyalah istilah kependekan dari kegiatan pertukaran antar penduduk suatu negara dengan penduduk di negara lain.

Perdagangan atau pertukaran dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai

proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Tidak terlepas dari empat mainstream besar pemikiran, yaitu teori ekonomi Klasik (liberal), Marksian, Keynesian dan Neoliberal. Perdagangan sudah menjadi isu penting sejak zaman para filsuf. Thomas Mun dan Jaen Baptist Colbert (tokoh merkantilisme) menyatakan bahwa kemajuan dan kemakmuran negara kebangsaan (*nation state*) bersangkutan dengan adanya surplus ekspor barang diatas impor dalam perdagangan luar negeri. Mazhab Physiokrasi yaitu Francois Quesney (Perancis) dan A. S. J. Turgot mengemukakan bahwa kegiatan ekonomi berjalan menurut suatu pola arus lingkaran (*circular flow*) yang menyangkut peredaran barang dan peredaran uang dimana mazhab ini mengutamakan sektor pertanian.

1. Teori Modern

a. Teori Heckscher-Ohlin (H-O)

Teori ini menjelaskan mengenai pola perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara. Menurut Ohlin, negara cenderung untuk mengekspor barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah secara intensif. Negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi.

b. Paradoks Leontif

Paradoks Leontif terjadi karena :

- 1) Intensitas faktor produksi yang berkebalikan
- 2) Tariff and Non tariff barrier
- 3) Perbedaan dalam skill dan human capital
- 4) Perbedaan dalam faktor sumber daya alam

Kelebihan dari teori ini adalah jika suatu negara memiliki banyak tenaga kerja terdidik maka ekspornya akan lebih banyak. Sebaliknya jika suatu negara kurang memiliki tenaga kerja terdidik maka ekspornya akan lebih sedikit.

c. Teori *Offer Curve/Reciprocal Demand* (OC/RD)

Kurva yang menunjukkan kesediaan suatu negara untuk menukarkan suatu barang dengan barang lainnya pada berbagai kemungkinan harga. Kelebihan dari *offer curve* yaitu masing-masing negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional yaitu mencapai tingkat kepuasan yang lebih

tinggi.

Dari semua teori itu akan bermuara kepada penentuan comparative advantage dan pola perdagangan (*trade pattern*) suatu negara. Kualitas sumber daya manusia dan teknologi adalah dua faktor yang selalu diperlukan untuk dapat bersaing di pasar internasional.

2. Klasifikasi Perdagangan

Perdagangan diklasifikasikan menjadi beberapa bagian yang disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 12. 1 Klasifikasi Perdagangan

3. Peran Perdagangan terhadap Pembangunan Ekonomi

Secara umum, peran perdagangan terhadap pembangunan ekonomi antara lain sebagai berikut :

- a. Memperbesar kapasitas konsumsi suatu negara.
- b. Meningkatkan output dunia.
- c. Tingkat pembangunan yang lebih tinggi.
- d. Pemerataan pendapatan.

BAB XIII

Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Pembangunan yang hanya bertumpu pada aspek ekonomi saja telah menimbulkan degradasi lingkungan yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia. Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan tanpa memerhatikan pelestarian lingkungan menyebabkan masalah lingkungan yang nyata seperti: rusaknya hutan, perusakan tanah dan lahan, pengurangan keanekaragaman hayati, serta makin langkanya air. Degradasi lingkungan akan menurunkan kualitas hidup manusia, menurunkan produktivitas dan pada akhirnya akan menyusutkan laju pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Oleh karena itu konsep pertumbuhan berkesinambungan yang ramah terhadap lingkungan merupakan salah satu definisi yang paling fundamental dalam pembangunan ekonomi sendiri (Todaro,2000).

A. KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Paradigma pertumbuhan atau ekonomi murni memandang pembangunan nasional identik dengan pembangunan ekonomi. Tujuan pembangunan nasional adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya. Pembangunan ekonomi dipandang sebagai, fungsi *saving ratio*, *capital output ratio* dan strategi investasi. Peranan pemerintah dalam hal ini, adalah memperbesar saving ratio setinggi-tingginya, dan menekan capital output ratio, untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya. Paradigma ini sangat berorientasi pada produksi, fokus dan prioritas utamanya adalah pada *growth generating sectors*. Mekanisme pasar menjadi tumpuan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi.

Paradigma ini telah membawa banyak negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara ke dalam keberhasilan pembangunan ekonomi. Namun dalam realita keberhasilan paradigma pertumbuhan mencapai pertumbuhan ekonomi yang

tinggi, telah membawa berbagai akibat yang negatif. Tujuan pembangunan dapat dicapai namun dibarengi dengan pengorbanan (*at the expense*) deteriorasi ekologis, penyusutan sumber alam, timbulnya kesenjangan sosial, dan dependensi. Kritik-kritik tajam, ditujukan pada paradigma ini. Sejumlah pemikir di *Massachusetts Institute of Technology* dan *Club of Rome*, misalnya memperingatkan bahwa kalau laju pertumbuhan/pembangunan dunia dan penambahan penduduk dunia tetap seperti ini, maka pada suatu ketika akan tercapai batas ambang (*thresh-old*) pertumbuhan, dan akan terjadi kehancuran planet bumi sebagai suatu sistem. Mereka berpendapat bahwa dalam satu abad, batas ambang pertumbuhan akan tercapai. Pandangan yang dapat kita kategorikan sebagai *Neo Malthusian Perspective* ini pada hakikatnya mengajukan teori tentang integrasi jangka panjang antara penduduk, sistem ekonomi dan sumber alam.

Cendekiawan MIT dan *Club of Rome* mengajukan bahwa pada hakikatnya kita telah menemukan landasan pemikiran untuk berkembang dari perspektif ekologi yang kemudian dikenal dengan pemikiran tentang *sustained development*, atau pembangunan berkelanjutan. Namun kritik juga datang dari para pendukung paradigma pembangunan lain, yang melihat bahwa paradigma pertumbuhan cenderung menciptakan efek negatif tertentu yang akibatnya menurunkan derajat keberlanjutan pembangunan. Kedua kritik terhadap pembangunan yang berorientasi pada pembangunan pertumbuhan pada akhirnya melahirkan saran dalam bentuk diintegrasikannya *sustainability* atau keberlanjutan sebagai salah satu tujuan yang harus direalisasi melalui proses pembangunan.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa telah terjadi pergeseran orientasi pembangunan dari orientasi pertumbuhan ke orientasi pembangunan yang lain, seperti orientasi kesejahteraan, neo-ekonomi, humanizing, dan lain-lain. Namun dari apa yang diuraikan di atas tadi juga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan penekanan dalam interpretasi konsep *sustainability*. Interpretasi pertama lahir dari pemikiran kaum *environmentalist* yang lebih menekankan perhatian pada efek pembangunan pada "*word system*", atau planet bumi kita, dan menghendaki agar interaksi antar manusia dan lingkungannya dalam proses pembangunan memerhatikan keberlanjutan pembangunan dan kelangsungan "*word system*". Sedangkan interpretasi kedua menekankan perlunya dalam interaksi antara manusia dan proyek, memerhatikan *profecty sustainability*

(Moelyarto, 1996). Konsep sustainability yang dicetuskan oleh kaum environmentalist berawal pada sikap keprihatinan mereka terhadap konsekuensi jangka panjang dari adanya tekanan yang eksekif terhadap daya dukung alami (*natural support system*).

Pembangunan Berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan idealisme yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya memberikan keuntungan ekonomis jangka panjang tetapi juga kelestarian lingkungan hidup yang tidak ternilai harganya. Hal ini berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan efisien. Pembangunan berkelanjutan juga memerhatikan keberlanjutan pemanfaatannya tidak hanya untuk generasi saat ini tetapi juga untuk generasi mendatang. Dalam *Brundtland Commission Report* yang berjudul *Our Common Future* (Djaja diningrat, 1990.p.3) dijelaskan batasan sustainable development sebagai berikut:

"Sustainable development is defined as development that meet the needs of the present Without compromising the ability of future generation to meet their own needs"

Sustainable development atau pembangunan berlanjutan ini mungkin diwujudkan melalui keterkaitan (*interleinkages*) yang tepat antara alam, aspek sosio ekonomis, dan kultur. *Sustainable development* bukanlah suatu situasi harmoni yang tetap dan statis, akan tetapi merupakan proses perubahan dimana, eksploitasi sumber alam, arah investasi, orientasi perkembangan teknologi, perubahan kelembagaan konsisten dengan kebutuhan pada saat ini dan masa datang. Demikian pula, perkembangan penduduk perlu diperhatikan dalam mencapai keberlanjutan pembangunan, karenanya jumlah dan perkembangan penduduk haruslah dalam keseimbangan dengan perubahan *potensi produksi ecosystem* (Djajadiningrat, 1990,p.4).

Interpretasi lain sustainable development didorong oleh adanya kenyataan banyaknya bermunculan proyek-proyek pembangunan di negara-negara berkembang. Alokasi input yang berkesinambungan tidak menjamin proyek pembangunan itu berkembang dengan kekuatan sendiri. Dalam konteks ini, sustainable development dapat diartikan sebagai *"The ability of development project to generate sufficiently a net surplus as input fusther development"*.

Kedua interpretasi di atas menunjukkan hubungan yang optimal antara input dan output. Perbedaannya nampaknya terletak pada *level of analysis*-nya.

Interpretasi pertama lebih pada derajat makro, dan interpretasi kedua pada derajat mikro. Berdasarkan konsep di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana dengan memerhatikan keberlanjutan pemanfaatannya untuk generasi saat ini dan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia saat ini, tanpa mengurangi potensi pemenuhan kebutuhan dan aspirasi manusia pada masa mendatang. Konsep yang melihat pembangunan tidak hanya pada sisi ekonomi tetapi juga pada sisi sosial dan lingkungan hidup, hingga kini belum berhasil diterapkan di Indonesia. Selama ini boleh dibilang pembangunan hanya dilihat pada sisi ekonomi saja, sehingga lingkungan hidup semakin rusak. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan karena justru akan mengakibatkan kemunduran pembangunan. Konsep pembangunan ini bertumpu pada tiga pilar utama yaitu: pembangunan ekonomi, konservasi lingkungan dan sosial budaya. Ketiga pilar tersebut harus berjalan seimbang dan tidak terfokus pada salah satu faktor saja. Pada dasarnya istilah berkelanjutan mengacu pada pemenuhan kebutuhan generasi saat ini tanpa merugikan kebutuhan generasi di masa datang. Kualitas air, udara, tanah dan kesediaan sumber daya yang lain harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi di masa datang. Prinsip pembangunan berwawasan lingkungan pada dasarnya telah terakomodasi dalam GBHN: "Pendayagunaan sumber daya alam sebagai pokok kemakmuran rakyat dilakukan secara terencana, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta memerhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan ini bertujuan membangun kualitas SDM yang mampu menyelaraskan tanggung jawab moral dengan strategi pembangunan berwawasan lingkungan. Hal ini perlu ditegaskan mengingat adanya kecenderungan gaya hidup konsumtivisme, hingga bergesernya potensi fisik alami manusia akibat meluasnya pemanfaatan perangkat teknologi dalam proses pembangunan.

B. PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM KONSEP 1.PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Sebagian besar negara-negara yang menganut konsep kapitalisme berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi tanpa memerhatikan kelestarian lingkungan. Dengan kata lain dapat diungkapkan bahwa pada tingkat global kualitas lingkungan masih tetap menurun, sebagian besar manusia masih hidup jauh dari tingkat pemenuhan kebutuhan dan aspirasinya, sedang sebagian yang lain hidup di luar batas kemampuan lingkungan dan sumber daya alamnya. Kualitas lingkungan serta stok sumber daya alam yang menurun memberikan indikasi kegagalan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Beberapa negara memang mempunyai kantong-kantong dimana kualitas lingkungan meningkat. Namun pada umumnya, di negara-negara tersebut terjadi aliran masuk sumber daya alam dari negara-negara lain yang sumber daya alamnya terkuras. Hal ini dapat terjadi karena negara-negara tersebut mempunyai kapital, teknologi serta sumber daya manusia yang besar, kuat dan canggih.

Saat ini telah banyak dihasilkan konvensi-konvensi internasional untuk mengatasi degradasi lingkungan agar tidak bertambah buruk. Konvensi-konvensi tersebut antara lain : Konvensi Keragaman Hayati (CBD), Konvensi Perubahan Iklim (CITES), Konvensi Hukum Laut (UNCLOS), Konvensi Species Fauna dan Flora liar yang Terancam (CITES), Konvensi lahan basah (RAMSAR), Konvensi Lintas Basah Limbah (Basel Convention), Konvensi perlindungan Ozon (Montreal Protokol), dll. Pada tahun 1992 UNCED telah menghasilkan beberapa keputusan yaitu :

- a. Deklarasi Rio. Berisi 27 prinsip yang dapat diaplikasikan secara universal untuk menjamin perlindungan lingkungan dan pembangunan yang bertanggung jawab. Dimaksudkan sebagai "Hak-hak Asasi Lingkungan" (*Environmental Bill of Rights*). Pada deklarasi ini tertuang prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan prinsip "bersama tapi dengan tanggung jawab yang berbeda" (*common but differentiated responsibilities*).
- b. Kerangka Konvensi mengenai Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change*). Konvensi yang mengikat secara hukum dan ditandatangani oleh 154 negara tersebut bertujuan untuk menstabilkan

konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer sampai pada tingkat yang dapat mencegah campur tangan manusia yang berbahaya yang berkaitan dengan sistem iklim".

- c. Konvensi Keanekaragaman Hayati (*United Nations Convention on Biological Diversity*). Bertujuan untuk melestarikan beraneka sumber daya genetika/plasma nutfah, spesies, habitat dan ekosistem. Juga bertujuan untuk menjamin pemanfaatan secara berkelanjutan berbagai sumber daya hayati dan untuk menjamin pembagian manfaat keanekaragaman hayati secara adil. Hingga kini telah diratifikasi oleh 180 negara.
- d. Prinsip-prinsip Rio tentang Hutan (*Rio Forestry Principles*). Terdiri atas 15 prinsip yang secara hukum mengikat para pengambil keputusan di tingkat nasional dan internasional dalam rangka perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Meletakkan dasar-dasar proses untuk Konvensi Kehutanan Internasional (*International Forestry Convention*).

Proses pembangunan yang dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya, yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa untuk keperluan konsumsi, produksi maupun pembentukan kapital, akan menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat dan meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya. Dampak negatifnya, bahwa proses produksi dan konsumsi akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang perlu ditangani segera secara pasti. Gangguan ini sebagian dapat diatasi dengan penggunaan berbagai teknologi pencegah pencemaran lingkungan. Gangguan lain yang mendasar adalah pengaruhnya terhadap struktur ekosistem. Gangguan ini tidak mungkin dapat diatasi oleh kemampuan manusia. Gangguan semacam ini harus dihindarkan, sebab apabila tidak, hal itu merupakan gangguan terhadap kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain.

Oleh karena itu perlu diperhatikan pendekatan secara ekosistem dalam proses pembangunan agar supaya hal-hal yang merugikan masyarakat dapat dicegah atau dihindari, sehingga tujuan melestarikan lingkungan hidup bagi generasi mendatang dapat tercapai. Memanglah sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi/perkembangan ekonomi yang sekaligus melestarikan lingkungan. Akan tetapi bila dikaji lebih lanjut sebenarnya masyarakat memiliki

pengetahuan dasar serta daya untuk menanggulangnya. Bagaimanapun juga persoalan-persoalan selalu timbul dalam usaha melestarikan lingkungan. Hal itu disebabkan oleh:

- a. Bertambahnya pencemaran terhadap lingkungan itu hanyalah sedikit demi sedikit, sehingga tambahan berikutnya tidak berarti; ternyata manusia dapat tetap hidup.
- b. Adanya pihak-pihak yang menentang adanya kebijaksanaan terhadap lingkungan karena merasa bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dibatasi.
- c. Adanya pihak-pihak yang selalu berpegang pada hal-hal tradisional dan menentang adanya perubahan-perubahan.
- d. Adanya pihak-pihak yang menolak penggunaan insentif ekonomis untuk maksud--maksud perlindungan lingkungan dan menganggap hal tersebut sebagai hal yang amoral.

Pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pembangunan nasional, baik itu ditujukan untuk maksud-maksud produksi, maupun konsumsi, haruslah secara rasional. Artinya, penggalan sumber kekayaan alam harus diusahakan agar: (1) tidak merusak lingkungan manusia, (2) dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh, (3) dengan memperhitungkan kebutuhan generasi-generasi yang akan datang. Selanjutnya pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan pembangunan nasional harus dilakukan dengan memerhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Tetap memberikan kesempatan kerja yang banyak.
- b. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja.
- c. Menggunakan alat-alat yang sebanyak mungkin dihasilkan sendiri maupun dapat dipelihara sendiri.
- d. Mendukung tercapainya sasaran pembangunan.
- e. Mempertinggi keterampilan untuk menggunakan teknologi yang lebih maju di kemudian hari.

Dalam hal ini teknologi dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan:

- a. Memperbaiki efisiensi produksi.
- b. Mencegah kemungkinan meluasnya pencemaran dari proses produksi, termasuk usaha pemanfaatan kembali limbah buangan.
- c. Menanggulangi kemungkinan meluasnya pencemaran yang sudah terlanjur

terjadi dalam lingkungan hidup manusia, termasuk usaha pemanfaatan kembali limbah buangan produksi ini.

- d. Mencegah kemungkinan timbulnya limbah buangan dari konsumen, termasuk pemanfaatan kembali limbah buangan konsumen.
- e. Menanggulangi kemungkinan meluasnya buangan yang terlanjur terjadi dalam lingkungan termasuk pemanfaatan kembali limbah yang datang dari konsumen ini.
- f. Menemukan cadangan baru sumber daya yang ada.
- g. Menemukan sumber daya pengganti.
- h. Mengatur lingkungan hidup pada umumnya, artinya dengan teknologi yang tersedia dapatlah tingkat kualitas lingkungan hidup dipertahankan atau ditingkatkan, terutama kualitas lingkungan hidup manusia yang berhubungan dengan air, udara dan tanah.

Pada awalnya lingkungan tidak dipertimbangkan dalam proses pembangunan ekonomi. Lingkungan dan sumber daya alam dianggap sebagai karunia Tuhan, sehingga tersedianya cukup berlimpah dan selalu dapat tercipta kembali. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui akan tercipta kembali lewat pertumbuhan alamiah maupun karena campur tangan manusia, sedangkan sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui akan meningkat persediaannya apabila dapat ditemukan deposit baru lewat usaha-usaha eksplorasi yang berhasil. Namun dengan semakin semangatnya pembangunan ekonomi, khususnya di negara-negara berkembang seperti di Indonesia, akan semakin banyak sumber daya alam yang diambil dan dikuras dari alam, sehingga tersedianya semakin sedikit, baik itu berupa sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resources*) maupun yang tidak dapat diperbaharui (*non renewable resources*). Selanjutnya dengan berkembangnya semua sektor dalam perekonomian, khususnya industri yang mengolah sumber daya alam, baik itu pertanian maupun industri pengolahan, maka dikhawatirkan pembangunan itu sendiri suatu saat akan mengalami stagnasi karena tidak ada lagi sumber daya alam yang dapat digali, atau sumber daya alam yang ada sudah semakin buruk keadaannya. Sebagai akibat dari pertumbuhan jumlah penduduk dan pembangunan ekonomi, maka laju penggunaan dan pengurasan sumber daya alam selalu bersifat eksponensial.

Untuk mengatasi hal itu, maka mau tidak mau harus ada pengendalian konsumsi barang dan jasa serta pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Konsumsi barang dan jasa ditahan jangan meningkat terlalu cepat dan kegiatan produksi maupun konsumsi jangan sampai mencemari lingkungan, sehingga fungsi utama lingkungan menjadi terganggu. Contoh nyata dari dampak negatif degradasi lingkungan pada generasi mendatang adalah pencemaran logam berat seperti timbal (Pb) yang kita serap dan ditimbun di tulang. Ketika seorang perempuan mengandung, timbal diremobilisasi dan masuk ke peredaran darah. Dari sini timbal masuk ke janin. Timbal menghambat perkembangan otak dan intelegensi dari anak. Dengan demikian, kondisi udara, tanah, dan air yang tercemar timbal, seperti yang kita alami kini membawa dampak bagi generasi selanjutnya. Rata-rata tingkat intelegensi anak (IQ) generasi berikut menjadi lebih rendah daripada generasi sebelumnya dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup generasi tersebut menjadi berkurang.

C. INDUSTRIALISASI DAN EKSTERNALITAS DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan landasan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan dapat diartikan sebagai bentuk pembangunan meskipun terdapat penyusutan cadangan sumber daya alam dan memburuknya lingkungan, tetapi keadaan tersebut dapat digantikan oleh sumber daya lain, baik oleh sumber daya manusia maupun sumber daya kapital (dalam arti luas). Sedangkan dalam pengertian sempit pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai bentuk pembangunan yang tidak mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk melakukan pembangunan, tetapi dengan menjaga agar fungsi sumber daya alam dan lingkungan yang ada tidak menurun tanpa digantikan oleh sumber daya yang lain.

Dari uraian pengertian di atas pembangunan ekonomi tidak hanya berupa meningkatkan produksi barang dan jasa semata, akan tetapi juga perlu menjaga kondisi lingkungan agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya, dan perlu juga ada usaha meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, maupun sumber daya kapital serta teknologi. Oleh karena itu untuk menjamin adanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, haruslah dicari titik keseimbangan

antara kebijakan pembangunan ekonomi yang benar-benar menjamin peningkatan kesejahteraan manusia dalam jangka panjang.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk melaksanakan pembangunan seperti yang dilaksanakan oleh generasi sekarang. Perhatian terhadap pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya diberikan oleh negara sedang berkembang saja tetapi juga diberikan oleh negara maju. Namun demikian tekanan yang diberikan sangat berbeda. Bagi negara maju aspek lingkungan dan ekonomi banyak mendapatkan perhatian, sedangkan untuk negara sedang berkembang aspek pemenuhan kebutuhan dasar dan pencapaian pertumbuhan, termasuk aspek kebudayaan, pertimbangan-pertimbangan politik dan sosial sangat memengaruhi pengertian dari pembangunan berkelanjutan. Lebih jauh lagi pembangunan berkelanjutan baru akan tercapai bila lima tiang pembangunan berkelanjutan dapat terpelihara dengan baik. Kelima tiang tersebut yaitu: keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan politik, keberlanjutan sosial dan keberlanjutan budaya.

Dengan pembangunan industri di suatu negara, akan ada berbagai eksternalitas yang terjadi yang menyentuh kelima tiang pembangunan berkelanjutan- tersebut. Contoh: suatu pengalaman yang ditemukan di Indonesia di daerah Cilacap, Jawa Tengah, yaitu dikembangkannya industri pengilangan minyak, pabrik semen dan juga rencana pembotolan gas alam, diharapkan dengan adanya industri tersebut banyak tenaga kerja yang terserap. Penyerapan tenaga kerja memang terjadi, tetapi sayangnya tenaga kerja yang terserap bukanlah berasal dari tenaga kerja lokal. Hal ini dapat terjadi karena tenaga kerja lokal banyak yang tidak memiliki keterampilan maupun tingkat pendidikan yang diisyaratkan. Disamping itu banyak pula penduduk setempat yang merasakan adanya pencemaran udara dan air oleh industri-industri pengolahan yang ada. Jadi kalau kita lihat dengan lebih teliti, maka manfaat eksternal lebih banyak dinikmati oleh orang-orang di luar daerah industri yaitu berupa tersedianya barang-barang dan jasa yang mungkin lebih murah harganya dan kesempatan kerja serta kenaikan pendapatan. Akan tetapi biaya eksternal yang berupa dampak negatif lebih banyak harus dipikul oleh penduduk di sekitar kawasan industri yang bersangkutan.

Beberapa media massa mencatat bahwa dengan adanya pembangunan industri diperlukan banyak pembebasan tanah. Pembebasan tanah ini pada umumnya sangat menguntungkan pemilik tanah karena harganya naik, akan tetapi sayangnya banyak kasus pembebasan tanah yang menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, karena harga dan pelaksanaan penggantian tanah dianggap tidak memuaskan. Keresahan tersebut akan mengganggu salah satu atau beberapa tiang pembangunan berkelanjutan

Dengan adanya industrialisasi, sesungguhnya tidak ada masalah bagi generasi yang akan datang asalkan pengertian pembangunan berkelanjutan dalam arti luas benar-benar dapat direalisasikan. Namun yang menjadi pertanyaan apakah benar dengan semakin terkurasnya sumber daya, teknologi akan terus berkembang sehingga dapat mengisi kekurangan dari menurunnya sumber daya alam itu dengan sumber daya yang lainnya?

Memang pengalaman sejarah menunjukkan bahwa ketakutan Thomas Robert Malthus bahwa dunia tidak akan mampu memberikan makan penduduknya yang meningkat secara deret ukur telah terjawab dengan adanya kemajuan teknologi, transportasi dan perdagangan. Namun dalam kasus sumber daya alam dan lingkungan tampaknya akan berbeda dengan masalah-masalah peledakan penduduk dan kelaparan. Kita tidak dapat memindahkan limbah dari suatu negara ke negara lain tanpa menimbulkan kerugian negara lain. Demikian juga kasus pencemaran udara dan air akan bersifat global karena adanya eksternalitas, sehingga tampaknya teknologi akan tidak mampu mengatasi masalah pencemaran lingkungan ini, apabila tidak ada usaha-usaha untuk mengurangi derajat terjadinya pencemaran tersebut. Demikian pula banyak sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable resources*) atau diganti fungsinya oleh sumber daya manusia atau sumber daya kapital (*non-substitutability*), tidak dapat dikembalikan dalam bentuk semula (*irreversibility*) dan adanya ketidakpastian (*uncertainty*).

Oleh karena itu pembangunan industri tidak hanya berupa peningkatan produksi barang-barang dan jasa, tetapi juga memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui perbaikan kapital manusia (*human capital*) dan peningkatan kapasitas sumber daya kapital (*manmade capital*) maupun usaha-usaha mempertahankan fungsi sumber daya alam yang ada. Oleh karena itu, untuk menjamin adanya pembangunan berkelanjutan harus dicari titik temu

antara kebijakan pembangunan dan kebijakan lingkungan, sehingga terjadilah pembangunan yang benar-benar menjamin peningkatan kesejahteraan manusia, karena pada dasarnya manusia selalu ingin hidup sejahtera dan dalam waktu yang lama. Akan selalu ada dampak baik atau positif maupun negatif, yaitu timbul dan diterima oleh pihak lain sebagai akibat dari adanya kegiatan suatu pihak atau suatu pelaku ekonomi. Gejala inilah yang didalam perbendaharaan ilmu ekonomi dikenal sebagai eksternalitas.

Dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan perorangan maupun swasta, seringkali dampak yang timbul yang sering disebut eksternalitas ini sering tidak atau belum diperhitungkan sebagai salah satu bagian biaya yang harus dimasukkan dalam perhitungan harga produk/harga pokok produk. Lebih-lebih bila eksternalitas negatif itu dapat dibuang begitu saja ke dalam alam tanpa harus melakukan pembayaran/biaya pembuangan. Namun dengan melihat perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan-perusahaan besar yang terpaksa memasukkan biaya pengolahan limbah guna mengurangi pencemaran (eksternalitas negatif tersebut) ke dalam perhitungan biaya produksi dan sekaligus harga pokok/harga produk yang dihasilkan. Kecenderungan yang terakhir ini terjadi karena pemerintah telah mulai secara aktif mengeluarkan peraturan berikut sanksinya terhadap industri-industri yang menghasilkan limbah diantaranya berupa pencabutan izin usaha dan sanksi hukum yang lainnya.

D. KEBIJAKSANAAN DALAM PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM, PENGEMBANGAN, PEMANFAATANNYA DAN PELESTARIANNYA

Sebelum Anda memahami tentang kebijaksanaan dalam pengelolaan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan serta pelestariannya, terlebih dahulu Anda perlu mengetahui tentang berbagai program yang berkaitan dengan program pengelolaan sumber alam dan lingkungan. Di Indonesia, pemerintah dapat menggariskan program yang berkenaan dengan:

1. Pemanfaatan sumber daya alam yang meliputi pengawasan polusi udara, polusi air, suara dan radiasi.
2. Pengolahan kualitas udara dan air, yang meliputi pengawasan polusi udara,

polusi air, suara dan radiasi.

3. Kesehatan lingkungan yang meliputi materi beracun dan berbahaya, pengelolaan buangan padat dan penyakit yang erat hubungannya dengan lingkungan.
4. Bencana alam.
5. Pendidikan lingkungan dan informasi pada masyarakat.

Menurut Hadi Prayitno dan Budi Santosa (1996), kebijaksanaan dalam pengelolaan, pengembangan, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan minimal haruslah memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Menghormati dan memelihara komunitas kehidupan

Ini merupakan prinsip yang mencerminkan kewajiban untuk peduli kepada orang lain dan kepada bentuk-bentuk kehidupan lain sekarang dan masa-masa yang akan datang. Ini merupakan prinsip etika yang mengandung arti bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan sekelompok lain atau generasi kemudian. Kita harus membagi dengan adil baik manfaat maupun biaya sumber daya yang digunakan serta biaya pelestarian lingkungan di antara masyarakat-masyarakat yang berbeda dan kelompok-kelompok yang bersangkutan, di antara mereka yang miskin dan yang kaya serta di antara generasi kita dan generasi yang akan datang.

2. Memperbaiki kualitas hidup manusia

Tujuan pembangunan yang sesungguhnya adalah memperbaiki mutu hidup manusia. Ini sebuah proses yang memungkinkan manusia menyadari potensi mereka, membangun rasa percaya diri mereka, dan masuk ke kehidupan yang bermanfaat dan berkecukupan. Pertumbuhan ekonomi merupakan komponen penting dalam pembangunan, akan tetapi ini tidak boleh dijadikan sasaran sendiri, atau dibiarkan berkembang tanpa batas. Walaupun orang berbeda dalam menentukan sasaran yang hendak dicapai melalui pembangunan, sebagian dari itu sesungguhnya bersifat umum. Sasaran-sasaran ini mencakup hidup yang panjang dan sehat, pendidikan, ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk pencapaian standar hidup yang layak, kebebasan politik, jaminan hak asasi dan bebas dari tindakan kekerasan. Pembangunan disebut sejati bila dapat membuat hidup kita lebih baik dalam segala segi.

3. Melestarikan daya hidup dan keragaman bumi

Pembangunan yang berpijak pada pelestarian perlu disertai kehati-hatian untuk melindungi struktur, fungsi serta keragaman sistem yang alami, karena spesies kita sangat bergantung pada sistem-sistem tersebut. Prinsip ini menuntut kita untuk: (1) Melestarikan sistem-sistem penunjang kehidupan, yaitu proses-proses ekologi yang menjaga planet ini cocok untuk kehidupan. Sistem-sistem ini mengatur iklim, membersihkan udara serta air, mengatur aliran air, mendaur ulang unsur-unsur esensial, menciptakan dan meregenerasi tanah, dan memungkinkan ekosistem memperbaharui diri. (2) Melestarikan keanekaragaman hayati, meliputi spesies tumbuhan, hewan, organisme lain, seluruh cadangan genetik dalam setiap spesies, dan keragaman ekosistem. (3) Menjamin agar penggunaan sumber-sumber daya yang dapat diperbaharui berkelanjutan. 4. Menghindari pemborosan sumber-sumber daya yang tidak dapat diperbaharui.

seperti: mineral, minyak, gas dan batubara praktis digolongkan sebagai sumber-sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Tidak seperti halnya tumbuh-tumbuhan, ikan, tanah, bahan-bahan ini tidak digunakan secara berkelanjutan.

5. Berusaha tidak melampaui kapasitas daya dukung bumi

Sampai tingkat tertentu ekosistem bumi dan biosfer secara keseluruhan masih mampu bertahan terhadap gangguan atau beban tanpa mengalami kerusakan yang membahayakan. Batas-batas ini bervariasi antara daerah yang satu dan yang lainnya, dan tingkat gangguan tergantung pada beberapa orang di sana, serta berapa banyaknya makanan, air, energi dan bahan baku yang digunakan oleh setiap orang, juga limbah yang dihasilkan.

6. Meubah sikap dan gaya hidup orang perorang

Guna menerapkan etika untuk menuju hidup yang berkelanjutan, orang harus mengkaji ulang tata nilai mereka dan mengubah sikap mereka. Masyarakat harus memperkenalkan nilai-nilai yang mendukung etika baru ini dan meninggalkan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan falsafat hidup berkelanjutan.

7. Mendukung kreativitas masyarakat untuk memelihara lingkungan sendiri.

Kegiatan orang per orang atau kelompok yang kreatif dan produktif merupakan wadah yang paling mudah dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tinggi nilai sosialnya atau sebagai ajang untuk mengekspresikan kepedulian seseorang atau kelompok orang mengenai sesuatu. Oleh sebab itu, organisasi kemasyarakatan yang disukai dan disegani masyarakat, bila ditunjang dengan informasi yang tepat, dapat dimanfaatkan untuk mengajak masyarakat umum berperan serta secara aktif dalam menciptakan kehidupan berkelanjutan yang mantap.

8. Menyediakan kerangka kerja nasional untuk memadukan upaya pembangunan dan pelestarian

Masyarakat memerlukan landasan informasi dan pengetahuan, kerangka kerja hukum dan kelembagaan, serta kebijaksanaan sosial dan ekonomi yang konsisten agar dapat maju secara rasional. Program nasional harus luwes, mudah dibenahi kembali arahnya sesuai dengan pengalaman dan kebutuhan-kebutuhan baru. Jadi upaya-upaya yang bersifat nasional harus:

- a. Memperlakukan tiap daerah sebagai sebuah sistem yang terpadu dan memperhitungkan adanya interaksi-interaksi antara kegiatan-kegiatan manusia dengan udara, air, serta organisme lain.
- b. Menyadari bahwa tiap sistem memengaruhi dan dipengaruhi baik oleh sistem-sistem yang lebih besar maupun lebih kecil entah dalam segi ekologi, ekonomi, sosial atau politik.
- c. Memandang orang sebagai unsur sentral dalam sistem dan mengevaluasi faktor-faktor sosial, ekonomi, teknik dan politik yang berpengaruh terhadap bagaimana mereka menggunakan sumber daya alam.
- d. Meningkatkan manfaat yang dapat diperoleh dari tiap sumber daya yang tersedia.
- e. Mengaitkan kebijakan ekonomi dengan kapasitas daya dukung lingkungan.
- f. Mempromosikan teknologi yang menggunakan sumber daya secara lebih efisien.
- g. Menjamin agar para pengguna sumber daya mengganti sepenuhnya biaya atau pengorbanan orang lain (*social cost*) atas manfaat yang mereka nikmati.

BAB XIV

Globalisasi Pembangunan Ekonomi

A. KONSEP GLOBALISASI

Dilihat dari asal kata, globalisasi berasal dari kata global yang berarti Universal. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, ada yang memandang globalisasi sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat. Di sisi lain, ada yang melihat globalisasi sebagai sebuah proyek yang diusung oleh negara-negara adikuasa, sehingga bisa saja orang memiliki pandangan negatif atau curiga terhadapnya. Dari sudut pandang ini, globalisasi diartikan sebagai kapitalisme dalam bentuk yang paling mutakhir. Negara-negara yang kuat dan kaya praktis akan mengendalikan ekonomi dunia dan negara-negara kecil makin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing. Sebab, globalisasi cenderung berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia, bahkan berpengaruh terhadap bidang-bidang lain seperti budaya dan agama. Namun secara umum globalisasi diartikan suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan memengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara.

Dengan demikian, globalisasi dapat diartikan sebagai ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, budaya, dan bentuk interaksi yang lain sehingga satu negara dengan negara lain menjadi tanpa batas. Globalisasi adalah proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan

memengaruhi satu sama lain. Globalisasi memiliki banyak kesamaan karakter dengan internasionalisasi sehingga kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian. Sebagian pihak sering menggunakan istilah globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran negara atau batas-batas negara.

Kata "globalisasi" diambil dari kata global, yang artinya universal. Menurut Achmad Suparman globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu (benda atau perilaku) sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Globalisasi memiliki makna yang luas, hal ini bergantung dari sisi mana orang melihatnya. Globalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat.

Di sisi lain, ada yang melihat globalisasi sebagai sebuah proyek yang diciptakan oleh negara adikuasa, sehingga orang memiliki pandangan negatif terhadap adanya globalisasi. Dari sudut pandang ini, globalisasi dianggap sebagai kapitalisme dalam bentuk yang paling mutakhir. Negara-negara yang kuat dan kaya praktis akan mengendalikan ekonomi dunia dan negara-negara kecil makin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing. Sebab, globalisasi cenderung berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia, bahkan berpengaruh terhadap bidang-bidang lain seperti budaya dan agama. Istilah globalisasi pertama kali digunakan pada tahun 1985 oleh Theodore Levitte.

Thomas menyatakan bahwa globalisasi memiliki dimensi ideologi dan teknologi. Dimensi teknologi yaitu kapitalisme dan pasar bebas, sedangkan dimensi ideologi adalah teknologi informasi yang telah menyatukan dunia. Sedangkan menurut Emanuel Ritscher globalisasi merupakan suatu jaringan kerja global secara bersamaan menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpecah-pecah dan terisolasi kedalam saling ketergantungan dan persatuan dunia.

B. TEORI GLOBALISASI

Menurut Cochrane dan Pain, terdapat tiga posisi teoritis dalam kaitannya dengan globalisasi, yaitu:

- a. Para globalis percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang

memiliki konsekuensi nyata terhadap bagaimana orang dan lembaga di seluruh dunia berjalan. Mereka percaya bahwa negara-negara dan kebudayaan lokal akan hilang diterpa kebudayaan dan ekonomi global yang homogen. Meskipun demikian, para globalis tidak memiliki pendapat sama mengenai konsekuensi terhadap proses tersebut. Para globalis positif dan optimistis menanggapi dengan baik perkembangan semacam itu dan menyatakan bahwa globalisasi akan menghasilkan masyarakat dunia yang toleran dan bertanggung jawab. Para globalis pesimis berpendapat bahwa globalisasi adalah sebuah fenomena negatif karena hal tersebut sebenarnya adalah bentuk penjajahan barat yang memaksa sejumlah bentuk budaya dan konsumsi yang homogen dan terlihat sebagai sesuatu yang benar dipermukaan.

- b. Para tradisional tidak percaya bahwa globalisasi tengah terjadi. Mereka berpendapat bahwa fenomena ini adalah sebuah mitos. Mereka merujuk bahwa kapitalisme telah menjadi sebuah fenomena internasional selama ratusan tahun. Apa yang tengah dialami saat ini hanyalah merupakan tahap lanjutan dari produksi dan perdagangan kapital.
- c. Para transformasional berada di antara para globalis dan tradisional. Mereka setuju bahwa pengaruh globalisasi telah sangat dilebih-lebihkan oleh para globalis. Namun, mereka juga berpendapat bahwa sikap bodoh apabila menyangkal keberadaan konsep ini. Posisi teoritis ini berpendapat bahwa globalisasi seharusnya dipahami sebagai seperangkat hubungan yang saling berkaitan dengan murni melalui sebuah kekuatan, yang sebagian besar tidak terjadi secara langsung. Mereka menyatakan bahwa proses ini dapat dikendalikan.

C. KARAKTERISTIK GLOBALISASI

Berikut ini beberapa ciri yang menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia.

1. Perubahan dalam dimensi ruang dan waktu. Perkembangan alat pemuas kebutuhan manusia seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi dengan sangat cepat. Sementara dalam bidang lain seperti kepariwisataan memungkinkan kita

merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda.

2. Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa (terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olah raga internasional). Hal ini mendorong konsumsi dan pengetahuan mengenai gagasan dan pengalaman baru dalam hal-hal yang ragam budaya, misalnya dalam bidang fashion, literatur, dan makanan.
3. Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam *World Trade Organization* (WTO).

Adapun menurut Jan Art Scholte, terdapat lima dimensi yang memengaruhi interaksi pelaku dalam ekonomi politik internasional, yaitu:

1. Globalisasi mencakup fenomena internasionalisasi, artinya meningkatkan hubungan lintas batas antara aktor-aktor internasional seperti yang terwujud dalam aliran barang, jasa, modal, teknologi, bahkan manusia.
2. Globalisasi juga mengandung arti proses liberalisasi. Misalnya hambatan tarif maupun non tarif yang dikenakan oleh negara terhadap aliran barang dan jasa dalam rangka menciptakan perekonomian global yang terbuka dan dikendalikan oleh mekanisme pasar.
3. Globalisasi mengacu pada gagasan universalisasi dalam bentuk penyebaran nilai-nilai yang bersifat universal seperti demokrasi dan HAM.
4. Globalisasi dilihat sebagai kelanjutan dari proses modernisasi yang identik dengan westernisasi.
5. Globalisasi juga menciptakan proses deterritorialization atau apa yang disebut munculnya regulasi atau institusi yang melampaui teritorial negara.

Sedangkan menurut Thomas D. Lairson dan David Skidmore ada lima aktivitas ekonomi yang tercakup dalam globalisasi :

1. Telah terjadi pertumbuhan yang pesat dari transaksi keuangan Internasional.
2. Adanya pertumbuhan yang tinggi dalam volume perdagangan barang dan jasa terutama antara perusahaan multinasional.
3. Adanya peningkatan yang pesat dari *Foreign Direct Investment* (FDI) yang dilakukan oleh perusahaan multinasional.

4. Terbentuknya pasar global yang mengurangi segmentasi pasar melalui konvergensi harga pada skala global.
5. Penyebarannya teknologi ke seluruh dunia melalui sistem transportasi dan komunikasi yang mempersingkat jarak ruang dan waktu.

Dari pengertian globalisasi ekonomi diatas dapat dilihat bahwa ukuran yang dipakai untuk menentukan tingkat suatu negara menjadi beneficiary dari proses globalisasi dilihat dari peningkatan volume perdagangan internasional, jumlah FDI yang diterimanya serta aliran modal dalam bentuk lainnya.

Selain karakteristik di atas, ada pula pengelompokkan globalisasi berdasarkan bidangnya. Macam-macam globalisasi antara lain sebagai berikut:

a. Globalisasi Perekonomian

Globalisasi perekonomian merupakan proses dimana seluruh kegiatan ekonomi di seluruh negara menjadi satu kekuatan pasar yang terintegrasi tanpa hambatan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian menghapuskan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa. Perwujudan globalisasi ekonomi terjadi dalam bentuk-bentuk berikut ini :

- 1) Globalisasi Produksi
- 2) Globalisasi Pembiayaan
- 3) Globalisasi Tenaga Kerja
- 4) Globalisasi Jaringan Informasi
- 5) Globalisasi Perdagangan

Menurut Thompson, kaum globalis mengklaim bahwa telah terjadi intensifikasi secara cepat dalam bidang perdagangan internasional dan investasi. Secara nyata, perekonomian nasional telah menjadi bagian dari perekonomian global yang dikendalikan oleh kekuatan pasar dunia.

b. Globalisasi Kebudayaan

Globalisasi memengaruhi sebagian besar aspek yang ada dimasyarakat, termasuk kebudayaan. Kebudayaan dapat diartikan sebagai persepsi yang dimiliki atau nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat terhadap berbagai hal. Baik nilai-nilai maupun persepsi berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan/psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam pikiran. Aspek-aspek kejiwaan ini menjadi penting artinya apabila disadari, bahwa tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh apa yang ada dalam alam pikiran orang yang bersangkutan.

Sebagai salah satu hasil pemikiran dan penemuan seseorang adalah kesenian, yang merupakan subsistem dari kebudayaan. Globalisasi sebagai sebuah gejala tersebarinya nilai-nilai dan budaya tertentu keseluruh dunia. Sehingga menjadi budaya dunia atau world culture. Cikal bakal dari persebaran budaya dunia ini dapat ditelusuri dari perjalanan para penjelajah Eropa Barat ke berbagai tempat di dunia ini. Namun, perkembangan globalisasi kebudayaan secara intensif terjadi pada awal ke-20 dengan berkembangnya teknologi komunikasi. Kontak melalui media menggantikan kontak fisik sebagai sarana utama komunikasi antar bangsa. Perubahan tersebut menjadikan komunikasi antar bangsa lebih mudah dilakukan, hal ini menyebabkan semakin cepatnya perkembangan globalisasi kebudayaan. Ciri-ciri berkembangnya globalisasi kebudayaan antara lain:

- 1) Penyebaran prinsip multikebudayaan (*multiculturalism*), dan kemudahan akses suatu individu terhadap kebudayaan lain di luar kebudayaannya.
- 2) Berkembangnya turisme dan pariwisata. Semakin banyaknya imigrasi dari suatu negara ke negara lain.
- 3) Berkembangnya mode yang berskala global, seperti pakaian, film dan lain lain.
- 4) Bertambah banyaknya event-event berskala global, seperti Piala Dunia FIFA.
- 5) Persaingan bebas dalam bidang ekonomi.
- 6) Meningkatkan interaksi budaya antar negara melalui perkembangan media massa. Sehingga terjadi pertukaran kebudayaan internasional.

D. DAMPAK GLOBALISASI

Globalisasi telah menimbulkan dampak yang besar dalam kehidupan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak tersebut berupa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari adanya globalisasi antara lain:

1. Memacu untuk meningkatkan kualitas diri.
2. Mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan.
3. Mudah melakukan komunikasi.
4. Mobilitas tinggi.
5. Menumbuhkan sikap kosmopolitan dan toleran.

6. Mudah memenuhi kebutuhan.

Adapun dampak negatif dari adanya globalisasi antara lain:

1. Informasi yang tidak tersaring.
2. Perilaku konsumtif.
3. Membuat sikap menutup diri, berpikir sempit.
4. Pemborosan pengeluaran dan meniru perilaku yang buruk.
5. Mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara.

Era globalisasi mengharuskan masyarakat bersikap bijaksana dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai kebangsaan dalam berinteraksi terhadap tatanan dunia luar. Hal ini dalam rangka berupaya mengurangi berbagai dampak negatif yang timbul dengan dari adanya globalisasi tersebut. Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Pendidikan sebagai upaya membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia.
- b. Pemberian keterampilan hidup (*life skill*) agar mampu menciptakan kreativitas dan kemandirian.
- c. Usaha menumbuhkan budaya dan sikap global seperti, mandiri, kreatif, menghargai, optimis dan terbuka.
- d. Usaha selalu menumbuhkan wawasan kebangsaan dan identitas nasional.
- e. Usaha menciptakan pemerintah yang transparan dan demokratis.

GLOSARIUM

<i>Accumulation capital</i>	: akumulasi kapital
<i>Capital absorption capacity</i>	: kemampuan menyerap kapital
<i>Chronic under employment</i>	: pengangguran kronis
<i>Eksternalitas</i>	: dampak baik atau positif maupun negatif
<i>Environmental accounting</i>	: perhitungan lingkungan
<i>Disguise unemployment</i>	: pengangguran tersembunyi
<i>Developing countries</i>	: negara sedang berkembang
<i>Economic development</i>	: perkembangan ekonomi
<i>Economic growth</i>	: pertumbuhan ekonomi
<i>Force saving</i>	: tabungan paksa
<i>High cost economy</i>	: biaya ekonomi tinggi
<i>Human capital</i>	: kapital manusia
<i>Invisible under employment</i>	: setengah pengangguran tidak kentara
<i>Imperfection</i>	: ketidaksempurnaan pasar
<i>Indigenous Forces</i>	: kekuatan dari dalam
<i>Low level equilibrium trap</i>	: keseimbangan pendapatan yang rendah
<i>Market imperfection</i>	: ketidaksempurnaan pasar
<i>Marginal product</i>	: produk marginal
<i>Marginal physical product</i>	: produk fisik marginal
<i>Manmade capital</i>	: sumber daya kapital
<i>Potential under employment</i>	: pengangguran potensial
<i>Term of trade</i>	: nilai tukar
<i>Thresh-old</i>	: batas ambang
<i>Tax rate</i>	: tingkat pajak
<i>Underemployment</i>	: pengangguran
<i>Under developed countries</i>	: negara yang masih terbelakang

<i>Underemployment</i>	: setengah pengangguran
<i>Un-certainty</i>	: ketidakpastian
<i>Visible under employment</i>	: setengah pengangguran kentara
<i>Vicious circle</i>	: lingkaran setan

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2003. Sakernas. Jakarta:BPS
- Djajadiningrat, Surna T, Population and Development for a Sustainable Future, paper presented in the Seminar "*World Without Borders*", July 18-22, 1990, Yogyakarta.
- Ginanjar Kartasasmita. 1994. Konsep dan Implikasi. dipresentasikan pada 25 Februari 2011, Jurusan Manajemen dan kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: Tidak diterbitkan.
- Hadi Prayitno dan Budi Santosa. 1996. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Irawan dan M. Suparmoko. 2008. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE.
- Lincoln Arsyad. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Masykur Wiratmo. 1992. *Ekonomi Pembangunan*, Ikhtisar Teori, Masalah dan Kebijakan, MW Mandala, Yogyakarta.
- Meier, Gerald M., and Baldwin, Robert E., *Economic Development, Theory, History and Policy*, John Wiley & Sons Inc., New York
- Moelyarto Tjokrowinoto,1996. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Mudrajat Kuncoro. 2010. *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Pendidikan Kewarnegaraan / disusun oleh: Sunarso...(et al),---Ed.1, cet A,--- Yogyakarta: UNY Press/2006, 305 hlm; 16 x 20.5cm
- Sadono Sukimo. 2010. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Siagian. 1994. Konsep dan Implikasi. dipresentasikan pada 25 Februari 2011. Jurusan Manajemen dan kebijakan Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta: Tidak diterbitkan.
- Stiglitz, Sen and Fitoussi. *Social Indicators Research*. Vol. 102, No. 1, NATIONAL AND PERSONAL WELLBEING: MEASURING THE PROGRESS OF SOCIETIES, ISQOLS IX, FLORENCE (May

2011), pp. 117-129

Todaro, Michel P. 2006. *Ekonomi Pembangunan Di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.

TENTANG PENULIS

Dr. Endang Mulyani M.Si.



Dosen tetap pada Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, dan Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Aktif melakukan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, mengikuti seminar nasional dan internasional. Minat utamanya sebagai akademisi adalah kewirausahaan, -----
----- . Publikasi ilmiahnya tersebar di berbagai jurnal seperti -----
